

Dana Listiana | Lisyawati Nurcahyani | Any Rahmayani

Wacana Nasionalisme

dalam Pers Kalimantan Barat
pada Masa Pergerakan Kebangsaan

Epilog: Zulkiffi



Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat

...manjan moltonja itoe, akan dapat meoedjoetkan dan
mienoentoet lalajo - Tjerdas
DIOESAHAMOE LETAK NASIBMOE."
Dimanakah djalan babagia?
Dioesahamoe letak nasibmoe.
Pertjajalah pada dirimoe!
Doenia Achirat akan Moelia?
Bekerdja, sinsting lengan badjoemoe.
Pikiran itoe pemimpinmoe!

G.S.L.

(950-959)

Wacana Nasionalisme
dalam Pers Kalimantan Barat
pada Masa Pergerakan Kebangsaan

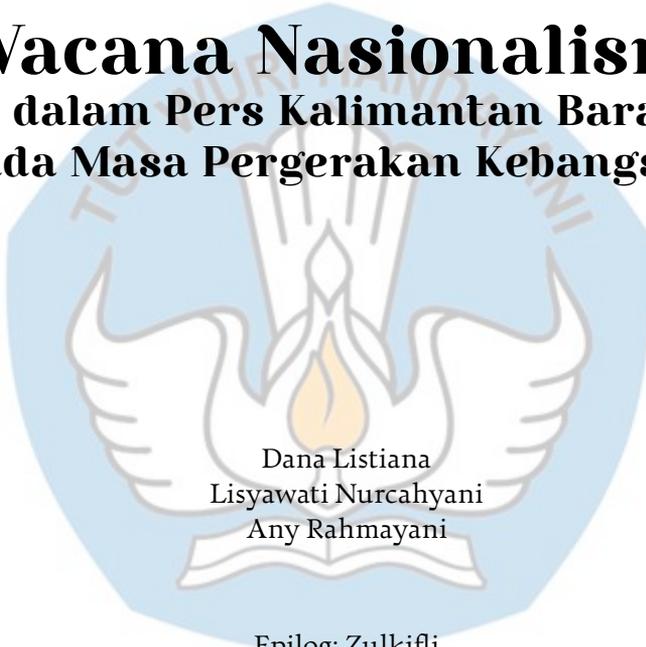


**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan



Dana Listiana
Lisyawati Nurcahyani
Any Rahmayani

Epilog: Zulkifli

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

mja
Media Jaya Abadi

**Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat
pada Masa Pergerakan Kebangsaan**

Penulis:

Dana Listiana
Lisyawati Nurcahyani
Any Rahmayani

Editor:

Asep Ruhimat & Izzudin Irsam Mujib

ISBN: 978-623-7526-11-7

Desain Sampul dan Tata Letak:
Yuda A. Setiadi

Gambar Sampul:

Puisi karya Gusti Sulung Lelanang dalam Majalah *Kesedaran* tahun 1940

Penerbit:

CV Media Jaya Abadi

Redaksi:

Padalarang-Bandung

Telp. +62 812 22205182

E-mail: penerbit.mja.bandung@gmail.com

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab penerbit

Daftar Isi

Daftar Gambar.....	vii
Pengantar Penerbit.....	ix
Prakata.....	xi
Prolog Melacak Gejala Nasionalisme Awal di Kalimantan Barat Melalui Pers.....	1
<i>Dana Listiana</i>	
BAB 1 Tiga Warna Kemandirian Ekonomi: Akar-Akar Nasionalisme dalam Pers Cetak Kalimantan Barat Tahun 1920-an	7
<i>Any Rahmayani</i>	
BAB 2 Pemikiran Haji Rais bin Abdoerrachman dan Masa Pergerakan Nasional di Kalimantan Barat (1900–1942).....	43
<i>Lisyawati Nurcahyani</i>	
BAB 3 Indonesia dalam Penciptaan Nasionalisme Borneo: Rasa Kebangsaan Persatoean Anak Borneo dalam Majalah <i>Kesedaran</i> dan <i>Doenia Pemoeda</i> di Kalimantan Barat Tahun 1940	83
<i>Dana Listiana</i>	
Epilog Nasionalisme: Dari Kalimantan Barat untuk Indonesia	121
<i>Zulkifli</i>	
Tentang Penulis.....	127



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Daftar Gambar

Gambar 1.1	<i>Warta Borneo</i> edisi 29 November 1924	40
Gambar 1.2	<i>Sinar Borneo</i> edisi 10 Mei 1926.....	41
Gambar 1.3	<i>Oetoesan Borneo</i> edisi 28 Juli 1928	42
Gambar 2.1	Haji Rais bin Abdoerrachman	43
Gambar 2.2	Haji Rais bin Abdoerrachman bersama rekan pers.....	69
Gambar 2.3	Surat kabar <i>Halilintar</i> , 24 Mei 1924	78
Gambar 2.4	Surat Keputusan sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan.....	79
Gambar 2.5	Dokumen waris keturunan Haji Rais bin Abdoerrachman.....	80
Gambar 2.6	Dokumen waris keturunan Haji Rais bin Abdoerrachman.....	81
Gambar 3.1	Sekretariat PAB di Voorstraat (kini Jl. Tanjungpura)	91
Gambar 3.2	Iklan sekolah partikelir. Sekolah Bumiputra yang digagas pengurus PAB (kiri) dan Sekolah Islamiah yang didukung pengurus PAB (kanan).....	100
Gambar 3.3	Sampul <i>Kesedaran</i> edisi No. 1 Tahun II	101
Gambar 3.4	R.M. Nalaprana, Ketua PAB, bersama anggota Dewan Rakyat	102
Gambar 3.5	Sampul <i>Doenia Pemoeda</i> Nomor 1 Tahun 1.....	108
Gambar 3.6	G.S. Lelanang	109



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Pengantar Penerbit

Sejarah seharusnya dapat berkontribusi dalam membangun nasionalisme Indonesia, bukan sebaliknya. Narasi nasionalisme Indonesia yang dalam buku teks sekolah cenderung berfokus pada pergulatan ide pada level nasional di Pulau Jawa sehingga relatif menutupi kehadiran berbagai bentuk nasionalisme di daerah-daerah lain, tidak terkecuali di Kalimantan Barat.

Gejala nasionalisme di Kalimantan Barat sendiri mengemuka lewat belasan media massa cetak yang terbit pada masa kolonial menjelang masa pergerakan nasional. Saat itu, pembangunan sistem kolonial yang menghasilkan tatanan sosial baru telah direspons secara beragam. Salah satu bentuk respons itu berupa wacana nasionalisme dalam serangkaian terbitan pers cetak di Kalimantan Barat.

Buku *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan* ini merupakan bunga rampai yang menyuguhkan tiga tulisan dari tiga objek penelitian yang diramu oleh tiga orang peneliti dengan maksud untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk nasionalisme awal di Kalimantan Barat.

Meskipun dalam bentuk penelitian yang terkesan “berat”, ketiga tulisan tersebut telah dirangkai penulisnya dengan kalimat-kalimat yang “ringan” sehingga mudah dicerna. Dengan demikian, tim penyunting redaksi hanya perlu memverifikasi data dan sedikit menyesuaikan dengan gaya penulisan buku populer seperti pada umumnya. Terima kasih kepada para penulis yang telah menyajikan tulisan yang begitu runtut dengan data-data lengkap dan valid.

Besar harapan kami, bunga rampai ini dapat mengontektualisasi wacana dalam perjalanan sejarah masyarakat Kalimantan Barat dan menelaah akar wacana melalui latar belakang historis keluarga ataupun aktivitas pergerakan dari para aktor (penulis atau pemimpin redaksi) sebagai pencetusnya dan lembaga pers sebagai penerbitnya.

Tujuan akhir dari penerbitan buku ini tentu saja terciptanya karya yang dapat menambah khazanah pustaka, terlebih buku-buku bertema sejarah, sekaligus berguna bagi generasi kini sebagai penerus sejarah bangsa. Selamat membaca.

Bandung, Desember 2019

Penerbit



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Prakata

Sentimen suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) terlihat menguat dari merebaknya ujaran kebencian di media sosial hingga munculnya isu penodaan agama. SARA sebagai keniscayaan bagi Indonesia kerap memicu konflik horizontal karena selama puluhan tahun terbiasa diredam bahkan ditabukan untuk dibicarakan.

Kondisi tersebut membutuhkan kesadaran multikultur dari setiap individu bangsa Indonesia. Jika tidak, salah seorang tokoh penganjur toleransi Indonesia mengingatkan bahwa “sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran bila toleransi sosial, agama, dan budaya tidak mantap.”

Berbagai peristiwa intoleransi dan peringatan tersebut merupakan media refleksi historis untuk kembali mengingat proses pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa. Narasi nasionalisme Indonesia yang dalam buku teks sekolah cenderung seragam dan berfokus pada pergulatan ide pada skop nasional terutama di Pulau Jawa relatif menutupi kehadiran berbagai bentuk nasionalisme di daerah maupun corak-corak lain. Padahal, narasi sejarah yang menyuguhkan realitas masyarakat di berbagai daerah dibutuhkan dalam kondisi beragam sesungguhnya di Indonesia. Selain itu, pemahaman bahwa nasionalisme Indonesia tidaklah terjadi tiba-tiba melainkan melalui proses panjang atas kontribusi berbagai elemen bangsa di Indonesia diharap dapat menyuguhkan dinamika yang menghubungkan masa sekarang dan masa lalu. Akhir kata, bunga rampai bertajuk *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan* ini diharap dapat berkontribusi dalam membangun nasionalisme Indonesia, bukan sebaliknya.

Pontianak, November 2019

Tim Penulis



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Prolog

Melacak Gejala Nasionalisme Awal di Kalimantan Barat Melalui Pers

Dana Listiana

“Nationalism is a common project for the present and the future, its fulfillment is never finally complete. It must be struggled for in every generation.” (Anderson, 1999: 3)

Pernyataan Benedict Anderson tersebut sejalan dengan Hans Kohn (1984: 5) dalam pengantar buku *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya* berikut.

“Hanya dengan mempelajari pertumbuhan sejarah nasionalisme dan mengadakan penyelidikan perbandingan tentang bentuk-bentuknya yang berbeda itu, kita dapat memahami pengaruh nasionalisme sekarang, dan harapan serta bahaya yang telah dibawanya dan akan terus dibawanya, bagi kemerdekaan umat manusia dan pemeliharaan perdamaian.”

Pengantar Kohn memperingatkan kita untuk terus memahami nasionalisme. Pengalaman masa silam sangat menentukan pemahaman diri dan masa depan suatu bangsa.

Akan tetapi, apakah pembelajaran nasionalisme Indonesia, khususnya seperti yang dimuat dalam buku teks resmi pelajaran sejarah dan bahkan Sejarah Nasional Indonesia masih relevan? Nasionalisme Indonesia semakin diragukan, terlebih kini setiap daerah berlomba-lomba melakukan upaya konstruksi identitas lokal. Persoalan keterlibatan masyarakat daerah (khususnya luar Jawa) dalam berbagai bentuk nasionalisme kedaerahan selama ini dianggap sebagai paradoks bagi nasionalisme Indonesia itu sendiri. Padahal nyatanya, kelahiran nasionalisme Indonesia terbentuk

secara bertahap dan bermula dari berbagai bentuk nasionalisme di berbagai daerah di Indonesia.

Nasionalisme etnik atau nasionalisme kedaerahan memiliki sifat-sifat yang disebut Taufik Abdullah (2001: 59) sebagai “nasionalisme kultural” atau yang disebut George McTurnan Kahin sebagai “nasionalisme kebudayaan” (2013: 91). Nasionalisme kedaerahan juga berwujud sebagai “nasionalisme kerakyatan” seperti yang disebut oleh Benedict Anderson (2008: 168).

Hasil kajian sejarawan muda seperti Farabi Fakhri (2014) dengan berbagai bentuk “nasionalisme Jawa” dan Pradipto Niwandhono (2011) dengan “nasionalisme Indis” adalah bukti dari bentuk-bentuk nasionalisme yang disebut para begawan sejarah di atas. Keragaman bentuk nasionalisme kedaerahan ini sepatutnya hadir dalam sejarah nasional kita. Pemahaman bahwa nasionalisme kultural tersebut kemudian luntur, lebur, dan mencair karena dihadapkan oleh kenyataan kolonialisme dan kemudian melahirkan nasionalisme politik yang bergerak pada pembentukan negara (Abdullah, 2001: 30–61; Miert, 2003) adalah narasi yang diharap mampu memberi kesadaran bahwa ke-Indonesia-an kita sekarang ini merupakan kelanjutan sejarah.

Ragam nasionalisme kedaerahan seharusnya mengemuka dalam kajian serempak di berbagai daerah di Indonesia bertajuk “Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah” empat dekade silam. Sayangnya, masuk dalam proyek sejarah lokal, karya yang dihasilkan cenderung berfungsi sebagai pendukung narasi besar nasional (Schulte-Nordholt dkk., 2008: 1–6).

Gejala nasionalisme di Kalimantan Barat terdeteksi melalui 13 pers cetak dalam studi “Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial”. Studi Listiana dkk. pada 2014 tersebut menunjukkan dua arus utama gagasan nasionalisme, yakni anti-kolonialisme dan ragam ide kebangsaan. Temuan tersebut menguatkan argumen Anderson bahwa perkembangan cetakan sebagai komoditas (kapitalisme cetak/*print capitalism*) adalah kunci dari pemuatan gagasan-gagasan yang membangun kesadaran nasional (Anderson, 2008: 55–70).

Berpijak pada temuan Listiana dkk. dan argumen Anderson tersebut, tulisan ini mengajukan 2 pertanyaan utama.

1. Bagaimana bentuk-bentuk nasionalisme yang mengemuka pada surat kabar Kalimantan Barat pada masa pergerakan nasional?
2. Mengapa bentuk-bentuk nasionalisme tersebut mengada (muncul) di Kalimantan Barat?

Melalui pertanyaan tersebut, tulisan ini diharap mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk nasionalisme awal di Kalimantan Barat. Selain itu, tulisan ini diharap dapat mengontektualisasi wacana dalam perjalanan sejarah masyarakat Kalimantan Barat dan menelaah akar wacana melalui latar belakang historis (keluarga ataupun aktivitas pergerakan) dari aktor (penulis atau pemimpin redaksi) pencetusnya dan lembaga pers penerbit artikel.

Pembahasan tulisan ini dibatasi oleh waktu dan spasial tertentu. Batas temporal kajian mencakup terminologi umum periode pergerakan nasional, yakni paruh pertama abad ke-20. Cakupan spasial kajian adalah wilayah Kalimantan Barat atau Keresidenan Borneo *Westerafdeeling* pada masa Pemerintah Hindia Belanda.

Pembatasan spasial didasarkan oleh kondisi sosial-politik yang terbangun pada paruh pertama abad ke-20, masa terbit pers cetak yang ditelaah dalam tulisan ini. Kurun tersebut adalah periode setelah negara kolonial di wilayah luar Jawa (*buitenlanden*) telah terbentuk. Pembentukan negara kolonial yang di Kalimantan Barat mulai diusahakan serius sejak pertengahan abad ke-19 baru menunjukkan hasil di awal abad ke-20. Ditandai oleh kontrak pendek tahun 1911, sistem administrasi dan struktur birokrasi kolonial di Kalimantan Barat mulai ditata dan dibangun oleh Pemerintah Kolonial (Listiana, 2017).

Pembangunan sistem kolonial yang menghasilkan tatanan sosial baru ini kemudian direspons beragam dalam serangkaian terbitan pers cetak. Salah satu bentuk respons berupa wacana nasionalisme dalam media massa terbitan Kalimantan Barat dibahas dalam fokus-fokus tertentu dalam bunga rampai. Mengangkat tema “Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan”, bunga rampai ini menyuguhkan tiga judul dengan tiga objek penelitian.

“Tiga Warna Kemandirian Ekonomi: Menilik Akar-Akar Nasionalisme dalam Pers Cetak Kalimantan Barat Tahun 1920-an” merupakan telaah Any Rahmayani atas tiga surat kabar pada tahun 1920-an. Periode krusial ketika media menumbuhkan bentuk akar yang berbeda dari nasionalisme di Kalimantan Barat ini diwakili oleh kehadiran *Warta Borneo*, *Sinar Borneo*, dan *Oetoesan Borneo*. Ketiganya dinilai Rahmayani mewakili pers yang memiliki pemikiran dan ideologi yang berbeda, termasuk tentang kemandirian ekonomi, fokus isu pembahasan artikel.

“Pemikiran Nasionalisme H. Rais Abdoerrachman” adalah telaah Lisyawati Nurcahyani atas beberapa artikel karya H. Rais Abdoerrachman. Nurcahyani berfokus pada perkembangan pemikiran H. Rais Abdoerrachman sepanjang kiprahnya di dunia jurnalistik. Dimulai dengan penggambaran latar sosio-kultural tokoh, Nurcahyani mengajukan gerak pemikiran H. Rais dalam pengaruh berbagai arus ideologi yang tengah berkembang di Kalimantan Barat saat itu.

“Indonesia dalam Penciptaan Nasionalisme Borneo: Rasa Kebangsaan Persatoean Anak Borneo dalam Majalah *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda* di Kalimantan Barat Tahun 1940” adalah telaah Dana Listiana atas dua media dari sebuah organisasi kebangsaan yang berdiri di akhir masa kolonial. Berfokus pada gagasan dari organisasi yang dalam sejarah lokal dikenal sebagai bentukan Pemerintah Kolonial, Listiana mendekati gagasan demi gagasan yang mengemuka dengan memperhatikan konteks historis dan kelembagaan dari organisasi serta aktor-aktor yang berperan dalam struktur redaksi.

Penemuan gagasan-gagasan yang mewacanakan nasionalisme tersebut diharapkan dapat berkontribusi memberi pemahaman multikultur generasi penerus bangsa. Dengan menyuguhkan realitas masyarakat di berbagai daerah, narasi sejarah nasional tidak lagi seperti istilah Niels Mulder sebagaimana yang dikutip Thung Ju Lan sebagai “anak yatim piatu yang buntung” karena narasinya tidak memuat dinamika yang menghubungkan masa sekarang dan masa lalu (Thung, 2005: 767).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 2001. *Nasionalisme & Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Anderson, Benedict. 1999. "Indonesian Nationalism Today and in the Future," dalam *Indonesia*, No. 67, hlm. 1-11.
- _____. 2008. *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press-Pustaka Pelajar.
- Fakih, Farabi. 2014. "Akar-Akar Kanan daripada Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesenjariannya" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11, No. 1, hlm. 37-50.
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kohn, Hans. 1984. *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Pembangunan-Erlangga.
- Listiana, Dana, Karel Juniardi, dan Raistiwar Pratama. 2014. *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak-Kepel Press.
- Listiana, Dana. 2017. "Sistem *Pacht* dan Perluasan Negara Kolonial di Pontianak 1819-1909". Tesis. Yogyakarta: FIB UGM.
- Miert, Hans van. 2003. *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Jakarta: Pustaka Utan Kayu.
- Niwandhono, Pradipto. 2011. *Yang Ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Djaman Baroe.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (ed.). 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Buku Obor-KITLV Jakarta.
- Thung Ju Lan. 2005. "Pelajaran Sejarah di Indonesia: Anak Yatim Piatu yang Buntung," dalam *Sejarah & Dialog Peradaban*. Jakarta: LIPI Press.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB 1

Tiga Warna Kemandirian Ekonomi: Akar-Akar Nasionalisme dalam Pers Cetak Kalimantan Barat Tahun 1920-an

Any Rahmayani

Bagian pendahuluan buku ini sangat jelas menjadikan realitas kebangsaan Indonesia, terutama fenomena konstruksi identitas lokal yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini, sebagai media refleksi historis untuk melihat kembali pembentukan nasionalisme Indonesia. Bagian tersebut juga menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia pada kenyataannya dibangun dari nasionalisme-nasionalisme kedaerahan dan dilakukan secara bertahap. Adapun latar belakang serta proses untuk mencapainya merupakan sesuatu yang tipikal, unik, dan berbeda satu dengan yang lain. Di sisi lain, nasionalisme yang dibangun kala itu merupakan sebuah usaha menghimpun daerah-daerah jajahan Belanda untuk terikat menjadi satu masyarakat baru yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia dibangun bukan saja sebagai usaha bersatu melawan kolonisasi, melainkan lebih dari itu, gagasan nasionalisme yang dikembangkan kala itu bertujuan untuk membuat formula baru yang lain dari tatanan yang ada pada masyarakat sebelumnya. Oleh karenanya, dalam bagian ini, penulis akan melihat segi kemandirian ekonomi sebagai sebuah bagian dari proses memberi warna pada masyarakat baru tersebut. Warna kemandirian ekonomi di wilayah tersebut akan dilihat dalam konteks ide/gagasan yang tercetus seiring perkembangan pers di Kalimantan Barat.

Mengapa kemandirian ekonomi dipilih untuk melihat akar-akar nasionalisme di Kalimantan Barat? Secara historis, komitmen untuk

melaksanakan perekonomian nasional sejak sebelum merdeka, sesaat setelah merdeka, hingga saat ini masih terlihat gamang. Kebergantungan Indonesia terhadap negara maupun lembaga-lembaga pemberi pinjaman dianggap sebagai kelanggan ekonomi subordinasi warisan kolonial.¹ Demikian pula dengan program pemerintah yang mengatasnamakan pembangunan yang nyatanya sebagai bentuk kolonialisme baru. Lebih dari itu, kegelisahan pernah diungkapkan ekonom Sri Edi Swasono terkait sikapnya terhadap proses pembangunan Indonesia dalam konteks globalisasi. Ia menyangkan banyak orang mengartikan secara gegabah tentang *the borderless world*, kata kunci dari globalisasi, sebagai dunia tanpa batas-batas yang bersifat nasional. Menurutnya, globalisasi seharusnya mewujudkan dalam interdependensi global, bukan kapitalisme global. Oleh karenanya, nasionalisme Indonesia harus dipertahankan agar Indonesia tidak kembali dieksploitasi sebagai jajahan ekonomi (Tim, 2003: xi-xv).² Kenyataan ini mengingkari cita-cita nasionalisme yang seharusnya mewujudkan pada sebuah sistem ekonomi nasional sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang disusun para pendiri bangsa dengan memuat ideologi nasionalisme.³ Swasono mengingatkan bahwa cita-cita ekonomi kerakyatan tersebut harus diusung dengan sikap nasionalis sebagai bangsa yang mandiri, tidak sekadar antisipatif namun mampu proaktif dan bertanggung jawab sebagai warga dunia dalam menciptakan wujud globalisasi. Latar belakang yang tersampaikan di atas kiranya menjadi latar penting bagi kita untuk menelaah tentang kemandirian ekonomi dalam sebuah perspektif historiografis.

Kalimantan Barat kemudian dipilih untuk menilikinya dalam level mikro. Ide nasionalisme yang muncul di surat kabar-surat kabar tahun 1920-an di Kalimantan Barat tentu tidak terlepas dari tren ide-ide yang sedang tumbuh dan berkembang di hampir seluruh Hindia Belanda pada saat itu. Unsur kemandirian ekonomi dalam ide

- 1 Persoalan ekonomi Indonesia yang menjauh dari cita-cita nasional dilihat Sri Edi Swasono dari mekanisme pasar yang tidak berkeadilan dan tidak merata, keterjebakan Indonesia pada utang luar negeri, dan ketidakpekaan terhadap adanya krisis budaya, yaitu krisis jati diri, krisis harga diri, dan krisis kesadaran nasional (Swasono, 2009: 1–10). Persoalan yang dikemukakan dalam makalah yang disusun Sri Edi Swasono tahun 2009 ini rasanya masih sangat relevan dengan kondisi yang terjadi sekarang, 10 tahun kemudian.
- 2 Hal ini disampaikan pada pengantarnya dalam buku *Anak Bangsa Menggugat. Nasionalisme, kemandirian dan Kewirausahaan*.
- 3 Beserta seluruh ayat di dalamnya, baik 3 ayat pertama maupun 2 ayat tambahan yang ditetapkan MPR pada tahun 2002.

tersebut pada periode ini menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat beberapa hal berikut ini.

Pertama, penciptaan *nation building* dan *character building* pada awal abad ke-20 selalu terkait dengan kemandirian sebagai salah satu unsur pokok yang melatarbelakanginya. Soekarno selalu mendengar-dengarkan bahwa kemandirian ekonomi adalah hal pokok yang harus dimiliki Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno memulai program yang disebutnya sebagai Berdikari Ekonomi. Sejatinya, gagasan ini adalah sebuah gagasan yang telah lama diperjuangkannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurutnya, nasionalisme Indonesia adalah sosio-nasionalisme yang merupakan nasionalisme yang berperikemanusiaan dan terwujud dalam nasionalisme politik dan ekonomi. Dengan sosio-nasionalisme maka sosio-demokrasi akan timbul. Sosio-demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.⁴

Tentang nasionalisme itu sendiri, dilacak Dhont dengan melihat mentalitas dalam perumusan nasionalisme di tahun 1920-an. Ia melihatnya dari pertumbuhan tiga organisasi, yaitu Perhimpunan Indonesia (PI), Indonesische Studieclub, dan Algemeene Studieclub. Ia melihat bahwa beberapa unsur dalam penciptaan *nation building* melibatkan lima unsur konsep nasionalisme Indonesia, yaitu *self-determination*, *self-government*, non-kooperasi, *self-help*, dan kemauan bersama. Dhont menyebut bahwa iklim nasionalisme di Indonesia pada masa itu terkait dengan empat unsur pokok yang melatarbelakanginya, yaitu proses industrialisasi dan modernisasi, perkembangan pendidikan Barat⁵; krisis sosial dalam elite lama; revolusi politik serta pengaruh internasional (Dhont, 2005: 15–27). Modernisasi di bidang pendidikan meningkatkan peluang pemuda bumiputra untuk mendapatkan pendidikan dan dari sinilah kesadaran akan gagasan nasionalisme dimulai. Dhont semakin mendalami mentalitas kelompok tersebut dengan melihat perbedaan-perbedaan ideologi dan aktivitas sosial dan politik mereka.

Hal kedua adalah tentang periode 1920-an sebagai periode penting dalam perkembangan nasionalisme Indonesia. Dengan unsur-unsur

4 Tulisan Soekarno dalam *Fikiran Ra'jat* 1932 yang dikutip dalam Rahardjo dan WK Herdianto (ed.). 2001. *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*. Jakarta: Grasindo.

5 Ide nasionalisme disebutkan Budiawan sebagai konsekuensi yang tidak dikehendaki dari usaha pengenalan pendidikan modern oleh rezim kolonial di tanah jajahan (Budiawan, 2017: 45).

tersebut, Dhont menganggap bahwa konsep yang dibangun oleh kelompok 1920-an lebih “Indonesia” daripada sebelumnya. Unsur-unsur tersebut didapatkan ketika menguji penyusunan kerangka nasionalisme dengan sebuah pola pikir pribumi. Para cendekiawan yang diteliti Dhont menyerap ide nasionalisme dari nasionalis Barat dan menerapkannya dengan proses adaptasi dengan konsep nasionalisme Indonesia yang berasal dari konsep nasionalisme Indis dari *Indische Partij*. Fenomena munculnya kelompok-kelompok studi pada tahun 1920-an pun dilihat Dhont sebagai sebuah reaksi atas ketidakmampuan partai-partai sebelumnya merumuskan kerangka konsep nasionalisme Indonesia. Djoko Suryo, dalam pengantarnya pada buku karya Frank Dhont ini, menyatakan bahwa kesatuan Indonesia yang dinyatakan dalam konsep satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa merupakan satu modal sosial Indonesia dalam menyatakan identitas dan jati diri untuk pertama kalinya. Aktualisasi konsep nasionalisme tersebut dianggap sebagai sebuah konsep nasionalisme yang lebih jelas daripada periode sebelumnya (Djoko Suryo dalam Dhont, 2005: viii). Studi Dhont yang melihat pentingnya periode 1920-an ini juga menggiring penulis untuk menempatkan kajian dalam periode temporal 1920-an, dalam hal ini surat kabar-surat kabar lokal Kalimantan Barat menunjukkan gejala-gejala nasionalisme yang identik dengan ide nasionalisme yang dikembangkan pada tahun-tahun tersebut. Ide kemandirian ekonomi sebagai bagian dari akar gagasan nasionalisme tersebar dan berkembang di wilayah Kalimantan Barat seiring dengan pertumbuhan persuratkabaran di wilayah ini.

Dana Listiana dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa tumbuh dan berkembangnya ide-ide pemikiran dalam persuratkabaran di Kalimantan Barat tidak dapat dipisahkan dari organisasi dan media massa. Oleh karenanya, ia membagi periode perkembangan pers cetak di Kalimantan Barat dari awal munculnya hingga akhir masa kolonial menjadi dua bagian. Fase pertama adalah 1919–1927. Berita dan artikel atas persoalan sosial masyarakat didominasi oleh kritik, yang bahkan disampaikan dengan provokatif. Tidak mengherankan, jika melihat surat kabar-surat kabar pada saat itu kebanyakan dipengaruhi oleh ide sosialisme dan komunisme yang antikolonialisme dan kapitalisme. Adapun fase kedua 1927–1941 yang menunjukkan bentuk yang berbeda dengan fase pertama. Disebutkan bahwa fase ini menunjukkan dominasi pers yang memuat

ide nasionalisme dalam konteks Borneo ataupun Borneo Barat. Jika fase pertama disampaikan dengan lebih radikal maka pada fase ini pemikiran intelektual dianggap tersampaikan lebih santun, bahkan beberapa menjadi media sosialisasi program-program pemerintah kolonial. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh ketatnya pengawasan pemerintah setelah peristiwa pembuangan aktivis pergerakan yang sekaligus tokoh-tokoh pers Kalimantan Barat ke Digul pada 1927. Dengan demikian, menarik jika kajian tentang ide kemandirian ekonomi mengambil lingkup temporal 1920-an sehingga mampu memperlihatkan dinamika ide tersebut dalam dua periode perkembangan pers Kalimantan Barat tersebut.⁶

Selanjutnya, apakah kemudian ide-ide kemandirian ekonomi yang akan disampaikan selanjutnya memiliki kaitan dengan corak-corak nasionalisme kedaerahan yang telah disebutkan di bagian pendahuluan buku ini? Dengan tujuan memikirkan ulang bentuk nasionalisme sebagaimana disampaikan dalam pendahuluan buku ini, kajian ini ditekankan untuk memahami bahwa nasionalisme Indonesia dibangun secara bertahap mulai dari munculnya nasionalisme yang bersifat kedaerahan. Bagian ini layak diperbincangkan mengingat dalam beberapa tulisan tentang ide kemandirian ekonomi yang dibahas nanti menempatkan elite lokal sebagai bagian dari ide kemandirian ekonomi tersebut. Apakah kehadiran nasionalisme kedaerahan kemudian berbenturan dengan bentuk nasionalisme yang lebih “nasional” lain? Pertanyaan ini diajukan mengingat nasionalisme kedaerahan acap kali terkait dengan dinamika ekonomi. Noto Soeroto, sebagai seorang nasionalis Jawa, menganggap bahwa hubungan Jawa/Hindia dan Belanda harus dipertahankan namun dengan posisi yang lebih setara.

Jika Noto menganggap feodalisme harus dipertahankan dan kapitalisme dapat dijadikan alat untuk menyejahterakan rakyat dengan melakukan pembagian kerja antara orang Indonesia-Belanda (dan Tionghoa dan lainnya) maka berbeda dengan Tjipto Mangunkusumo yang mendobrak pemikiran nasionalis Jawa tersebut dengan pisau Marxismenya (Fakih, 2014: 45–47). Dalam pandangan Marxisme, feodalisme dan kapitalisme merupakan akar dari kolonialisme. Menurutnya, perubahan sejarah terletak pada suprastruktur logika ekonomi yang menaungi masyarakatnya. Ia

⁶ Setidaknya dalam lingkup fase pertama sampai awal fase kedua.

memberi contoh Gerakan Samin sebagai ekspresi modern yang menolak hak milik individual dan pajak. Jauh sebelumnya, Takashi Shiraishi pernah meninjau debat konsep nasionalisme yang berbeda antara Tjipto Mangunkusumo dan Soetatmo Soerjokoesoemo. Soetatmo sangat menekankan nasionalisme Jawa dengan ideologi membangun kembali budaya Jawa dan hubungan kawula-gusti. Menurutny, kehadiran elite diperlukan untuk membina rakyat. Tjipto mendebat pendapat tersebut dengan menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi Barat yang lebih maju. Dengan demikian, muncullah pergerakan terhadap penindasan yang dilakukan Belanda yang sekaligus melawan priayi feodal (Shiraishi, 1986: 185-186). Berbeda lagi dengan Soekarno yang tidak sependapat dengan perjuangan kelas sebagaimana yang dianut Tjipto. Untuknya, seorang nasionalis harus mementingkan perjuangan nasional, perjuangan nasionalisme daripada sekadar perjuangan kelas (Rahardjo dan WK Herdianto (*ed.*), 2001: 57).

Hal-hal tersebut menjadi latar belakang yang menarik untuk mendalami ide kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Untuk itu, penulis memilih beberapa surat kabar lokal yang tumbuh di Kalimantan Barat di tahun 1920-an untuk melihat hal ini. Tujuannya adalah melihat apakah gejala-gejala semacam yang telah disampaikan tersebut terlihat atau malah kelompok di Kalimantan Barat memiliki gejala yang lain bentuknya? Mengingat bahwa gejala nasionalisme pada tahun 1920-an yang merupakan akar dari nasionalisme yang kemudian bertumbuh besar pada tahun 1940-an. Untuk tujuan tersebut maka penulis melihat tiga surat kabar di tahun 1920-an yang dianggap dapat mewakili media yang menumbuhkan bentuk akar yang berbeda dari nasionalisme, yaitu:

1. *Warta Borneo*,
2. *Sinar Borneo*, dan
3. *Oetoesan Borneo*.

Ketiganya akan mewakili pers yang memiliki pemikiran dan ideologi yang berbeda, termasuk tentang kemandirian ekonomi. Keputusan untuk menelaah gagasan nasionalisme dari tiga surat kabar ini, tidak bermaksud untuk membandingkan gagasannya namun lebih pada melihat dan memetakan wujud embrio dari nasionalisme yang muncul pada awal abad ke-20. Lebih dari itu,

pertimbangan ini juga didasarkan pada beberapa hal berikut. Selain dapat dilihat perubahan gagasan berdasarkan ideologi surat kabar, beberapa surat kabar ini juga berkembang dalam dua periode pers yang berbeda. Pada tahun 1927 terjadi perubahan penting ketika tokoh-tokoh pers yang juga merupakan tokoh-tokoh pergerakan dianggap berbahaya dan dibuang ke Boven Digul. Mulai tahun ini, perkembangan pers lebih menunjukkan sikap kehati-hatian, baik dari gaya penulisan, penyampaian pemikiran intelektual, dan ide nasionalisme yang disampaikan dalam konteks Borneo atau Borneo Barat (Listiana, 2014: 118).

A. Surat Kabar Kalimantan Barat pada 1920-an

Angin segar pada awal abad ke-20 yang membawa gagasan kemerdekaan sampailah ke Hindia Belanda melalui berita-berita mengenai gerakan nasionalisme di belahan dunia yang lain. Kebutuhan akan organisasi yang bergerak mengarah pada cita-cita tersebut dirasa semakin besar. Pemimpin organisasi merasa perlu untuk menyebarkan suara, ide, dan cita-cita mereka. Tidak mengherankan jika pers, dalam hal ini media cetak, mulai berkembang pesat. Demikian pula surat kabar di Kalimantan Barat pada periode awal.

Surat kabar *Borneo Barat Bergerak* muncul pada tahun 1919–1920. Surat kabar ini diinisiasi oleh Dachlan, seorang *inlander onderwijs H.I.S.*, dengan mengusung moto “radja alim radja disembah, radja dhalim radja disangah”. Percetakan dilakukan di Betawi karena pada saat itu belum terdapat usaha percetakan di Pontianak (*Red*, 10 Desember 1927: 1). Sebuah sumber menyatakan bahwa surat kabar ini didanai oleh sebuah perusahaan kayu Jepang, Fukuyana (Tim, 1991: 78).⁷ Selanjutnya, muncul *Halilintar* tumbuh pada tahun 1923 yang berhaluan komunis di bawah asuhan S.M. Anwar. Dalam waktu singkat *Halilintar* pun redup. Pemerasan terhadap masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan di surat kabar tersebut yang dilakukan oleh S.M. Anwar menjadi isu yang menyertai matinya surat kabar ini (Isa, 20 Oktober 1923). Sepeninggal S.M. Anwar, surat kabar ini

7 Terdapat dugaan bahwa pendanaan ini terkait dengan aktivitas spionase Jepang sebelum pendudukannya terhadap Hindia Belanda. Namun, keterangan yang mendukung informasi ini belum penulis dapatkan secara jelas. Terlepas dari dugaan tersebut, kehadiran perusahaan-perusahaan Jepang saat itu di Hindia Belanda dapat dijelaskan sebagai bagian dari ekspansi ekonomi dan modernisasi Jepang yang sedang digalakkan pada periode tersebut (Dick, 1989).

sempat muncul dinakhodai oleh seorang bernama T.K. Ong Jr. Tidak banyak hal yang diketahui tentang kelanjutan surat kabar ini kecuali penggantian nama menjadi *Halilintar Hindia* dan diterbitkan oleh Sarekat Rakyat (*Red*, 10 Desember 1927: 1). Saidi Boejang Gadang Isa atau yang dikenal dengan S.B.G. Isa kemudian melanjutkan cita-cita surat kabar ini dengan mendirikan *Soeara Borneo* pada tahun 1923. Dalam waktu singkat surat kabar ini pun menghilang. Selanjutnya surat kabar *Warta Borneo* yang dipimpin oleh S.B.G. Isa dan Boullie muncul dengan dukungan Drukkerij (percetakan) Hoa Kiaoe. Kritik terhadap *belasting* dan *heerendients* menjadi alat utama surat kabar ini untuk menentang kapitalisme. Sebagaimana pendahulunya, koran “merah” ini pun hanya seumur jagung. Namun, redaktornya Boullie bersikeras untuk membuat surat kabar sejenis dengan mendirikan surat kabar *Berani*. *Berani* adalah sebuah surat kabar beraliran kiri yang secara terang-terangan dan radikal menyerang pemerintah kolonial dan pengikutnya yang dianggap sebagai representasi dari kolonialisme dan kapitalisme. Hal ini terlihat dari moto “barang siapa yang benci kita, ialah musuh kita”. Terbit tidak lebih dari satu tahun (1924–1925), surat kabar ini menyuarakan kritik-kritik tajam dan keberpihakan terhadap rakyat yang tecermin dalam setiap artikel dan berita-beritanya. Propaganda ideologi yang dianut dilakukan di surat kabar ini dengan menyajikannya sebagai solusi dari keseluruhan permasalahan yang dikritik surat kabar ini. Bentuk kemandirian yang ditawarkan dalam surat kabar ini bertujuan menggerakkan masyarakat untuk bereaksi keras atas bentuk kapitalisme dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme. Sebagaimana *Warta Borneo*, *Berani* juga melakukan kritik terhadap pajak dan *heerendienst*. Bahkan, *Berani* terlihat lebih tajam melakukan kritik melalui sindiran-sindiran. Kritiknya lebih pada infrastruktur perhubungan. Namun lagi-lagi, surat kabar ini tidak berlangsung lama. Konon, terjadi konflik antara “merah” dan “hijau” yang membuat surat kabar ini tidak berkembang dan akhirnya mundur. Jumlah surat kabar berumur pendek bertambah dengan munculnya sebuah surat kabar bernama *Tionghoa* yang kabarnya hanya berusia tiga bulan.⁸

Presbreidel yang dilakukan pada beberapa surat kabar tersebut bukanlah hal yang baru pada dunia persuratkabaran di Hindia

8 Penulis belum mendapatkan keterangan lain tentang surat kabar ini selain dari artikel dalam surat kabar *Oetoesan Borneo* 10 Desember 1927.

Belanda. Jauh sebelumnya, pemerintah negeri Belanda dan *De Heeren Zeventien* melarang penerbitan surat kabar di Batavia dengan alasan bahwa berita perdagangan yang diterbitkan tidak boleh jatuh ke tangan saingan VOC (Smith, 1986: 51). Peraturan tentang kegiatan penerbitan dan penyensoran mulai diatur oleh Daendels pada 1809. Perdebatan antara pemerintah dan kaum liberal dalam hal kebebasan pers melahirkan sebuah pasal tentang pers dalam *Regering Reglement 1854* yang berlanjut pada munculnya *Drukpersreglement* (Undang-Undang Penerbitan Pers) 1856 yang mewajibkan penerbit dan pencetak menyerahkan satu salinan tulisan sebelum diterbitkan kepada pejabat. Ketatnya peraturan ini mulai melonggar sejak dihapusnya beberapa pasal termasuk tentang sensor pada tahun 1906 (Smith, 1986: 55–57). Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pada tahun-tahun selanjutnya artikel-artikel dalam surat kabar mulai terlihat merdeka. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama. *Persbreidel* surat kabar berhaluan keras diberlakukan lagi dan nyatanya mengakibatkan surat kabar-surat kabar tersebut mati muda. Kondisi tersebut, pengembangan keterampilan menulis, serta redaktur surat kabar yang tidak selalu dipimpin pimpinan partai ataupun pergerakan sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya menjadi faktor dalam perubahan gaya penulisan di surat kabar lokal Kalimantan Barat (Listiana, 2014: 72).

Selanjutnya, Surat Kabar *Sinar Borneo* lahir pada 1926. Terlihat bahwa surat kabar ini beraliansi pada pemerintah kolonial dan kekuasaan feodal lokal. Walaupun slogan surat kabar ini ingin menunjukkan sikap netral, kecenderungan arah sikap ke kekuasaan feodal yang didukung pemerintah yang terlihat melalui artikel dan beritanya tidak dapat dimungkiri.

Berbeda dengan corak surat kabar yang jelas-jelas memiliki corak yang “merah”, *Kapoeas Bode* lahir dengan menggunakan bahasa Belanda dan Melayu. Surat kabar yang berdiri tahun 1927 ini dipimpin oleh U.C. Rozet. Namun surat kabar ini hanya bertahan hingga 6 nomor saja (*Red*, 10 Desember 1927: 1). Selanjutnya, muncul *Oetoesan Borneo* yang sengaja dipilih dalam tulisan ini untuk mewakili independensi pers kala itu. Selain itu, *Oetoesan Borneo* juga dipilih untuk melihat bagaimana corak pers lokal setelah para aktivis pergerakan radikal yang juga merupakan redaktur dari beberapa surat kabar sebelumnya, termasuk *Warta Borneo* dan

Berani, ditangkap dan dibuang ke Boven Digul oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927.⁹ Berkaca pada kegagalan surat kabar *Kapoeas Bode*, surat kabar yang memperkenalkan diri sebagai surat kabar netral, *Oetoesan Borneo* didirikan atas asas kemerdekaan dan kemandirian. Setelah mencoba bernegosiasi dengan beberapa percetakan maka terpilihlah *Drukkerij Phin Min* sebagai perusahaan yang akan mencetak surat kabar tersebut. Dengan terbit dua kali seminggu, *Oetoesan Borneo* mendeklarasikan dirinya sebagai surat kabar yang netral, menerima masukan dan saran, serta bantuan (*Red*, 10 Desember 1927: 1). Hal perekonomian bumiputra, menjadi isu penting yang ditawarkan oleh *Oetoesan Borneo* untuk menarik perhatian pembacanya. Dengan mengambil contoh wilayah-wilayah lain yang sejahtera, surat kabar ini mengklaim bahwa kemakmuran di wilayah lain adalah berkat dari bantuan pers yang memberi ruang iklan (*advertentie*) bagi saudagar-saudagar bumiputra. Oleh karena manfaatnya yang penting dan kemandiriannya ini maka surat kabar ini meminta pemerintah untuk tidak menghalangi aktivitas jurnalistiknya (Penerbit, 10 Desember 1927: 1).

B. *Warta Borneo*: Mandiri dari Predatori Kolonial

Warta Borneo bersama *Berani* adalah dua surat kabar yang diasuh oleh redaktur yang sama yaitu Boullie. Dari berbagai tulisannya, Boullie jelas mendapatkan pengaruh sosialisme. Slogan *Warta Borneo* adalah “satu buat semua, semua buat satu”. Untuk memahami cara surat kabar ini menawarkan kemandirian pada penduduk Kalimantan Barat maka kita memulai dengan berkembangnya organisasi beraliran sosialis kala itu. Penerbitan surat kabar-surat kabar tersebut berjalan seiring dengan kegiatan propaganda yang dilakukan Sarekat Rakyat (Soedarto, 1978/1979: 25).¹⁰ Sarekat Rakyat didirikan oleh tokoh-tokoh muda Sarekat Islam seperti Gusti Sulung Lelanang,

9 Terdapat 10 tokoh lokal yang dibuang ke Digul, yaitu H. Rais Abdurrahman, Gusti Hamzah, Djaranding, Gusti Sulung Lelanang, Gusti Situm Mahmud, Gusti Djohan Idrus, Achmad Sood, Achmad Marjuki, Mohammad Hambal, Mohammad Sohor serta beberapa tokoh pers yang sering menulis di surat kabar yang kritis dan nonkooperatif, seperti *Berani*, *Halilintar*, dan *Borneo Barat Bergerak* (Listiana, 2014: 69–71).

10 Buku yang dikutip ini menyatakan bahwa tahun 1925 muncul berkala *Berani* yang mencerminkan haluan politik yang dianut oleh Sarekat Rakyat, demikian pula berkala *Sinar Borneo* (1926). Tampaknya terdapat kesalahan penulisan nama surat kabar pada bagian ini. Sepertinya yang dimaksud penulis buku tersebut adalah *Warta Borneo*, bukan *Sinar Borneo*. Asumsi ini berdasar pada penulisan artikel dan berita di surat kabar *Sinar Borneo* tidak mencerminkan ideologi yang dianut Sarekat Rakyat. *Sinar Borneo* ditulis dengan kecenderungan kooperatif dan mendukung kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah kolonial.

Gusti Mahmud, Haji Rais Abdoerrachman, Muhammad Hambal dan lainnya yang mendapatkan ide-ide sosialisme ala Sneevliet. Sejatinnya, Sarekat Islam yang hadir lebih awal di Ngabang pada 1914 berkembang pesat dengan membawa ide kemandirian ekonomi dengan gagasan pemajuan perdagangan dan pemajuan agama Islam sebagai sebagai salah satu tujuannya. Dengan ide ini, Sarekat Islam di Kalimantan Barat bercabang di Singkawang dan Pontianak dengan dukungan ulama, guru agama, serta pedagang (Soedarto, 1978/1979: 27). Kondisi ekonomi dan sosial Kalimantan Barat yang memburuk menggiring para tokoh muda Sarekat Islam mempelajari ide-ide sosialisme ala Sneevliet. Sebuah buletin bernama *Menyala* sempat terbit sebagai media propaganda kelompok ini (Soedarto, 1978/1979: 40). Lebih dari itu, yang dilakukan oleh para pemuda ini sebenarnya merupakan bagian dari yang disebut Sartono Kartodirdjo sebagai proses radikalisasi sebagai reaksi terhadap politik kolonial yang semakin bertentangan dengan politik etis. Pada periode ini, beberapa organisasi termasuk Sarekat Islam dan Budi Utomo bergabung dalam *Radicale Concentratie*. Semangat pergerakan yang radikal ini mendapatkan dorongan dari unsur-unsur sosialis seperti Sneevliet. Namun pada perkembangannya, unsur-unsur ini memunculkan pergeseran di tubuh organisasi-organisasi tersebut sebagaimana yang terjadi pada Sarekat Islam yang memiliki semangat religius menolak bahaya komunisme (Kartodirdjo, 2014: 143-146). Demikianlah Sarekat Rakyat terbentuk dan secara cepat berpengaruh di sebagian besar Hindia, termasuk Kalimantan Barat.

Warta Borneo sebagai organ Sarekat Rakyat di Kalimantan Barat, menganggap bahwa persatuan adalah usaha keluar dari kapitalisme yang selama ini menguntungkan pemerintah kolonial dan pemodal besar serta elite-elite bumiputra yang berpengaruh. *Warta Borneo* dapat dianggap sebagai surat kabar yang mewakili surat kabar semasa (*Berani*, *Halilintar*) dalam menjadikan isu *belasting*, *heerendients* dan kapitalisme sebagai pisau kritiknya terhadap kolonialisme. *Belasting* atau pajak merupakan bagian dari sistem fiskal pemerintah kolonial Belanda. Henry van Vogel, residen Borneo Barat 1912-1918, menaikkan sejumlah pajak dan pungutan-pungutan lain untuk menggantikan pendapatan dari upeti yang telah dihapuskan (Heidhues, 2008: 188). Kebijakan ini disambut dengan beberapa reaksi perlawanan. Perlawanan lokal sepanjang

dua dekade awal abad ke-20 tercatat sebagai penolakan atas pajak, seperti Perang Kenceng 1912–1914, Perang Tumbang Titi di Ketapang (1914), Pemberontakan Apang Semangai di Sintang (1914–1918) serta Perang Belangkait di Simpang.

Di ibu kota karesidenan, yang sedang gencar dibangun infrastruktur perhubungan, surat kabar ini menangkap permasalahan pajak yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dengan cukup mudah. Potensi pajak terkait dengan hal tersebut cukup menguntungkan pemerintah kolonial. Pajak kendaraan misalnya. Berikut beberapa tulisan menyoroiti tentang hal ini.

“Tetapi di Pontianak, ada sebaliknya, ra’iat tidak mardika berdjalan leloear kota dengan kendaraan auto, biarpoe ra’iyat itoe akan tjari penghidoepan boeat pembajar padjak dan enz. enz-nja. Semoea pendjoeroe diloear kota dipalang dan dikoentji, kalau ra’iat ada keperluan apa2 maoe pergi Peniti misalnja: Plaatselijfond moesti mintak bajaran pada chuffeur lebih doeloe Auto jang di district Siantan, bertambah lagi menjoesahkan chuffeur karena memboeang banjak tempoh, sebab kalau maoe djalan boeat membajar itoe “oeang djalan auto” moesti hantar poela ke gevangenis lebih koerang 3 paal djaoehnja (*Warta Borneo*, 15 November 1924).

“... sekarang kalau orang-orang dagang pake tongkang dari Peniti maoe ke Pontianak atau maoe beli barang ke Pontianak, mesti lebih doeloe pergi ke lothaj minta konsen dan moesti bajar f. 0,50 satu tongkang. Keadaan itu memang semoea orang merasa keberatan Dalam keadaan zaman ini haroes ra’iat memperotes keadaan-keadaan jang ta’menjenangkan itoe, djangan tinggal diam tjari keroekoenan soepaja gampang menjtjampaikan tjita-tjita” (*Warta Borneo*, 29 November 1924).

Pajak kendaraan (*belasting op rijtuigen*) merupakan salah satu dari sekian banyak pajak yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Sebelum abad ke-20, pajak ini sebenarnya hanya diberlakukan untuk pribumi Jawa yang memiliki beberapa gerobak ataupun wagon yang juga menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan bisnis.¹¹

Heerendienst adalah pelayanan yang tidak dibayar untuk semua jenis proyek dan pekerjaan yang mengerahkan tenaga rakyat (Fasseur dalam Muhsin, 2017: 84). Kerja ini bersifat mutlak sebagai sebuah kewajiban pelayanan bagi tuannya, baik pemerintah kolonial maupun penguasa lokal atau pimpinan tanpa batasan yang

11 Pajak ini hanya satu dari sekian banyak pajak yang diwajibkan pemerintah kolonial sebagai sumber pendapatannya. Day menghimpun setidaknya duapuluhan pajak yang diberlakukan di Hindia Belanda, khususnya Jawa dan Madura (Day, 1900: 82–93).

beralasan, “*service due to the lord*” (Day, 1900: 472). Kerja *heerendienst* yang menyimpang dari yang seharusnya menjadi sorotan surat kabar ini. Dalam isu ini, redaksi tidak saja mengkritisi pemerintah kolonial, namun juga elite bumiputra. Kematian seorang Dayak dalam *heerendients* menjadi penguat kritik terhadap kewajiban-kewajiban yang dipaksakan oleh mereka (*Warta Borneo*, 15 November: 2 dan *Warta Borneo*, 29 November 1924: 1).

“Demikian djoega orang-orang *heerendients* jang di bawah perintah Tengkoek A. Hamid Pangeran Soekadana, boekan orang-orang *heerendients* disoeroeh mengerdjakan djalan negeri, malahan tiap-tiap orang *heerendients* diperintahkan menggadakan 2 depa papan, kalau ta’ada tiap-tiap orang moesti bajat f. 2. Nah, soudara-saudara pembatja lihatlah tjaranya pegawai negeri mendjalankan kewadjabannja, hantam keromo sadja, ta’perdoeli jang boekan kewadjaban ra’iat (L. & Dj., 29 November 1924: 4).

Penduduk Tionghoa di wilayah ini memiliki pengalaman tersendiri mengenai kerja *heerendients*. Vogel, sejak awal kepemimpinannya, terus membidik penduduk Tionghoa sebagai sasaran wajib pajak dan kerja paksa. Program peningkatan infrastruktur jalan darat memaksa penduduk Tionghoa dari wilayah bekas kongsi dan sekitarnya untuk menjadi pekerja. Kerja paksa yang sangat berat, beban pajak yang bertambah, sistem *pacht* jalan, dan kebijakan permukiman yang lebih ketat memicu terjadinya pemberontakan Tionghoa 1912–1914 (Heidhues, 2008: 188–194). Demikian pula dengan pajak. Sejak abad ke-19, orang Tionghoa menjadi objek pajak yang utama di Pontianak dan sekitarnya.¹² Berbagai pajak baik langsung maupun tidak langsung dari orang Tionghoa memiliki kontribusi besar dalam pendapatan kas pemerintah kolonial di wilayah ini. Aksi-aksi perlawanan terhadap pajak pun sebenarnya sering terjadi. Dua isu di atas terus-menerus digunakan surat kabar ini untuk membuka mata rakyat tentang penindasan yang menurut redaksi kurang disadari oleh penduduk.

Sebuah artikel di penghujung November 1924 mengkaitkan masalah ini dengan kapitalisme yang mereka sebut sebagai “zaman modal.” Kritik-kritik semacam ini dikatakan Smith sebagai kritik para nasionalis Indonesia permulaan yang lebih pada usaha mengobarkan semangat dan bersifat emosional (Smith, 1986: 69).

¹² Tentang hal ini, secara spesifik Dana Listiana dalam tesisnya mengkaji *pacht* sebagai bentuk pajak tidak langsung berikut pelaksanaan dan pengaruhnya terhadap orang Tionghoa di Pontianak (Listiana, 2017).

Perubahan baru yang dibawa oleh para pemodal di Kalimantan Barat melalui liberalisasi ekonomi nyatanya disikapi secara berbeda-beda. Termasuk surat kabar ini dengan ideologi yang dibawanya. Demi memperlancar tahap ekonomi baru ini, teknologi transportasi mulai lancar digalakkan melalui Residen van Vogel yang diangkat pada tahun 1912. Sebuah laporan tentang persiapan pembuatan jalur kereta api yang memuat deskripsi wilayah ini secara lengkap selesai disiapkan pada tahun 1919.¹³ Usaha pemerintah kolonial dalam mewujudkan integrasi ekonomi melalui perbaikan infrastruktur perhubungan baik jalan darat dan sungai terlihat begitu masif di periode 1910–1920-an (Rahmayani, 2018: 117–118).

Belum lagi permintaan dunia akan bahan baku karet dan kelapa yang diusahakan Kalimantan Barat nyatanya menarik wilayah ini semakin dekat dengan sistem kapitalisme. Walaupun pemerintah kolonial mulai mengurangi aktivitas ekonomi di wilayah koloninya secara langsung, keterlibatan pemerintah kolonial dan elite lokal dalam kebijakan dan pemberian konsesi atas lahan perkebunan kepada pemodal swasta tentu memberi pengaruh yang berarti. Dalam praktiknya, status perkebunan dibagi menjadi dua yaitu *landbouwconsessies (lbc.)* dan *erfpachtsperceelen (e.p.)*. Perkebunan dengan status *lbc.* berada di wilayah swapraja (*zelfbesturend lanschap*) yang artinya konsesi diberikan oleh penguasa lokal, sedangkan perkebunan dengan status *e.p.* berada di wilayah yang diawasi langsung oleh pemerintah kolonial (Sandick & Marle, 1919: 170). Sebagian besar perkebunan yang diperoleh melalui konsesi dikelola oleh pemodal Eropa ataupun Tionghoa serta sedikit pemodal Jepang. Belum lagi, menjamurnya perusahaan-perusahaan Eropa yang membangun agennya di wilayah ini.

Sebelum surat kabar ini mati, sebuah persatuan ditawarkan sebagai solusi untuk merdeka dari kungkungan kapitalisme dan kolonialisme. Di akhir tulisan, redaksi mencoba menggerakkan penduduk Borneo Barat untuk melepaskan diri dari beban-beban tersebut.

"... Sedang ra'iat itoe memikoel bermatjam-matjam padjak, tapi disini kita njatakan ialah padjak pentjarian dan heerendients. Pemerintah, perloe memakai oeang oentoek mengoeroes pekerdjaan negeri, itoe soedah memangnja, karena di zaman modal ini, sesoeatoe pekerdjaan ta'bisa

¹³ Berupa sebuah laporan, *Verslag eener Spoorwegverkenning in Noordwest-Borneo 1919*.

dilangsoengkan kalau tidak memakai oelang Tetapi dalam zaman modal ini jang makin sehari bertambah sempit, keadaan itoe berkatjau-balau, misalnya di negeri anoe si A jang bertitel koeli membajar f.8 tetapi di negeri yang sama si B yang bertitel koeli djoega membajar padjak f.12, oempamanja, sedang keadaan itoe tidaklah poela mengindahkan keberatan satoe-satoenya Ra'iat yang bekerdja djalan negeri, itoelah dinamakan bekerdja heerendienst dan seoea ra'iat jang tertentoe tidaklah poela akan terlepas dari kewadajiban itoe, ja'ni tiap-tiap ra'iat mengerdjakan heerendienst. Tapi karena desaknja doenia modal ini serta berhoehoeng dengan beberapa hal maka kewadajiban itoe dioekoer poela dengan orang mana jang soeka, dan itoelah dinamakan orang rodi Sehingga di B. Barat ini ra'iat jang mengerdjakan heerendients di B.B berdjeritan, berlarian karena beratnja sehingga ta' pedoeli malam hari disoeroeh djoega mengerdjakan heerendienst Apakah sebab wakil pemerintah Pontianak memintak bajaran pada chuffeur auto itoe, kalu djalan keloea kota Pontianak, sedang shuffeur auto, jang poenja auto, penumpang auto membajar padjak d.l.l. Kalau begitoe apakah artinya ra'iat mengerdjakan heerendienst dan membajar padjak? Dari itoelah insyafah hai saudara ra'iat sekalian, djangan tinggal diam toentoetlah hakmoe, kedjarlah kemerdekaan djangan ajal." (*Warta Borneo*, 29 November 1924: 1)

"Saudara-saudara! Bahwa kita ra'iat dalam negeri haroes dipandang sebagai fundament kekoeatan negeri Di dalam negeri kmodalan (kapitalistische staat) ra'iat yang bermillion-million menangoeng kesengsaraan dan kemiskinan, biarpoen ra'iat berteriak setinggi langit mintak kelonggaran, ta'dipandang sebelah mata, ta'didengarkan sedikit djoega, ta'oebahnja seperti dia mendengar mesin² dalam fabriek-fabriek ... ra'iat itu sekarang terpdang sebagai soeatu perkakas jang akan mengisi kas negeri jang kosong Sebenarnja tanah Indonesia ini ta' kekoerangan makanan, ta'kekoerangan pekerdjaan, tetapi mendjadi sengsara lantaran beratnja padjak d.l.l nja Dari itoe, soedah sewadjabnja sekarang kita ra'iat mentjari persatoean hati mengoempolkan segala kekoeatan boeat melenjapkan kesoeakan-kesoeakan itoe serta mentjapai kemerdekaan ... haroes kita ra'iat bersatoe hati biar agama apa sadja, menjatoekan kekoetan boeat mentjapai kemerdekaan dan persamaan. Toehan Allah mendjadikan manoesia bermatjam agama dan bangsa soedah tentoe soepaja kita tahoe akan artinja persatoean" (*Warta Borneo*, 6 Desember 1924).

Pemikiran tentang persatuan yang diusung surat kabar ini merupakan bagian dari tren ide tentang persatuan yang dimunculkan kembali oleh Suwardi Suryoningrat dalam terbitan *Hindia Poetra* Agustus 1918 yang memberi definisi orang Hindia atau Indonesia adalah orang yang mengakui Hindia atau Indonesia sebagai tanah airnya, tanpa membedakan apakah ia Indonesia totok atau keturunan Tionghoa, Belanda atau Eropa (Utama, 2014: 67). Utama menyatakan bahwa definisi ini pula yang melapisi kemunculan gagasan Indonesia yang lebih modern yaitu Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda (Utama, 2014:

68). Memunculkan ide kemandirian ekonomi dengan bahasa yang radikal memang menjadi ciri surat kabar pada masa ini. Demikianlah sebuah akar nasionalisme terbentuk dan mewujud dari kritik-kritik yang disampaikan. Walaupun surat kabar-surat kabar pada zaman ini berada dalam pengaruh Sarekat Rakyat yang menggunakan pisau Marxisme dalam menyampaikan kritiknya namun sebagaimana Shiraishi sampaikan dalam akhir kajiannya tentang radikalisme tahun 1912–1926 bahwa pandangan historiografis yang memandang nasionalisme Indonesia dengan membaginya berdasarkan ideologi dan organisasi menjadi nasionalisme, Islam dan komunisme tidaklah tepat (Shiraishi, 1997: xii & 474). Nasionalisme muncul dalam beragam bentuknya. Lihat bagian terakhir artikel *Warta Borneo* yang saya kutip sebelumnya: “Toehan Allah menjadikan manoesia bermatjam agama dan bangsa soedah tentoe soepaja kita tahoe akan artinja persatoean”

C. *Sinar Borneo*: Mandiri Membutuhkan Kooperasi

Mari kita baca sebuah artikel dari rubrik “Boeah Fikiran” dalam surat kabar *Sinar Borneo* edisi 10 Mei 1926.

“Kalau kita perhatikan keadaan-keadaan pendoedoek di Pontianak dan seloeroehnja (Wester Borneo), waktoe sekarang ini tiada memperhatikan berladang padi hanja semata-mata menanam getah dan kelapa. Tentang pengasilan padi hampir boleh dikatakan sedikit sekali, padahal padi itulah jang menjadi beras. Betoel oewang pendapatan getah dan kelapa boleh dibelikan beras, tetapi kalau kejadian sematjam tahoen 1919 jang laloe njata poela wang itoe tiada bergoena, apalagi kalau sekiranja tiada datang beras dari Siam ta’dapet tiada soesahlah kita pendoedoek Pontianak ini. Ja kalau selamanya harga getah seperti sekarang tetapi kalau tiao lakoe seperti 3 tahoen jang laloe, apalagi pengasilan pendoedoek? Menoeroet fikiran kita ada lebih baik sekali kita bertanam padi dari pada mereboet bertanem getah d.l.l. sebab padi itoelah jang menjegarkan dan menolak bahaja kelaparan. Maksoed kami boekan mentjegah pendoedoek bertanem getah d.l.l. itoe tiada sekali-sekali hanja kita hareplah tanami poela padi karena tanahpoen banjak jang kosong (D.M., 10 Mei 1926: 1).

Redaktur menyarankan sebuah ide kemandirian ekonomi dengan melihat kesempatan bercocok tanam padi di lahan-lahan kosong yang masih banyak tersedia. Mari kita cermati dua artikel selanjutnya yang menguatkan argumen tersebut sebagai bentuk kemandirian ekonomi dalam surat kabar ini.

"Kita pertjaja, kalau pendoedoek radjin bertjoetjoek tanam dan berladang, tadapat tiada dipimpin oleh Pemerintah kita, karena Pemerintah soedah sediakan oentoek bertjoetjoek tanam, berladang dan laen-laen hasil tanah kalau kita tak salah ialah Departemen van Landbouw dan ada poela sekolahnya (Landbouw School) seperti di Bogor" (D.M., 10 Mei 1926: 1).

Tabel Ekspor dan Impor Beras Borneo Barat 1905–1919

Tahun	Impor (dalam 1.000 kg)	Ekspor dari Pemangkat (dalam 1.000 kg)	Keterangan
1905	14.750		(1) Luar Pulau: luar Hindia Belanda
1906	3.727		
1907	11.500		(2) Jawa
1908	11.305	1.924	
1909	12.766	1.564	
1910	12.567	3.106	
1911	19.150	210	
1912	15.704	117	
1913	14.013	1.037	
1914	14.183	889	
1915	17.572 (1)	-	
	26 (2)	30 (2)	
1916	28.915 (1)	-	
	32(2)	19 (2)	
1917	36.090 (1)	-	
	63 (2)	16 (2)	

Sumber: Sandick & Marle, 1919: 143

Pada akhir tulisan ini, redaktur mengingatkan bahwa pemerintah kolonial telah memfasilitasi usaha tersebut melalui *Department van Landbouw* (Kementerian Pertanian).

"Kalau kita ta'salah, dahoeloe, di kota Pontianak ini, beloem ada djalan besar dan djembatan-djembatan alias gertak-gertak seperti sekarang tetapi semendjak doeli toeankoe seri Sultan Pontianak, berdjabat tangan dengan Pandji-Pandji sitiga warna, jaitoe Gouvernement Belanda, maka atas djasa Gouv. didirikan beberapa sekolah-sekolah goena boemi poetera Pontianak beladjar, dan diboetkanlah djalan-djalan besar, goena berdjalan kaki atau berkendaraan, dan diadakan poela gertak-gertak djembatan-djembatan goena kita mendjeberang parit Moedah-moedahan sempornalah dan makmurlah kota Pontianak dan seloeroehnja berkat Seri Sultan Pontianak, seorang jang berhati djoejor dan salehin. Selamatlah. Berkibarlah rood wit en blaue dan lanjoetlah oesianja bertambah tinggilah derajat Seri Sultan Pontianak (Denmas, 10 Mei 1926: 2).

Untuk melihat arah surat kabar ini bergerak maka selanjutnya kita melihat dua contoh yang disebutkan dalam artikel di atas, padi dan infrastruktur. Padi menjadi makanan pokok penduduk Kalimantan. Namun, *booming* karet dan kelapa di awal abad ke-20 menjadikan penanaman padi sebagai bagian dari kegiatan sekunder penduduk. Jika dilihat dari tabel berikut ini, terlihat bahwa angka impor dan ekspor beras sangat tidak seimbang. Sepanjang hampir dua puluh tahun pertama abad ke-20, angka ekspor beras menurun, sedangkan angka impor semakin besar dengan perbandingan yang tidak seimbang. Daerah yang dapat mengekspor beras (dengan jumlah yang tidak signifikan) hanyalah wilayah Pemangkat.

Promosi kemandirian atas padi/beras oleh pemerintah kolonial didasarkan pada keadaan Kalimantan Barat dan Hindia Belanda pada umumnya. Menurut pemerintah, kehidupan sosial ekonomi penduduk Kalimantan bagian barat pada saat itu layak dikhawatirkan. *Booming* karet pada 1924–1927 disikapi sebagian besar penduduk dengan segera. Mereka menyambut peluang tersebut dengan berkebun karet. Pada masa tersebut, kondisi ekonomi penduduk meningkat. Beberapa surat kabar memberitakan tentang peningkatan kepemilikan benda berharga, peluang rekreasi, dan perubahan gaya hidup. Dibandingkan Kalimantan Selatan, penduduk Kalimantan Barat sangat aktif bertanam karet. Hal tersebut yang menjadi salah satu perhatian Touwen dalam menganalisis sebab perusahaan perkebunan karet Eropa lebih berkembang di Kalimantan Selatan daripada di Kalimantan Barat yang telah dipenuhi oleh kebun-kebun karet rakyat. Kebergantungan penduduk terhadap karet saat itu dapat terlihat dari menjamurnya usaha karet rakyat (Touwen, 2001: 62–67). Dengan demikian, perhatian mereka terhadap tanaman pangan pun menurun. Lahan-lahan tanaman pangan dikonversi menjadi lahan karet, kelapa dan tanaman niaga lain.¹⁴ Perhatian pemerintah kolonial terhadap padi di Hindia Belanda pada umumnya tidak lepas juga dari kondisi harga beras yang tinggi selama dua dekade pertama abad ke-20. Perang dan kegagalan panen cukup membuat keadaan pasar beras menjadi kritis (Creutzberg, 1987: 122). Reaksi pemerintah kolonial dalam wujud

14 Menurunnya produksi padi dan naiknya impor beras kerap diungkapkan sebagai akibat dari peningkatan permintaan karet dan kopra dari Kalimantan Barat walaupun kondisi umum yang terjadi di Hindia Belanda terkait dengan beras juga terjadi (Sandick & Marle, 1919: 142; Vleming, 1926: 257; Fernando & Bulbeck, 1992: 259; Heidhues, 2008: 160).

promosi kemandirian atas padi/beras dan mendorong budi daya padi dilakukan segera setelah harga beras melonjak pada harga tertinggi pada 1919 (Touwen, 2001: 249). Demikian pula dengan pelarangan ekspor padi yang pernah diberlakukan di seluruh Hindia Belanda pada tahun-tahun tertentu sepanjang 1911–1920. Kekurangan beras diperkuat dengan adanya epidemi influenza, kegagalan panen dan blokade transportasi laut (Touwen, 2001: 249). Situasi ini setidaknya memberi pemahaman tentang masifnya usaha pemerintah dalam mendorong budi daya padi termasuk dengan propaganda melalui surat kabar, walaupun setelah sekian tahun mereka mengakui bahwa usaha ini tidak mudah.¹⁵

Selanjutnya, kita melihat bahwa surat kabar ini mendukung sifat kooperasi dari Sultan Pontianak yang menjalin kerja sama dengan pemerintah Belanda dalam membangun beberapa infrastruktur sekolah dan jalan raya sebagai sebuah kemajuan yang sangat berguna bagi bumiputra. Artikel berikut ini adalah dua di antara banyak artikel yang mendukung kerja sama dua penguasa tersebut.

"...Soenggoehpoen wang oentoek diboeat pemerintah kita, djalan-djalan besar atau djembatan-djembatan serta sekolah kalau kita ta'salah semoe oeang itu dari kita djoega, tetapi kalau tidak ditolong djalankan oleh kandjeng regering tentoe ta' mendjadi." (Denmas, 10 Mei 1926: 2).

"Kalaoe pendoedoek Pontianak radjin dengan berladang poela, ta'dapat tiada pemerintah kita Gouvernement Belanda, jang maha moerah pada ra'jatnja, bertambah senang karna ra'jatnya radjin, soedah tentu pemerintah boeatkanlah poela perdjalan air goena sawah atau suatu keperloean goena berladang" (S.J. Joesoef, 24 Mei 1926: 2).

Terlebih dahulu kita mesti memahami bahwa *Sinar Borneo* lahir pada periode transisi pers Kalimantan. Periode ini adalah periode kedua perkembangan pers Kalimantan Barat yang mencirikan pers yang menjauh dari kritik-kritik yang radikal. Artikel-artikel tersebut menjadi mudah dipahami sesaat setelah kita melihat logo di halaman pertama yang menggunakan lambang timbangan dan sebuah Undang-Undang Hindia (*Wet Hindia*). Logo ini ingin menyampaikan bahwa redaktur meyakini keadilan dan kesamaan dapat tercapai dengan bertumpu pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah

¹⁵ Residen Kalimantan Barat J. Oberman dalam laporan serah terima jabatannya tahun 1938 menuliskan bahwa tugas yang diberikan pemerintah pusat untuk mempromosikan penanaman tanaman pangan sangat sulit diselesaikan terlebih di saat penduduk lebih tertarik pada harga karet dan kopra relatif tinggi (Touwen, 2001: 259).

Hindia Belanda. Keadaan itu diharapkan juga muncul dalam bidang perekonomian sebagaimana yang ditunjukkan dengan gambar pohon karet dan kelapa di sisi kanan dan kirinya. Kedua tanaman niaga yang sedang diusahakan wilayah tersebut tersebut merupakan produk paling laku di pasaran sehingga pemerintah colonial pun mengambil keuntungan dengan mengatur hampir seluruh regulasi, baik dari penanaman maupun perniagaannya.

Kerja sama yang hangat antara Sultan Pontianak dan pemerintah kolonial yang didukung oleh surat kabar ini melalui artikel-artikelnya menjadi hal yang tidak mengherankan jika kita melihat susunan dewan redaksinya. Syarif Joesoef al Kadrie sebagai kerabat kesultanan Pontianak, turut andil menjadi redaktornya. Demikian pula dengan S. M. Saggaf Ahmad Alkadri sebagai administratornya. Hubungan Kesultanan Pontianak dan pemerintah kolonial sebenarnya telah berlangsung lama. Melalui kontrak-kontrak yang ditandatangani keduanya, secara perlahan-lahan pemerintah kolonial menguasai beberapa bagian penting dari kekuasaan Kesultanan. Hal ini ditegaskan dengan pembagian tata kelola wilayah Pontianak sebagai wilayah otonom (*zelfbestuurlandschap*) dan wilayah pemerintah kolonial Belanda pada 1895 (Listiana, 2017: 58). Walaupun memiliki otonomi khusus untuk mengelola wilayah, mereka harus tetap mengakui pemerintah Hindia Belanda. Wewenang Kerajaan Pontianak semakin terbatas di awal abad ke-20 sejak ditandatanganinya perjanjian 23 Juni 1911 antara Sultan Muhammad Al Kadrie dan pemerintah. Perjanjian ini menyepakati penentuan personalia Kesultanan, pemberlakuan hukum pidana dan perdata serta penggajian seluruh pegawai kesultanan oleh pemerintah Hindia Belanda (Listiana, 2011: 156). Di sisi lain, kedekatannya dengan pemerintah, membuat Sultan Muhammad Al Kadrie dikenal sebagai pelaku modernisasi, baik dalam hal pendidikan, organisasi sosial politik maupun gaya hidup (penggunaan simbol-simbol Eropa dalam pakaian kebesaran).

Mengenai persoalan-persoalan semacam yang diuraikan tersebut, Bambang Purwanto berpendapat bahwa dihidupkannya kembali kekuasaan politik tempatan di akhir abad ke-19 tidak memiliki dampak politik bagi munculnya kesadaran nasionalisme di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu (1) kuatnya tekanan kekuasaan colonial, (2) proses sosio-kultural yaitu pembaratan

dan modernitas, yang membuat para elite lokal lebih mengikuti kekuasaan kolonial dan nilai simboliknya daripada membangkitkan kembali entitas yang ada sebelumnya, (3) kebergantungan sebagian besar elite tempatan secara ekonomi pada pemerintah kolonial sehingga kekuasaan lokal tersebut tidak menjadi inspirasi bagi berkembangnya sebuah kesadaran nasionalisme yang menantang keberadaan Belanda di koloninya (Purwanto, 2019: 24).

Berbeda dengan pemikiran Bambang Purwanto, jauh sebelumnya, Noto Soeroto, seorang ningrat Jawa yang berpaham nasionalis konservatif menganggap bahwa keterbatasan teknis (seperti yang disampaikan dalam dua artikel tersebut) yang dimiliki orang Indonesia dapat diatasi dengan kapitalisme yang dijalankan Belanda yang menurutnya bahkan menjadi cara untuk menyejahterakan rakyat (Fakih, 2014: 46). Menurutinya, pembagian peran kerja spiritual, material, serta teknis antara orang Indonesia dan kelompok lainnya (Belanda, Cina dan lainnya) yang harus diperhatikan untuk mencapai kemakmuran rakyat daripada hanya menolak kapitalisme. Noto walaupun seorang pro-kolonial tetap dianggap sebagai satu tipe nasionalis yang muncul pada awal abad ke-20. Baginya nasionalisme Indonesia merdeka harus menggunakan budaya adiluhung Indonesia (Fakih, 2014: 47)

Tentang kerja sama semacam ini, Fakih menyatakan pada abad ke-19 banyak ide-ide yang muncul atas dasar kebutuhan mendukung berjalannya feodalisme yang menjadi bagian dari pendukung struktur ketatanegaraan Hindia Belanda (Fakih, 2014: 39). Penguatan sistem feodal secara historis dapat dilihat jauh sebelumnya. Raffles pernah mengusahakan reformasi liberal untuk mengangkat kedudukan petani, namun gagal. Kemudian, Raffles digantikan oleh van den Bosch yang mengatur kepemilikan tanah dan kewajiban kepada pemerintah konservatif yang pada akhirnya memperkuat kembali struktur feodal. Walaupun proyek van den Bosch berhenti pada akhir abad ke-19 dan diganti oleh sistem modern, struktur feodal tetap kuat bahkan menguat (Furnivall dalam Fakih, 2014: 39).

D. *Oetoesan Borneo*: Mandiri dan Kesadaran Mental Berbangsa

Sebagai surat kabar yang memperkenalkan diri sebagai surat kabar yang netral maka artikel-artikel dalam surat kabar ini demikian ingin menunjukkan ketidakberpihakannya pada salah satu pihak. Namun terlihat jika redaksi merupakan kelompok yang mendukung cara-cara yang bersifat kooperasi antara rakyat dengan pemerintah kolonial dalam mencapai tujuan nasionalismenya. Kemandirian ekonomi rakyat bumiputra menjadi salah satu ulasan penting dalam surat kabar ini. Akar nasionalisme berupa kemandirian ekonomi ini tecermin dalam beberapa artikel yang secara serius disajikan. Beberapa faktor yang dianggap penting bagi kemandirian ekonomi akan dijelaskan berikut ini.

Beberapa artikel mencoba memetakan faktor tertinggalnya Kalimantan jika disbanding dengan Jawa ataupun Sumatra dalam pencapaian ekonomi. Beberapa hal yang berhasil ditemukan adalah sebagai berikut.

- a) Fokusnya usaha rakyat Kalimantan pada perkebunan karet dan kelapa sehingga mengabaikan dengan usaha lain yang dianggap mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan swasembada pangan yaitu padi (Tjtn, 4 Juli 1928: 1).
- b) Kurangnya sarana perhubungan yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah di seluruh Kalimantan Barat, baik pesisir maupun pedalaman (Tjtn, 4 Juli 1928: 1).
- c) Belum tumbuhnya rasa nasionalisme yang kuat di kalangan rakyat Kalimantan. Seorang penulis menyatakan:

"karena pemoeda-pemoeda kita anak Borneo beloem berapa orang yang mempoenyai kepenoehan hati dalam pergerakan jang bergoena oentoek kemadjoan hidoep bersama-sama goena tanah air dan bangsa kita, soepaja, sama-sama mendjadi satoe bangsa Indonesia jang mempoenyai keinginan hidoep setjara jan teratoer ... apabila toean soeka perhatikan hal itoe maka dari sitoelah nanti gampang toean-toean dapat perbandingkan segala keada'an jang layak diperhatikan goena tanah air dan bangsa kita, se Indonesia ini, terlebih poela Borneo, jang sepatoenja mendjadi kawadajiban pemoeda-pemoeda kita di sini." (M.J., 23 Mei 1928: 2).

Faktor-faktor tersebut kemudian dijadikan dasar dalam mempropagandakan ide persatuan untuk mengejar berbagai ketertinggalan itu. Artikel berjudul "Indonesier Kalimantan Wadajib Mengerti: Satoe Initiatief boeat Menaikkan Economie Nasionalisme (perhatian pada soal kolonitatie oentoek Indonesiers Java)" yang

terbit berturut-turut dalam dua nomor menegaskan empat unsur pemajuan dan kemandirian ekonomi yang disebut sebagai

1. tenaga (sumber daya manusia);
2. kapital (permodalan);
3. kepandaian;
4. perhubungan (transportasi).

Kecenderungan surat kabar ini dalam mendukung pemerintah kolonial ditunjukkan dengan menempatkan wacana kolonisasi pemerintah sebagai unsur sumber daya manusia sebagai bagian paling penting dari keempat unsur yang disebutkan sebelumnya. Inisiatif transmigrasi, yang sering disebut pemerintah kolonial sebagai kolonisasi, untuk meningkatkan perekonomian bumiputra Kalimantan ini sangat jelas terlihat dalam dua nomor artikel berikut ini:

"... Dengan setjara jang kasar kita bisa katakan, bahasa jang perloe sekali boeat naikkan kita economie bangsa jaitoe tenaga, kapitaal, kepandaian, dan lekasnja mendapat perhoeboengan jang tetap dari soeatoe tempatt ke tempat jang lainnja Orang tentoe akan merah kupingnja apabila dia dengar bahasa Kalimantan ada tidak bersemangat sebaliknja poela siapa yang maoe dikatakan bangsa jang tidak maoe dikatakan bangsa jang tidak bersemangat haroes singsing tangan bajoe, perlihatkan itoe tenaga (energie) jang ada, djadi boekannja sebagai orang jang tjoema maoe membantah sadja, dengan zonder keterangan satoe djoega. Demikian djoega tentang koerangnja kepandaian bagi bangsa Kalimantan, boekannja semakin bertambah loeas malahan peilnja makin bertambah merosot ke bawah... Satoe factor lagi jang kita soedah seboetkan tadi ada mengoerangkan madjoenja economie ialah tentangan koerangnja perhoeboengan jang direct dari satoe tempat ketempat jang lainnja." (Tjtn, 21 Juli 1928: 1).

"Kita ada tjoekoep merasa, jang bahasa kita poenja economic bisa diperbaiki dari apa jang sekarang ada ini, tetapi tidak tjoekoep dengan kehendak kita sebagai ra'jat sadja, hanja di sini perloe sekali perbantoean pemerintah. Tetapi apakah jang terlebih penting sekali?? Jang terlebih penting sekali menoeroet doega'an kita, dimana kita soedah kemoekakan djoega tempo hari didalam Bintang Timoer jaitu tentang kolonitatie bangsa Java Indonesiers boeat Kalimantan. ... ini kepindahan boleh dibilang ada berarti baik karena dia poenja tjara penghidoepan tidak begitoe bertoekar, tetapi siap poela jang bisa pikirkan teroetama poela bagi bangsa rendahan jang soedah kehilangan akal, maka dengan lekas sadja mereka terdjerat oleh ikatan contract dengan toean-toean kapitalisten sehingga dengan djalan ini poenale sanctie berachir mengikat dia Oleh sebab Kalimantan jang begitoe sepi begitoe loeas tanahnja, pendeknja sajang benar kalau tinggal seperti sekarang djoega maka kesinilah memandangnja mata kaoem terpeladjar Indonesiers Java, kalau-kalau bisa dengan semoefakat kedoea belah pihaknja boeat pindahkan

sebagian Indonesiers Java kebahagian poeloe Kalimantan. Oemoemnja bisa boeat dipastikan, bahasa bangsa Java soedah lebih doeloe tjerdas dari bangsa lain di Indonesia ini, hal mana bisa diboektikan dari history jang kita dapat sekarang, dan disebabkan koerangnja pengalaman bangsa Kalimantan, maka toch ada patoetnja doa golongan bisa bersatu, soepaja kemadjoean Kalimantan bisa kelihatan dengan lekas, djadi boekanja seperti sekarang ini." (Tjtn, 28 Juli 1928, 1).

Dari artikel ini, penulis menyatakan bahwa urgensi kolonisasi penduduk Jawa memberikan pengaruh terhadap penduduk Jawa yang bermigrasi itu sendiri dan penduduk Kalimantan yang menerima mereka. Penduduk Jawa akan terhindar dari kontrak-kontrak kerja yang merugikan dan dapat membagikan pengalaman pada Kalimantan, baik di bidang pengajaran maupun teknik-teknik usaha tani.

Dalam sebuah artikel berjudul *Handboek voor de Residentie Westerafdeeling van Borneo*,¹⁶ kolonisasi menjadi salah satu alternatif jalan menuju kemandirian ekonomi yang sarat dengan nuansa kolonial. Persoalan ekonomi yang stagnan, oleh surat kabar ini, dirasa karena kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang seluas itu. Oleh karenanya, rancangan kolonisasi penduduk Jawa pemerintah didukung penuh oleh surat kabar ini. Berbagai usulan teknis terkait dengan rencana ini diajukan oleh redaktur. Salah satunya adalah pembentukan koloni dengan pimpinan dari kelompoknya sendiri sebagaimana telah diterapkan pada koloni Madura yang ada di Pontianak. Kehadiran orang-orang Jawa yang lihai dalam bersawah dan bertanam palawija diharapkan mampu melepas kebergantungan akan bahan pangan terutama beras yang selama ini dimpor dari Siam atau Rangoon (Podas, 4 Agustus 1928: 2). Pengaruh ide nasionalisme dari artikel ini diakui dalam bagian akhir yang menyatakan bahwa artikel ini dibuat setelah mendapatkan ide dari sebuah *studieclub*.

Wacana kolonisasi yang masif di surat kabar ini perlu dipahami sebagai bagian dari propaganda pemerintah kolonial untuk memindahkan penduduk Jawa setelah berhasil melakukannya pada 1905 di wilayah Gedong Tataan, Lampung. Pada 1920, kolonisasi di Kalimantan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa alasan kelebihan

16 Pada bagian awal tulisan, penulis artikel ini mengakui bahwa artikel ini terinspirasi oleh tulisan G.L. Uljee, asisten residen Pontianak, yang berjudul sama.

penduduk Jawa terlalu berlebihan untuk dijadikan alasan yang rasional pelaksanaan program kolonisasi pada saat itu. Penyediaan buruh murah demi kelangsungan kapitalisme di luar Jawa malah menjadi kecurigaan mendasar bagi pihak-pihak tersebut (Swasono, 1986: 71-76). Usulan teknis lain adalah usulan pembiayaan kolonisasi dengan bantuan kredit dari *Volkscredietbank* Pontianak atau *Zelfbestuur*. Kebutuhan akan sistem transportasi sebagaimana dikutip redaktur dari Uljee, menjadi bagian lain yang ditekankan mampu mendukung kemandirian ekonomi. Perkembangan perkebunan, perdagangan, konsesi pertambangan dan perkebunan, serta hasil hutan menuntut adanya pelabuhan, jalan, bahkan kereta api (Podas, 4 Agustus 1928: 2).

Peningkatan usaha perniagaan menjadi ide kemandirian ekonomi yang sering kali disebut dalam surat kabar ini. Kebergantungan penduduk terhadap produk karet dan kelapa saja dinilai mengkhawatirkan. Oleh karena itu, surat kabar ini memberi ide perniagaan yang tidak hanya fokus pada niaga tanaman ekspor saja. Terlepas dari usaha surat kabar ini untuk mendapatkan biaya operasional, *Oetoesan Borneo* menawarkan sebuah ide untuk memasang iklan perniagaan dalam media cetak sebagai usaha efektif dalam perniagaan (Penerbit, Redactie dan Administratie, 10 Desember 1927).

Demi memperlancar perniagaan maka sarana perhubungan menjadi penting, sebagaimana surat kabar ini menjadikannya sebagai salah satu unsur pemajuan perekonomian. Menurut surat kabar ini, ketersediaan transportasi melalui air tidak menjadi signifikan tanpa adanya perhubungan darat atau jalan. Pada bagian ini, lagi-lagi surat kabar ini cenderung mendukung usaha-usaha perhubungan darat yang digagas oleh pemerintah kolonial melalui pejabat-pejabatnya (*Oetoesan Borneo*, 16 Juni 1928).

Satu unsur penting dalam narasi-narasi tentang kemandirian ekonomi yang disampaikan oleh *Oetoesan Borneo* adalah penggunaan istilah *indonesiers*.¹⁷ Artinya, surat kabar ini menyampaikan bahwa kemandirian ekonomi harus didukung dengan pemahaman tentang jati diri bangsa Indonesia. Akar-akar nasionalisme yang bersifat lokal tecermin ketika menggugah sikap

17 Lihat judul "Indonesier Kalimantan Wadajib Mengerti: Satoe Initiatief boeat Menaikken Economie Kebangsaan (perhatian pada soal kolonitatie oentoeek Indonesiers Java)" (Tjtn, 21 Juli 1928).

mental bumi putera, dalam hal ini adalah orang Kalimantan. Redaksi hampir setiap saat menggunakan istilah *Indonesier* Kalimantan untuk menyebutkan orang Kalimantan untuk membedakan dengan *Indonesier* Jawa misalnya. Selain itu sebutan ini juga digunakan untuk menggugah kesadaran bahwa *indonesiers* Kalimantan, *indonesier* Jawa dan lainnya disatukan oleh satu Indonesia. Demikian juga ketika redaktur membandingkan semangat kerjanya dengan orang-orang Tionghoa di Kalimantan Barat yang rajin dan ulet bekerja sehingga mampu mendukung nasionalisme Tiongkok yang sedang diperjuangkan pada saat itu (Anonim, 27 Oktober 1928, 1). Sampai di sini, dapat dilihat arah nasionalisme ini menuju. Mengenai penggunaan istilah untuk menyebut penduduk atau lebih tegasnya “calon warga negara”, perjuangan kelompok pergerakan pada masa ini menempatkan istilah pribumi atau bumiputra yang merupakan terjemahan langsung dari *inlander* (yang dalam konteks kolonial diartikan sebagai hamba jajahan) untuk mendudukkan kelompok masyarakat tempatan yang terpinggirkan pada masa kolonial bukan lagi sebagai hamba jajahan tetapi sebagai warga negara dari sebuah negara yang dicita-citakan (Purwanto, 2019: 4–5).¹⁸

Perjuangan dalam menggugah kesadaran nasionalisme oleh Oetoesan Borneo terlihat dari pemberitaan berturut-turut pendirian *societet* untuk orang Indonesia di Pontianak. Kutipan artikel tentang pendirian *soos* berikut ini jelas memperlihatkan bahwa ide nasionalisme yang digagas ingin meleburkan batas etnis menjadi satu Indonesia. Rencana pendirian *societeit* dalam bentuk rumah bola ini dibahas secara serius oleh surat kabar ini sehingga secara kronologis pembaca mengetahui tujuan dan manfaat serta proses berdirinya perkumpulan ini. Mengapa *soos* ini penting dalam perkembangan gagasan nasionalisme di Kalimantan? *Soos* biasanya adalah sebuah klub sosial sebagai tempat bersenang-senang, melepas lelah yang dibuat oleh orang-orang Belanda. *Soos* adalah sebuah kebutuhan gaya hidup modern bagi masyarakat. Kebutuhan akan gaya hidup modern ini ditanggapi beberapa tokoh dengan membuat *societeit* khusus untuk orang Indonesia. Proses bersepakat menjadi orang

18 Walaupun Bambang Purwanto juga menyatakan bahwa kata pribumi ataupun bumiputra yang ampuh digunakan pada awal kemerdekaan untuk memberi perhatian lebih pada penduduk tempatan yang dipinggirkan oleh sistem kolonial, nyatanya di sisi lain istilah ini kemudian secara politis dikomodifikasi oleh elite politik sehingga praktik kewarganegaraan Indonesia menjadi rumit dan sulit dipahami. Selengkapnya, baca Bambang Purwanto dalam *Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis*.

Indonesia tecermin dalam pidato dr. Agus Sjam, tuan tumah rapat pendirian *soos*, selain tujuan awal sebagai perkumpulan amal dan tempat bagi para bumiputra yang lelah bekerja untuk beristirahat dan bersenang-senang.

"... Toean-toean jang terhormat! ... bagaimana toean-toean semua dapat ketahui, bagi kita di Pontianak ini, tidak ada soeatu joega tempat penjenangan-jenangan hati. Baik bagi toean-toean jang bekerdja di handel maoepun yang makan gadji pada gouvernement d.l.l Begitoeupun joega dengan petjampoeran tadilah maka kita dapat menambah pengetahuan dan kepandaian kitadan menilik keadaa'an jang pantas, meniroe, dan meneladan pekerjaan jang baik. Sekarang kta lihat pendoeoedok Pontianak hanja berdjalan mengambil haloeannja masing-masing saja. Orang Bumipotera disini misalnja, jawa tida bertjampoer dengan orang sebelah Sumatra, melainkan hidoep dengan sendirinja sendirinya saja Oleh sebab itoe, jang kita ini Indonesier belaka, dan hapuslah perasaan perasa'an pembagian dari satoe poelau kesatoe poelau itoe, dan berilah bernama Indonesia kita ini: "Indonesia Raja" Soedah itu toean Koesmaljono berbicara lagi Comite mentjarikan nama oentoek *soos* kita ini dan kalau setuju akan dinamai "medan sepakat" artinya tempat kita oerang memperhoeboengkan silatoerrahim dan mentjari kata sepakat oentoek keperluan bersama" (*Oetoesan Borneo*, 21 Januari 1928).

Tidak mengherankan jika gagasan mempersatukan *indonesier* ini digagas oleh Dr. Agoes Djam. Kondisi penduduk yang plural merupakan ciri dari Kalimantan Barat terutama Pontianak. Sejak dibukanya wilayah ini oleh Sultan Abdurrahman Al Kadrie pada 1771, pembagian kampung-kampung menunjukkan ragam etnis yang berbeda. Kedudukan pemerintah kolonial menempatkan banyak pegawai Gouvernement dari wilayah lain menetap di Pontianak. Perkembangan ekonomi sudah barang tentu meningkatkan jumlah wiraswasta dan orang-orang luar Kalimantan yang bekerja di bidang perniagaan di Pontianak dan sekitarnya. Sebelum adanya *soos* yang kemudian dinamai Medan Sepakat ini, berbagai perkumpulan berdasarkan kelompok etnis telah ada di wilayah ini. Selain *soos* milik orang-orang Eropa, perkumpulan Tionghoa dan perkumpulan Jawa terlebih dahulu hadir (Tjtn, 3 Maret 1928). Setidaknya, cita-cita perkumpulan ini untuk menyatukan bumiputra dari berbagai wilayah dan berbagai profesi terlihat dari struktur kepengurusan. Pengurus utama adalah Dr. Agus Djam (*inlandsche artsen/dokter pribumi*) sebagai ketua, Koesmoeljono (politisi)¹⁹ sebagai sekretaris,

19 Penulis belum mendapatkan keterangan pasti tentang Koesmoeljono. Satu-satunya yang menyebut profesinya sebagai politisi (dalam artikel disebut dengan "seorang politiek") adalah artikel "Persatoean Indonesier Pontianak" dalam *Oetoesan Borneo*, 3 Maret 1928.

dan Ismail (Annashar & Co.) sebagai bendahara. Mereka dibantu oleh Abdul Madjid (pejabat Pos), Mudikdio (pejabat pelabuhan), Andin dan Said sebagai dewan komisaris (*Oetoesan Borneo*, 21 Januari 1928). Terlihat pula orang Sumatra Barat menempati jumlah anggota terbanyak dari *soos* ini.

Dengan demikian, satu hal yang penting dalam periode ini adalah kesadaran untuk bersatu menjadi sebuah akar nasionalisme yang dapat dilihat dari usaha kemandirian ekonomi yang disebut oleh kelompok kecil dari Kalimantan Barat ini sebagai usaha menaikkan ekonomi kebangsaan.

E. Simpulan

Masa 1920-an memiliki arti penting dalam memahami akar kebangsaan Indonesia. Periode inilah yang menjadi jendela untuk melihat berbagai kelompok mengubah cara pandangnya dalam melihat tatanan kolonial yang pada akhirnya mewujud pada satu kesadaran dan cita-cita tatanan masyarakat yang baru. Salah satu ciri dari tatanan baru tersebut adalah ciri kemandirian ekonomi. Kesadaran ini ditampilkan dalam bentuk dan bahasa modern, salah satunya melalui media cetak. Dalam tulisan sebelumnya, Kalimantan Barat sebagai lingkup spasial dengan realitas sosial dan ekonominya kala itu disajikan dengan berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh dan ideologi di balik surat kabar-surat kabar lokal. Tentu saja ide-ide yang tertuang dalam surat kabar-surat kabar tersebut tidak mengabaikan, bahkan dapat dikatakan terpengaruh, dengan ide-ide yang sedang berkembang di luar Kalimantan Barat, Hindia Belanda, Asia Tenggara, bahkan dunia. Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa ide kemandirian ekonomi sebagai bagian dari akar kebangsaan dapat dilihat dari setidaknya tiga corak berikut.

Surat kabar *Warta Borneo* menyampaikan ide kemandirian ekonomi dalam sebuah usaha awal untuk terlepas dari beban yang ditimbulkan oleh sifat predatori kolonial seperti pajak dan kerja paksa. Kritik terhadap *belasting* dan *heerendient* disampaikan dengan radikal. Selanjutnya, ide kemandirian ekonomi juga diusulkan dengan menolak kapitalisme yang hanya akan memperlakukan penduduk tidak lebih dari sekadar mesin. Radikalisme dalam bahasa pers mereka bertujuan untuk mendorong penduduk Kalimantan

Barat untuk berani menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penindasan sosial dan ekonomi.

Surat Kabar *Sinar Borneo* menganggap ide kemandirian ekonomi masyarakat Borneo akan tercapai jika mampu mengembangkan budi daya tanaman pangan selain tanaman niaga yang sedang laku di pasaran dengan dukungan pembuatan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Surat kabar ini menganggap bahwa langkah kooperatif antara kekuasaan lokal dan pemerintah kolonial mutlak dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai kemakmuran ekonomi rakyat Kalimantan Barat.

Surat kabar *Oetoesan Borneo* yang mendeklarasikan diri sebagai surat kabar yang “netral” menyuarakan ide cita-cita kemandirian ekonomi yang harus didukung sumber daya, infrastruktur, dan yang paling penting, sikap mental yang sama sebagai orang Indonesia, yang bersatu dan bersepakat untuk bersama

Pada akhirnya, jika kita mampu melihat dan memahami beragamnya corak ide kemandirian ekonomi yang ada dalam akar nasionalisme Indonesia, tentu kita akan lebih bijaksana dalam melihat berbagai macam ideologi yang pernah berkembang di belakangnya. Dengan pemahaman historis yang demikian itu maka kita tidak akan mudah terjerumus dalam adu domba serta kepentingan-kepentingan yang tidak menguntungkan bahkan merusak makna persatuan yang sejati di negeri ini.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR PUSTAKA

Arsip, Buku, Jurnal, dan Tugas Akhir

- Budiawan. 2017. *Nasion & Nasionalisme: Jelajah Ringkas Teoretis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Creutzberg, Pieter dan J.T.M. van Laanen. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Day, Clive. 1900. "The Dutch Colonial Fiscal System" dalam *Publication of the American Economic Association*. Seri 3. No.1 Vol. 3.
- Dick, Howard. 1989. "Japan's Economic Expansion in the Netherland Indies Between the First and Second World War" dalam *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. XX No.2.
- Dhont, Frank. 2005. *Nasionalisme Baru: Intelektual Baru Tahun 1920-an*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakih, Farabi. 2014. "Akar-Akar Kanan dalam Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesenjariannya" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11 No. 1.
- Fernando, M.R., David Bulbeck. 1992. *Chinese Economic Activity in Netherlands Indie: Selected Tranlations from The Dutch*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Heidhues, Mary Somers. 2008. *Penambang Emas, Petani, dan pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Kartodirdjo, Sartono. 2014. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Listiana, Dana. 2011. "Tokoh, Peristiwa, dan Tempat Bersejarah di Pontianak-Kubu-Mempawah Sejak masa kesultanan Hingga Masa Republik" dalam Purba, Juniar, dkk. *Nukilan Sejarah Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Press.
- , Karel Juniardi, dan Raistiwar Pratama. 2014. *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial*. Yogyakarta: Kepel Press.
- . 2017. "Sistem Pacht dan Perluasan Negara Kolonial di Pontianak 1819-1909". Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Muhsin, Mumuh. 2017, "Produksi Kopi di Priangan Abad ke-19" dalam *Paramita: Historical Studie Journal* 27 (2).

- Purwanto, Bambang. 2019. *Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rahardjo, Iman Toto K. dan Herdianto WK (ed.). *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Grasindo.
- Rahmayani, Any. 2018. "Niaga dan Kuasa di Kapuas Awal Abad ke-20," dalam Rahmayani, Any, Andang Firmansyah, dan Yusri Darmadi. *Dari Hulu ke Hilir: Integrasi Ekonomi di Sungai Kapuas pada 1900-1942*. Yogyakarta: Diva Press.
- Sandick, J.C.F. van dan VJ. van Marle. 1919. *Verslag eener Spoorwegverkenning in Noordwest-Borneo*. Batavia: Albrecht.
- Shiraishi Takashi. 2005. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- . 1986. "Satria vs Padhita: Sebuah Debat dalam Mencari Identitas" dalam Nagazumi, Akira (ed.). *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Smith, Edward C. 1986. *Pembreidelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafiti Pers.
- Soedarto, dkk. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
-
- Swasono, SriEdi. 1986. "Kependudukan, Kolonisasi dan Transmigrasi" dalam Swasono, Sri Edi dan Masri Pangaribuan (ed.). *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- . 2003. *Anak Bangsa Menggugat.: Nasionalisme, Kemandirian dan Kewirausahaan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- . 2009. "Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi, Membangun Ekonomi Rakyat" diunduh dari <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/edisi-33-tahun-2003/kemandirian-ekonomi-menghapus-sistem-ekonomi-subordinasi-membangun-ekonomi-rakyat--oleh-sri-edi-swasono/> pada 10 Agustus 2019.

- Tim Penulis. 1991. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*. Pontianak: Pemerintah Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat.
- Touwen, Jeroen. 2001. *Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942*. Leiden: KITLV Press.
- Utama, Wildan Sena. 2014. "Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912-1914" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11 No. 1.
- Wiharyanto, A.K. 1996. *Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

Artikel dan Berita dalam Surat Kabar

- Anonim. 15 November 1924. "Chaffeur-chaffeur Auto Mengomel, Perdjalan Ra'iat Terganggoe" dalam *Warta Borneo*, hlm. 2.
- 29 November 1924. "Belasting dan Heerendients, Ra'iat Moesti Tahoe" dalam *Warta Borneo*, hlm. 1.
- 29 November 1924. "Pikoelan Ra'iat Bertambah" dalam *Warta Borneo*.
- 6 Desember 1924. "Ra'yat Haroes Mengetahoei" dalam *Warta Borneo* No. 5 Tahun 1, hlm. 1.
- 16 Juni 1928. "Perhoeboengan Borneo Barat Perloeklanlah Djalanan Kalau Maoe Madjoe" dalam *Oetoesan Borneo*.
- 27 Oktober 1928. "Poetra Kalimantan Madjoe Selangkah" dalam *Oetoesan Borneo*.
- D.M. 10 Mei 1926. "Boeah Fikiran" dalam *Sinar Borneo*.
- Denmas. 10 Mei 1926. "Keadaan Pontianak" dalam *Sinar Borneo*.
- Isa, S.B.G. 20 Oktober 1923. "Kelakoean S.M. Anwar dalam Mengemoediekan Halilintar" dalam *Soeara Borneo*.
- L. & Dj. 29 November 1924. "Heerendienst di Ketapang" dalam *Warta Borneo*.
- M.J. 23 Mei 1928. Tanpa Judul, dalam *Oetoesan Borneo*, hlm. 2.
- Penerbit, Redactie & Administratie. 10 Desember 1927. "Oetoesan Borneo," dalam *Oetoesan Borneo*, Th. 1, hlm. 1.

- Podas. 4 Agustus 1928. "Handboek voor de Residentie Westerafdeeling van Borneo," dalam *Oetoesan Borneo*.
- Red., 10 Desember 1927. "Soerat-Soerat Chabar di Borneo Barat" dalam *Oetoesan Borneo*, Th. 1, hlm. 1.
- Red. 21 Januari 1928. "Pendirian Societeit bagi Indonesiers di Pontianak" dalam *Oetoesan Borneo*,
- S.J. Joesoef, 24 Mei 1926. "Boeah Pikiran" dalam *Sinar Borneo*.
- Tjtn. 3 Maret 1928. "Persatoean Indonesier Pontianak" dalam *Oetoesan Borneo*.
- 4 Juli 1928. "Berapakah Tingginya Energie Poetra Kalimantan?" dalam *Oetoesan Borneo*. hlm.1.
- 21 Juli 1928. "Indonesier Kalimantan Wadjib Mengerti. Satoe Iniatif boeat Menaikkan Economie Kebangsa'an" dalam *Oetoesan Borneo*. hlm. 1.
- 28 Juli 1928. "Indonesier Kalimantan Wadjib Mengerti. Satoe Iniatif boeat Menaikkan Economie Kebangsa'an (sambungan OB no 56)" dalam *Oetoesan Borneo*. hlm.1.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BOEAH FIKIRAN

Kalau kita perhatikan keadaan keadaan pendoeoek di Pontianak dan seloeroehnja (Wester Borneo), waktos sekarang ini, tiada diperhatikan berladang padi hanya semata-mata menanam getah dan kelapa tentang pengasilan padi, hampir boleh dikatakan sedikit sekali, pada hal, padi itoealah jang menjadi beras, betoel oewang pendapatan getah dan kelapa boloh dibelikan beras, tetapi kalau kedadian semajam taheon 1919 jang lakoe, njata poela wang itoe tiada bergoena, apaagi kalau sekiranya tiada datang beras dari Siam ta'dapat tiada soesalah kita pendoeoek Pontianak.

Ja, kalau selamajnja barga getah seperti sekarang, artinya masih lakoe, tetapi kalau tiada lakoe, ataupun seperti 3 taheon jang lakoe, apaagi pengasilan pendoeoek?

Soenggoeh kita merasa sajang, sekali melihat keadaan di Pontianak ini apakah sebabnja banjaklah tanah kosong, dari pada jang ditanami. Hingga maoe ta'maoe sajoer-sajoeran didjoel oleh bangsa Tionghoa, pendokuja dari barang jang ketjil seperti Sirih, hingga barang jang besar seperti getah kelapa dan lain-lain semoenja dijeter dan dibeli serba didjoewal oleh orang Tiong hoa.

Sampai disini kembali lagi, kita berharep padi samoes pendoeoek di Borneo Barat, berladanglah padi, sementara koboen getah poea haroes dikerdjakan, ringkasnja getah, kelapa, dan palipoen haroes kita kerdjakan.

Menoeoet fikiran kita, ada lebih baik sekali bertanam padi dari pada mereboet bertanam getah d.l.l. sebab padi itoealah jang mengagatkan dan menolak babas kelaparan, maka soedah kita boekan mentjoein pendoeoek bertanam getah d.l.l. itoe tiada sekali-sekali, hanya kita haruslah ta'mi poela padi, karena tanahpoen banjak jang kosong.

Soe samoes kita ras, dari maoesja ben-

doeok di Borneo Barat, memang banting, kalau bertanam padi atau berladang sebab berladang ada lebih gampang dari bertanam getah, asal maoe saja, itoe lah pokoknja.

Itoe barga-barga selialit toean-taean Pemoeda-pemoeda di seloeroeh Pontianak, gerakkanlah bangsa kita sepoja berladang dan berilah nasihat, tentang banting berladang itoe.

Kalau ladang-ladang bertumbuh banjak, ta'lapar tiada ma'moerial samoes pendoeoek oleh sebab banjak busi bja getah, kelapa padi d.l.l. boekan seperti sekarang, boleh dikatakan getah dan kelapa soedah itoe lah pengasilan jang dikerdjakan pendoeoek, soenggoeh sajang kalau maoes ngeloerkan padi.

Tjapa toean pembatja persaksikan, seperti di tanah Djawa dan Sumatra masing-masing, hampir akan mentjoekopi dibantu pemerintah tentang hasil padi, dan pada ada beberapa pabrik menggiling padi, kemana di Pontianak, hampir tidak ada pabrik menggiling padi.

Harap perhatikandah seperti pepatah Melayoe.

Hemat pangkal raja.

Boekan Hemat itoe, kikir tidak, maka selsoednja dijagal, mentoek besok dan besa.

Kita pertinja, kalau pendoeoek wadjo bertjoetjoek tanam dan berladang, toepat tiada dipimpin oleh Pemerintah kita, karena Pemerintah soedah sediakan mentoek bertjoetjoek tanam, berladang dan lain-lain hasil tanah kalau kita ta'salah ialah Departement van Landbouw, dan ada poela sekolahnja (Landbouw School) seperti di Bogor.

Dengan toelisan jang diatas ini, moehh moedahan hilanglah sima' moes, jang masih melekat pada samoes pendoeoek di Pontianak. Amin.

Wassalam

D. M.

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat

Gambar 1.2 Sinar Borneo edisi 10 Mei 1926

Satue iniatief boeat menaikn economie kebangsaan.

(Penerian pada soal kolonisatse onatok Indoniesia Jawa)

Samborngan O. II No. 86

Kita ada jumbuh memnang... Kudu ada jumbuh memnang... Kudu ada jumbuh memnang...

terdapat lain orang... terdapat lain orang... terdapat lain orang...

Pada kata Pengrim (Dawa)... Pada kata Pengrim (Dawa)... Pada kata Pengrim (Dawa)...

terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal...

Terjadi pada... Terjadi pada... Terjadi pada... Terjadi pada... Terjadi pada...

terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal...

Pada kata Pengrim (Dawa)... Pada kata Pengrim (Dawa)... Pada kata Pengrim (Dawa)...

Indonesia.

Vergering oetoesan dari Party Nasional Indonesia.

Pada hari minggu... Pada hari minggu... Pada hari minggu... Pada hari minggu... Pada hari minggu...

terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal...

terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal...

Pada kata Pengrim (Dawa)... Pada kata Pengrim (Dawa)... Pada kata Pengrim (Dawa)...

Terjadi pada... Terjadi pada... Terjadi pada... Terjadi pada... Terjadi pada...

terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal... terjadi suatu hal...

Pada kata Pengrim (Dawa)... Pada kata Pengrim (Dawa)... Pada kata Pengrim (Dawa)...

Kelompokan dua P.N.I... Kelompokan dua P.N.I... Kelompokan dua P.N.I... Kelompokan dua P.N.I...

Ba

aya

Gambar 1.3 Oetoesan Borneo edisi 28 Juli 1928

BAB 2

Pemikiran Haji Rais bin Abdoerrachman dan Masa Pergerakan Nasional di Kalimantan Barat (1900–1942)

Lisyawati Nurcahyani



Balai Pele... i Budaya

Kalimantan Barat

Gambar 2.1 Haji Rais bin Abdoerrachman

Penulisan sejarah yang ada di Kalimantan Barat pada umumnya hanya menyoroti perkembangan politik yang terjadi dari masa sebelum kemerdekaan sampai dengan setelah kemerdekaan. Begitu juga dengan sejarah pergerakan rakyat Kalimantan Barat, hanya mengulas tentang perlawanan fisik yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan politik yang diberlakukan bagi penguasa lokal maupun rakyat. Padahal di balik semua itu, ada pemikiran atau ide-ide yang menyebabkan terjadinya perlawanan maupun perubahan yang berlangsung pada saat itu.

Ide, gagasan, maupun pemikiran bersifat dinamis dari masa ke masa menyesuaikan dengan perkembangan sosial-kultural dari individu maupun masyarakatnya. Tak luput pula perkembangan politik yang sangat berpengaruh terhadap sosial-kultural pada setiap masanya. Tidak setiap ide, gagasan, pemikiran ataupun kesadaran meninggalkan bekasnya, berupa dokumen ataupun benda. Tidak terhitung banyaknya *mentifact* (kejiwaan) yang musnah terbawa ke liang kubur karena tidak tercatat atau tidak berbekas.

Gagasan atau pemikiran pada umumnya dilontarkan oleh kaum intelektual yang menempati lapisan sosial golongan elite baru. Menurut Harry J. Benda yang dimaksud dengan kaum intelektual di Timur ada dua macam, yaitu kaum intelektual lama dan kaum intelektual baru. Kaum intelektual lama adalah golongan penguasa lokal atau pribumi dan para kerabatnya. Adapun golongan intelektual baru muncul karena adanya pendidikan Barat, sehingga cara berpikir dan bertindak (proses pembaratan) tidak lagi bersifat tradisional (Benda, 1983: 154-165). Namun, perlu diketahui bahwa pendidikan Barat yang dijalankan pemerintah Belanda bersifat diskriminatif sehingga hanya golongan para penguasa lokal, pegawai pemerintah, dan orang kaya yang bisa bersekolah. Dengan demikian, bisa dikatakan sebagian besar dari golongan intelektual adalah keluarga dari penguasa lokal dan orang kaya. Golongan intelektual baru perannya dalam masyarakat sebagai motivator dan dinamisator yang mampu menggiring masyarakat ke arah terciptanya kesadaran nasional. Sudah menjadi fenomena historis di negara-negara Timur termasuk Indonesia, kaum intelektual berperan dalam menyiapkan bangsanya menuju kemerdekaan (Benda, 1983: 154-165).

Namun, tidak semua golongan intelektual baru, khususnya di Kalimantan Barat seperti yang dikatakan oleh Benda. Golongan ini sebagian berorientasi untuk bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda dan mempertahankan statusnya sebagai penguasa di daerah. Sementara itu, sebagian lagi adalah golongan intelektual pergerakan yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat dan membebaskan diri dari penjajahan, penindasan, dan memajukan pendidikan agar rakyat tidak bodoh. Golongan pergerakan ini adalah Haji Rais bin Abdoerrachman dan sepuluh tokoh perintis kemerdekaan Kalimantan Barat. Dalam kajian ini akan dibahas tentang bagaimana pemikiran-pemikiran dari Haji

Rais bin Abdoerrachman dan pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan, serta gambaran kondisi sosial politik di daerah ini pada masa pergerakan (1900–1942). Kurun waktu tersebut merupakan batasan kondisi pada saat kelahiran Rais sampai dengan saat meninggal beliau.

Kajian ini tidak bisa dikategorikan sebagai sejarah biografi. Mengutip tulisan begawan ilmu sejarah Indonesia yaitu Sartono Kartodirdjo bahwa untuk menulis biografi perlu memahami dan mendalami kepribadian seseorang melalui latar belakang lingkungan sosial kultural di tempat tokoh itu dibesarkan, bagaimana proses pendidikan formal dan informal yang dialami, serta watak-watak orang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan segi psikologinya, seperti emosionalnya, moralnya, dan rasionalnya. Perlu dikaji juga pandangan hidup dan intelektualitasnya. Hal ini tentu saja membutuhkan data yang lengkap dan waktu yang panjang. Sementara itu, pengumpulan data yang dilakukan hanya beberapa hari saja. Satu alasan klasik bahwa data yang diperoleh sangat terbatas, namun penulis berusaha mengumpulkan data pendukung, baik dari surat kabar, buku atau tulisan dari saksi mata, arsip maupun literatur-literatur yang mendukung kajian ini. Meskipun realitasnya surat kabar yang beredar di daerah ini pada masa ini pada umumnya berhaluan komunis, hal ini merupakan suatu proses dalam sejarah perkembangan politik yang tidak terlepas dari perkembangan politik yang ada di Jawa maupun Sumatra. Bisa dikatakan bahwa adanya pola-pola yang sama perkembangan kesadaran politik masyarakat pada masa itu, dari kesadaran yang bersifat kesukuan, kemudian berkembang identitas kebangsaan yang berideologi Islam, kemudian lanjut pada haluan sosial-komunis, dan terakhir pada haluan nasionalis. Proses ini juga berlaku di daerah ini, mengikuti arus yang berkembang di Jawa dan Sumatra, yang membuat gambaran tentang dinamisasi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Kalimantan Barat.

Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan ilmu sosial. Untuk mengkaji semua perkembangan sejarah tersebut maka diperlukan suatu metode sejarah yang meliputi empat tahap kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan kajian, seperti arsip, dokumen, surat kabar, dan

majalah. Sumber-sumber yang telah terkumpul terlebih dahulu harus mengalami kritik melalui kritik ekstern dan intern agar dapat diklasifikasikan sesuai dengan kerangka tulisan. Kegiatan interpretasi dilakukan untuk menafsirkan makna fakta dan hubungan antarfakta secara objektif. Walaupun penafsiran ini tidak terlepas dari sifat subjektif, kesubjektifannya harus bersifat rasional. Agar kajian ini lebih mendalam maka konsep-konsep sosial dapat mengungkap stratifikasi sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Harapan penulis, kajian ini dapat melengkapi ruang kosong dalam penulisan sejarah daerah dan memberikan warna lain dalam perkembangan sejarah di Kalimantan Barat. Besar harapan penulis untuk kritik dan saran dari para pemerhati dan pembaca sejarah demi kesempurnaan tulisan ini dan semoga bermanfaat untuk semua.

A. Sosial-Budaya Masyarakat Akhir Abad Ke-19 Sampai Awal Abad Ke-20

Pada umumnya masyarakat yang hidup di Kalimantan Barat bercorak agraris, dengan menggantungkan kehidupannya pada pertanian ladang, memungut hasil kebun, dan menangkap ikan di sungai. Bagi masyarakat yang berada di pantai, perdagangan juga menjadi salah satu sumber penghidupan mereka. Secara garis besar, masyarakat Melayu bermukim di dekat pantai, sedangkan masyarakat Dayak berada di daerah pedalaman, di dekat hutan dan sungai-sungai kecil yang menjadi alat transportasi mereka. Kedua suku ini hidup dalam dunia yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Suku Melayu hidup di sepanjang pantai sehingga mudah untuk berhubungan dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia perdagangan juga membuat mereka terbuka menerima pengaruh dari luar. Sementara itu, masyarakat Dayak berada jauh di hutan dengan transportasi yang minim sehingga tidak mudah untuk dijangkau oleh pengaruh dari luar.

Dua kehidupan ini melahirkan dua budaya yang berbeda yang membentuk karakter mereka masing-masing. Suku Melayu Kalimantan Barat adalah masyarakat pantai yang beragama Islam dan berbudaya Islam dengan mata pencaharian mayoritas berdagang dan

juga nelayan. Sementara itu, masyarakat Dayak adalah masyarakat dengan kepercayaan tradisional dan adat istiadat leluhurnya yang berkaitan dengan hutan dan lingkungan alam. Mata pencaharian suku Dayak adalah ladang berpindah, memungut hasil hutan, dan mencari ikan untuk kebutuhan hidup.

Kelompok pendatang yang mempunyai peranan penting dalam sejarah perkembangan sosial Kalimantan Barat, seperti Jawa, Bugis, dan Melayu. Kehadiran mereka dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi, politis, maupun penyebaran agama Islam. Kedatangan etnis Melayu (Sumatra Barat), Bugis, Jawa, dan pengaruh Islam memberikan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat asli Kalimantan Barat. Mereka langsung dapat menyesuaikan diri dengan suku Dayak, bahkan terjadi integrasi secara damai. Sebagian dari suku Dayak masuk Islam dan terintegrasi dalam budaya Melayu dan menjadi suku Melayu Kalimantan Barat. Sementara itu, suku Dayak masih bertahan di daerah pedalaman. Walaupun telah terjadi integrasi, jiwa bangsa (*rassen psychologie*), menurut Gusti Sulung Lelanang, masih tetap ada (Lelanang, *Kesedaran* No. 2, Februari 1940: 12). *Rassen psychologie* Borneo artinya kebudayaan dalam mencapai perubahan modern lahir membentuk corak tersendiri dalam daerahnya yang tidak berjauhan dari tumbuhnya kebudayaan Indonesia baru (*Kesedaran* No. 2, Februari 1940: 12). Jiwa bangsa inilah yang membuat perubahan yang terjadi di setiap suku berbeda-beda. Begitu juga dengan suku atau bangsa Dayak tetap mempunyai akar yang kuat meskipun pengaruh-pengaruh Bugis, Melayu, Jawa, dan dunia modern hadir dalam kehidupan mereka pada masa itu.

Pada masa ini, peran Jawa menjadi penting karena menjadi tolok ukur perubahan bagi daerah-daerah lain di Indonesia, terutama Kalimantan Barat. Hubungan perdagangan antara Jawa dan daerah Kalimantan Barat sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Dengan adanya hubungan dagang ini terjadi *transfer knowledge* sehingga terjadi perubahan dalam berbagai bidang, terutama pemikiran-pemikiran tentang kebangsaan, nasionalisme, maupun komunisme.

Perubahan juga terjadi dengan kehadiran suku Cina yang melengkapi keberagaman suku di Kalimantan Barat. Suku Cina atau Tionghoa menjadi suku terbesar ketiga yang keberadaannya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kehadiran mereka di Kalimantan

Barat terutama karena didatangkan oleh raja Sambas secara massal untuk dipekerjakan sebagai penambang. Mereka ini tetap membawa budaya leluhur dari tempat asalnya dan tetap melestarikannya sampai sekarang. Keberhasilannya dalam penambangan emas dan perkebunan lada membuat mereka hidup dalam kemakmuran sehingga terbentuklah kongsi-kongsi sekitar tahun 1777 (De Groot dalam Soedarto, 1978/1979: 11). Kongsi-kongsi ini pada awalnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah persaingan ekonomi di antara mereka. Namun dalam perkembangannya, kongsi tersebut justru dimanfaatkan untuk menentang dan mengatur kekuasaan raja Sambas.

Perubahan juga terjadi karena kehadiran bangsa Eropa, khususnya Belanda. Pada akhir abad ke-19, Pax Netherlandica mulai diarahkan pada daerah-daerah luar Jawa, tak terkecuali daerah Kalimantan Barat. Keinginan untuk menahan ekspansi James Brook di Pulau Borneo (Kalimantan) menjadi hal yang utama pemerintah kolonial Belanda melakukan ekspansi ke Kalimantan Barat, di samping lemahnya kekuatan kerajaan sehingga dominasi ekonomi dan politik dilakukan oleh bangsa Cina di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Cina karena eksploitasi tambang dan perdagangan lada menunjukkan bahwa Kalimantan Barat kaya akan tambang yang bisa menjadi pemasukan keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda.

Dengan kedatangannya ke Kalimantan Barat, banyak terjadi perubahan yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Raja-raja diikat dalam perjanjian pendek maupun panjang yang secara otomatis mengikat rakyat Kalimantan Barat untuk memenuhi segala aturan yang ditetapkan oleh Belanda. Kehadiran para pegawai Belanda yang memosisikan diri sebagai penasihat, tetapi dalam kenyataannya merekalah yang memegang kendali pemerintahan. Raja-raja mulai diperkenalkan dengan sistem mata uang karena memperoleh gaji dan tunjangan sebagai pegawai dari pemerintah Belanda. Sementara itu, rakyat harus membayar pajak (*belasting systeem*) yang tinggi. Sistem penguasaan tidak langsung ini diterapkan oleh Belanda karena tidak dapat mengubah kendali sosial budaya (*prestise*) raja di mata rakyatnya. Di samping itu, kesulitan transportasi dan kondisi geografis pada masa itu yang menyebabkan pemerintah tidak mudah untuk menaklukkan penguasa-penguasa lokal yang ada di pedalaman.

Penguasa-penguasa lokal yaitu masyarakat Dayak yang hidup sangat bergantung pada hutan dan lingkungan alamnya. Permukiman-permukiman masyarakatnya berada di sepanjang sungai sebab sungai merupakan urat nadi bagi kehidupan mereka, tidak hanya sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai sumber kebutuhan hidup mereka. Selain memungut hasil hutan, mereka juga berladang dengan sistem berpindah. Namun kemudian, pemerintah Belanda mematikan kearifan lokal ini dengan menggantikannya dengan sistem menetap (intensifikasi). Adat istiadat seperti mengayau yang berlaku pada saat itu karena belum adanya kesadaran bersatu sehingga masih terjadi perang anatarsuku dan oleh Belanda adat mengayau dilarang.

Perubahan politik Belanda yang melahirkan politik etis, membawa perubahan-perubahan di Hindia. Politik etis dalam konsepnya melakukan pendekatan melalui kemanusiaan walaupun dalam praktiknya tetap bermuara pada kepentingan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, berlakunya politik etis membawa dampak bagi penanaman modal asing atau swasta ke Kalimantan Barat (*opendeur politiek*). Dengan adanya kebijakan ini, monopoli bukan hanya pada kekuatan modal asing saja, melainkan juga kekuatan modal Cina. Kedua pelaku ekonomi ini menguasai bidang ekspor komoditas yang laku di pasar internasional, yaitu tanaman kelapa, kopra, dan lada. Komoditas karet juga menguat dan membawa perubahan dalam bidang ekonomi, dalam hal ini Belanda mulai memperkenalkan karet sebagai tanaman ekspor. Kaum kapitalis atau pemilik modal inilah yang memicu perkembangan golongan buruh sehingga rakyat dipaksa untuk meninggalkan ladang mereka.

Pengaruh sosial budaya lain yang kentara dalam pemerintahan Belanda dalam kehidupan masyarakat akibat kebijakan politik etis adalah pendidikan. Pendidikan Barat mulai diperkenalkan di kalangan elite tradisional sebagai upaya untuk mengisi jabatan-jabatan rendah ke dalam struktur birokrasi pemerintahan. Pemerintah Belanda pada tahun 1912 mulai memangkas jabatan-jabatan tradisional, seperti mangkubumi, laksamana, dan patih, untuk melemahkan posisi raja, dan menggantinya dengan jabatan demang (kepala distrik) (Soedarto, dkk., 1978/1979: 35). Para elite tradisional yang telah lulus pendidikan Barat inilah yang mengisi kedudukan sebagai demang karena dianggap sudah menguasai tata

administrasi dan bahasa Belanda. Demang sebagai penguasa secara tradisional dinobatkan oleh Sultan sebagai lambang kekuasaan, tetapi dalam pelaksanaannya terikat pada surat keputusan pemerintah Belanda. Dualisme kekuasaan ini menjadi ciri khas pemerintahan Belanda, di samping diskriminasi yang sengaja diciptakan untuk memecah belah rakyat.

Diskriminasi dalam dunia pendidikan Barat yang didirikan oleh Belanda mampu menggeser peran pendidikan tradisional yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Sekolah-sekolah madrasah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi kaum elite mulai kehilangan perannya seiring dengan berkembangnya pendidikan Barat. Masyarakat lebih memilih pendidikan Barat karena dianggap dapat memberikan kedudukan dan keuntungan finansial. Pendidikan Barat juga memperkenalkan dunia pengetahuan lewat buku-buku. Dalam perkembangannya, pendidikan Barat justru memukul balik pemerintah Belanda karena rakyat menjadi terbuka wawasannya. Hal ini dapat menumbuhkan pemikiran atau kesadaran akan paham-paham kebangsaan dan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Tumbuhnya kesadaran yang dipengaruhi oleh hubungan dagang antara Kalimantan Barat dan daerah-daerah lain yang lebih maju, membawa serta paham-paham yang sedang berkembang di daerahnya masing-masing. Pedagang Minang membawa paham Islam yang mempertebal keimanan sehingga mendorong mereka untuk belajar agama di luar Kalimantan Barat. Paham-paham kebangsaan yang sedang berkembang di Jawa mengalir ke Kalimantan Barat. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau kemudian muncul organisasi-organisasi yang merupakan cabang dari organisasi yang ada di Jawa seperti Sarekat Islam. Begitu juga ketika terjadi perubahan paham atau haluan dari kebangsaan berubah ke paham komunis, secara bertahap juga berpengaruh terhadap kaum pergerakan Kalimantan Barat. Kesadaran kaum intelektual membawa banyak perubahan di daerah ini. Munculnya organisasi dan pers mempercepat perkembangan pemikiran-pemikiran untuk membebaskan diri dari kondisi tertindas, miskin, dan bodoh. Pemikiran untuk bersatu dalam mencapai kemerdekaan Indonesia menjiwai setiap pergerakan rakyat Kalimantan Barat.

B. Dinamika Pemikiran Haji Rais dalam Masa Pergerakan Tahun 1923–1942

1. Latar: Lingkungan Keluarga, Pendidikan, dan Pergaulan Sosial

Penulis merasa kesulitan dalam mencari asal-usul keluarga Haji Rais bin Abdoerrachman. Anak Haji Rais sendiri, Latifah, tidak banyak mengingat bagaimana sosok ayahnya dan bagaimana kehidupan mereka pada saat itu. Latifah masih sangat kecil ketika ditinggal ayahnya pergi, bahkan dia tidak merasakan kedekatan dengan ayahnya yang sibuk bekerja dan jarang ada di rumah. Kesibukan Rais bisa dipahami karena ia seorang tokoh pergerakan dan jurnalis andal yang telah berjasa membuka wawasan dan pemikiran rakyat tentang pers pada waktu itu.

Berikut ini kehidupan Rais muda menurut penuturan saksi mata yang ketika itu bersama-sama Rais dalam pembuangan maupun pada saat dalam satu organisasi di Parindra yaitu Raden Mahmud Susilo Suwignjo. Rais muda adalah sosok lelaki yang penuh vitalitas atau semangat dan berpendirian kuat untuk membebaskan bangsa dan negaranya dari cengkeraman Belanda. Kepergian Rais dan Gusti Sulung Lelanang sedianya untuk menuntut ilmu di Jakarta, tetapi situasi di Jakarta dan tanah air Indonesia membuat keduanya lebih tertarik pada perjuangan membebaskan tanah airnya dari belenggu penjajahan Belanda. Namun, perjuangan pada dasawarsa kedua abad ke-19 tidak memaksa perjuangan dengan mengangkat senjata, tetapi menyusun persatuan bangsa dengan membangkitkan gerakan kesadaran menuntut Indonesia merdeka (Suwignjo, dkk., 1979: 269).

Rais dibesarkan dalam keluarga Muslim yang taat sehingga ajaran Islam menjadi anutan dalam kehidupannya. Terlihat dari gelar haji yang disandang oleh keluarga besar Rais dari mulai paman dan ayahnya. Rais lahir sekitar tahun 1904 di kampung Parit Mayor yang mayoritas masyarakatnya dari suku Banjar. Kampung Parit Mayor terletak kurang lebih 4,3 km dari pusat kota ke arah selatan melewati jalan tol yang dilalui oleh Sungai Kapuas. Kampung Parit Mayor dikembangkan menjadi Desa Parit Mayor yang terletak di Kecamatan Pontianak Timur, tepatnya sekarang berada di sepanjang Jalan Ya' Muhammad Sabran.

Sebagai anak yang lahir dari keluarga berkecukupan, Rais termasuk anak yang beruntung masuk dalam jajaran golongan intelektual berpendidikan Barat di sekolah Belanda sampai tamat kelas VI di Pontianak. Setelah merampungkan pendidikannya, Rais pergi ke Jakarta sekitar tahun 1920 untuk menemui Gusti Sulung Lelanang yang sedang bersekolah di sana. Namun justru di sinilah, Rais banyak menimba ilmu tentang jurnalis dari beberapa surat kabar yang terbit di Jakarta, seperti *Neratja* (Suwignjo, 1979: 270).

Dari beberapa surat kabar yang disebutkan oleh R. Mahmud, setelah ditelusuri nama Haji Rais tidak terdaftar sebagai pengurus. Maka penulis menduga bahwa keterlibatan Haji Rais kemungkinan sebagai pegawai magang atau penulis artikel dengan nama samaran. Sebagai orang baru dalam bidang jurnalis, Haji Rais banyak belajar dari para seniorinya, yang pada umumnya aktif di surat kabar-surat kabar yang berhaluan keras. Hal ini kelak memengaruhi juga dalam kariernya. Seperti yang diungkapkan oleh R. Mahmud tentang kedekatan Haji Rais dengan beberapa tokoh jurnalis, seperti Parada Harahap (pemimpin redaksi *Bintang Hindia*) dan Djojopranoto (pemimpin redaksi surat kabar *Menjala*).

Rais menikah dengan seorang gadis bernama Sahara binti Dolek, tetangganya di Kampong Parit Mayor. Pernikahan terjadi setelah Rais pulang dari pembuangan dari Tanah Merah Boven Digul, Papua sekitar tahun 1936 dalam usia yang sudah cukup matang yaitu sekitar 32 tahun. Setahun kemudian, lahirlah Latifah sekitar tahun 1937 dan kemudian disusul adiknya Asnah pada tahun berikutnya. Keluarga kecil Rais menetap dan tinggal di Parit Mayor bersama-sama dengan keluarga besarnya, sampai kedatangan Jepang di Kalimantan Barat.

Menurut pandangan Latifah, ayahnya adalah seorang pekerja keras, tampan, dan banyak disukai oleh wanita. Sosok ayah yang tidak terlalu banyak bicara dengan anaknya karena kesibukan beliau untuk mencari nafkah. Selanjutnya, Rais juga seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terutama kepada kedua anaknya yang masih kecil (Wawancara Juni 2019, Keluarga Rais).

Rais lahir dari ayah bernama Haji Abdoerrachman dan ibu bernama Kesum. Kedua suami istri ini melahirkan putra dan putri lima orang anak, yaitu:

1. H. Rais, mempunyai anak: Latifah dan Asnah;
2. Japri, mempunyai anak: Man dan Karim;
3. Asiah, mempunyai anak: Japar;
4. Saimah, mempunyai anak: Said, Arsyad, dan Majid;
5. Salmah.

H. Abdoerrachman, ayah Rais, merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara; dua saudaranya bernama Haji Dullah dan Haji Wakap.

Kebahagiaan Rais tidak berlangsung lama karena istrinya, Sahara, meninggal dunia pada tahun 1942, ketika usia Latifah baru 4 tahun dan Asnah 3 tahun. Dalam waktu beberapa bulan setelah istrinya meninggal, Rais memutuskan untuk menikah lagi. Rais merasa tidak ada waktu untuk menjaga anaknya yang masih kecil-kecil, sedangkan keadaan Pontianak semakin genting dengan kehadiran tentara Jepang. Dengan demikian, pada tahun yang sama (1942), Rais menikah lagi dengan Mursinah, seorang wanita dari Sambas yang bekerja sebagai mantan koki orang Belanda. Sejak itu, Latifah diasuh oleh ibu tirinya (Wawancara Juni 2019).

Kehadiran Jepang di Kalimantan Barat mengubah segalanya, sebanyak 13 organisasi yang bersifat lokal di Kalimantan Barat dibubarkan, seperti Surya Wirawan, Pemuda Muhammadiyah, Persatuan Anak Borneo, dan lain-lain (Rivai, 1978: 40). Sebagai penggantinya dibentuklah organisasi pemuda Nissinkai. Kaum intelektual dan terpelajar merasa gelisah karena selalu dicurigai oleh Jepang. Pemerintah Jepang mulai menangkapi para tokoh pergerakan atau intelektual karena Jepang merasa curiga akan melakukan perlawanan, tanpa terkecuali Haji Rais bin Abdoerrachman.

Untuk menyelamatkan keluarganya dari pengejaran Jepang, Rais memboyong keluarganya ke Singkawang. Pada akhirnya, tahun 1944 Rais ditangkap dan dibunuh oleh Jepang. Sementara itu, anaknya Latifah dan Asnah beserta dengan istrinya Mursinah ditolong dan disembunyikan oleh seorang warga Cina di rumahnya.

Sepeninggal Haji Rais, Mursinah istri Rais menikah lagi pada tahun 1977. Adapun kedua anak tirinya, yaitu Latifah dan Asnah diboyong oleh pamannya bernama Kapi bin H. Dullah ke Kampong Parit Mayor Pontianak. Keduanya diasuh oleh bibinya bernama Saimah dan suaminya bernama Hasan yang bekerja sebagai

pedagang besi bekas di pasar loak. Setelah dewasa Latifah menikah pada tahun 1962 dengan seorang laki-laki pujaan hatinya bernama Abdul Wahid. Pernikahan Latifah dengan Abdul Wahid melahirkan tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, yaitu Sumiati, Suaib, Mulyadi, dan Wahyudi. Keluarga bahagia dan sederhana ini sekarang menetap di Jalan Bukit Raya 1 No. 46 Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat (Wawancara Asnah, Juni 2019)

2. Pemikiran Haji Rais bin Abdoerrachman

Pemikiran Haji Rais bin Abdoerrachman akan dikaji dalam dua fase. Fase pertama pada masa pergerakan hingga mengalami hukuman pembuangan dibuang ke Boven Digul (dalam selubung nonkooperatif). Adapun fase kedua ketika Haji Rais bin Abdoerrachman kembali dari Boven Digul (dalam selubung kooperatif) sampai ditangkap Jepang.

a. Dalam Selubung Non-Kooperatif

"Ini oepah orang yang berdjoeng membela kehormatan tanah air dan bangsa. Boei, boengan dan gantoengan oepahnja.

Kami rela dan ichlas berkorban oentoek kepentingan kehormatan dan kemerdekaan Bangsa dan tanah air.

Saoedara-saoedara tak oesah kasihan melihat dan memandang kami begini ini. Kami tidak minta saoedara-saoedara kasihan, kami hanja minta kepada saoedara-saoedara teroeskanlah perdjoengan kita. Patah toemboeh hilang berganti. Tidak lama lagi Indonesia pasti Merdeka. Belanda pasti enjah dari Borneo."

(Pidato Haji Rais saat akan dibuang ke Tanah Merah, Boven Digul, Irian Jaya; sumber: R. Mahmud Susilo Suwignjo)

Pidato singkat dan mengharukan dari seorang Haji Rais yang menyadari akibat dari suatu perjuangan. Keberanian dan keikhlasan untuk berjuang demi membela kehormatan tanah air dan bangsa menyebabkan Haji Rais dan para tokoh pergerakan rela mengalami penderitaan dalam pembuangan. Ini adalah satu sikap yang sangat menginspirasi dan memberikan pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk membela kebenaran pasti punya risiko yang harus dipertanggungjawabkan.

Sudah menjadi hukum sebab akibat dalam sejarah manusia, bahwa rakyat yang tertindas pasti akan melakukan perjuangan untuk kebebasannya. Dengan adanya penindasan maka akan timbul reaksi berupa perlawanan. Sikap menentang terhadap imperialisme Belanda merupakan bentuk *non-cooperation* dari Haji Rais dan kawan-kawan. Imperialisme Belanda mengakibatkan kesengsaraan dan kemiskinan bagi rakyat Kalimantan Barat, dan ini tidak bisa diterima begitu saja oleh Haji Rais. Kepedulian Haji Rais terhadap rakyatnya terlihat dari sikapnya untuk tidak berkompromi dengan pemerintah Belanda. Dengan demikian, jalan satu-satunya untuk mengeluarkan rakyat dari penindasan adalah mengusir imperialisme Belanda dari Kalimantan Barat. Penindasan ini hampir terjadi di seluruh Indonesia dan semua rakyat mempunyai tujuan dan keinginan yang sama yaitu mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Perasaan senasib, sama-sama tertindas, miskin, dan sikap benci dengan perlakuan penjajah, merupakan benih-benih yang menyatukan rakyat Indonesia dalam bingkai nasionalisme atau kebangsaan.

Sudah sejak berabad-abad bangsa Indonesia mengalami penindasan dan sudah bermacam-macam perlawanan dilakukan untuk mengusir imperialisme, tetapi belum berhasil mencapai apa yang diinginkan. Perlawanan fisik, misalnya, rakyat bersama-sama dengan para tokoh pejuang mengangkat senjata, pada akhirnya mengalami kekalahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya persenjataan dan tidak adanya kaderisasi dalam kepemimpinan. Kemudian, perlawanan dilakukan secara nonfisik pada masa pergerakan nasional yang mulai dilengkapi dengan majunya pendidikan Barat yang bisa menumbuhkan pemikiran dan kesadaran rakyat, bahwa perlawanan tidak harus dengan fisik atau mengangkat senjata, tetapi dengan otak atau ide. Dengan demikian, hampir di seluruh negeri mulai melancarkan perlawanan nonfisik dengan membentuk organisasi maupun menerbitkan surat kabar atau pers sebagai corong dalam menyampaikan pemikiran yang dapat menumbuhkan kesadaran dan mengubah kehidupan rakyat.

1) Pemikiran Politik melalui Organisasi

Awal abad ke-20 merupakan penentuan identitas baru bagi Indonesia, sekaligus menandai makin merosotnya kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Dalam situasi yang sama, Pontianak pun sedang

mengalami proses perubahan untuk menentukan arah baru dalam perjuangan pergerakan. Kesadaran ini dilakukan oleh kalangan intelektual (terdidik) dengan membawa ide-ide pembaharuan yang memengaruhi perubahan-perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Hakikat dari perubahan yang terjadi pada masa ini adalah munculnya ide-ide tentang organisasi atau perkumpulan dan munculnya identitas sesuai dengan latar *sosio-cultural* masyarakatnya. Di Pontianak yang menonjol adalah identitas Islam maupun kesukuan yang semakin kuat untuk menunjukkan jati dirinya. Perkembangan organisasi melahirkan pemimpin-pemimpin baru dari golongan intelektual dalam masyarakat, yang sekaligus membentuk identitas baru dalam masyarakat.

Dua organisasi besar yang mempunyai peranan penting dalam perjuangan Haji Rais adalah Sarekat Islam (SI) dan Sarekat Rakyat (SR). Munculnya dua organisasi ini tidak terlepas dari kondisi sosial politik yang terjadi di Jawa. Kedekatan hubungan dagang antara Kota Ngabang dan pedagang Islam di Surabaya telah mendorong terbentuknya SI di daerah Ngabang. Untuk pertama kalinya pada tahun 1914, SI yang dipimpin oleh Tjokroaminoto ini membuka cabangnya di Ngabang. Asas dan haluan SI untuk memajukan perdagangan, memberikan pertolongan kepada anggotanya, memajukan kepentingan rohani dan jasmani, serta memajukan kehidupan Islam sangat selaras dengan gerakan tokoh elite local sehingga SI berkembang pesat di Kalimantan Barat (Hasanuddin, 2014: 188). Dalam waktu beberapa tahun SI yang digawangi oleh Ibrahim bin Haji Rahmad, sekretaris Haji Umar, bendahara Haji Nasri, dan komisarisi Haji Abdul Kadir, Haji Yusuf, Haji Amin, dan Mohammad Hambal, dapat meluaskan jaringannya ke daerah-daerah, termasuk Pontianak (Hasanuddin, 2014: 187).

Cabang SI Pontianak merekrut anggotanya dari kalangan terpelajar, ulama, guru agama, dan para pedagang Islam. Tampaknya keanggotaan SI dapat menjamah seluruh lapisan masyarakat terutama yang beragama Islam karena ketentuan-ketentuan yang ada menyiratkan keanggotaan SI adalah Muslim. Dasar ideologi Islam melampaui batas kesukuan karena keanggotaan SI bisa saja dari suku Bugis, Arab, Jawa, Minangkabau, dan lain-lain yang ada

di daerah ini. Perkembangan SI didorong juga oleh pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah ini. SI seolah-olah menjelma sebagai satu kekuatan Islam untuk melawan kekuatan Pemerintah Belanda di satu pihak dan kekuatan Cina di pihak lain.

Perkembangan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan pemerintah Belanda walaupun sebenarnya Belanda sendiri telah mengakui SI melalui Gubernur Jenderal Idenburg pada tahun 1913. Meskipun SI tidak diakui sebagai organisasi nasional yang dikendalikan oleh CSI, tetapi hanya sebagai kumpulan cabang-cabang yang otonom (Ricklefs, 2007: 349). Sebenarnya, ini suatu strategi Belanda agar tidak ada konsentrasi massa yang dapat membahayakan kekuasaannya. Strategi lain Belanda untuk membatasi perkembangan SI adalah melarang dan membatasi kegiatan-kegiatan SI, termasuk melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah. Selain itu, Belanda mendukung penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh Missi dan Zending ke daerah pedalaman, yang tujuannya untuk membendung penyebaran Islam di daerah pedalaman.

Haji Rais dan para tokoh pergerakan merasa kecewa karena para pemimpin SI tidak melakukan perlawanan dengan kondisi ini. Ditambah lagi, pelarangan itu berdampak pada mengendornya semangat pemimpin SI untuk melakukan kegiatan. Haji Rais dengan jiwa dan semangat muda bersama dengan para tokoh muda lainnya melakukan gerakan pembelotan. Gerakan ini dipicu oleh konflik yang terjadi di antara para pemimpin SI yang ada di Jawa sehingga menyebabkan pecahnya kepemimpinan dalam organisasi menjadi beberapa kelompok.

Masuknya pengaruh sosialis yang dipropandakan oleh Sneevliet menarik perhatian Semaun, seorang pemuda Jawa buruh kereta api yang aktif dalam organisasi Serikat Buruh Kereta Api dan Trem (VSTP). Semaun berhasil mengembangkan SI cabang Semarang dengan mengambil sikap tegas menentang kapitalis, menolak keikutsertaan SI dalam keanggotaan Volksraad. Sementara itu, Tjokroaminoto tetap memegang SI dengan haluannya dan di sisi lain berkembang Sarekat Islam B yang dipimpin oleh Sosrokardono dari CSI (Ricklefs, 2014: 263). Sikap SI berhaluan kiri (komunis) yang dipimpin oleh Semaun, lebih banyak mendapat dukungan pada Kongres SI tahun 1917, dan juga cabang-cabang SI yang ada di luar

Jawa. Semua perpecahan dalam tubuh SI bermuara pada persaingan untuk memperoleh massa dan kekuasaan.

Propaganda komunis yang dilakukan oleh Semaun, Haji Misbach, dan tokoh-tokoh SI yang berhaluan kiri sangat menginspirasi para tokoh muda SI di Kalimantan Barat. Tampaknya, propaganda Haji Misbach lebih berpengaruh di sini. Haluan komunis Islam yang memaknai bahwa Islam dan komunis adalah sama menjadikan Haji Misbach terkenal sebagai Islam Merah. Dengan adanya propaganda tersebut Haji Rais, Gusti Sulung Lelanang, Ahmad Sood, Gusti Situt Mahmud, Gusti Johan Idrus, dan beberapa tokoh lain memisahkan diri dan membentuk kelompok lain yaitu Sarekat Rakyat.

Sarekat Rakyat terbentuk tahun 1924 setelah melalui suatu pemikiran yang matang. Hal ini karena melihat kondisi rakyat dengan perbedaan yang sangat mencolok antara petani, pekerja perkebunan dengan pemilik tanah dan kebun. Belum lagi, pada setiap krisis, merekalah yang selalu terkena imbas yang paling parah. Kondisi ini semakin sulit dengan adanya persaingan dengan golongan Cina yang semakin banyak dan kuat dalam ekonomi. Hanya satu keinginan para tokoh Sarekat Rakyat saat itu yaitu berjuang untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan yang disebabkan oleh kaum kapitalis. Sarekat Rakyat yang merupakan *underbow* Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jawa sebenarnya lebih bersifat sekuler, sebab mereka lebih mengidolakan masyarakat tanpa kelas pada masa kekuasaan Majapahit sebelum kehadiran Islam dan bangsa Barat. Dengan demikian, mereka lebih mengakui Pangeran Diponegoro, Kyai Maja, dan Sentot sebagai pahlawan PKI. Ramalan-ramalan tentang mesianistis mengenai Ratu Adil dimanfaatkan oleh PKI sebagai propaganda di Jawa (Ricklefs, 2014: 265).

Haji Rais memilih mengikuti Sarekat Rakyat yang digawangi oleh Gusti Sulung Lelanang untuk menentang pemerintah Belanda secara *non-cooperation*, terbuka, dan berani. Visi dari Sarekat Rakyat dirasa cocok dengan gerak perjuangan Haji Rais yang menentang segala bentuk penindasan dan pengisapan kepada rakyat. Propaganda politik yang dilakukan oleh kaum komunis banyak memikat hati kaum pergerakan, termasuk Haji Rais karena sifatnya yang revolusioner, sesuai dengan jiwa muda dan idealisme kaum muda intelektual pada masa itu. Hal ini dimanfaatkan oleh

golongan komunis untuk membakar semangat rakyat Kalimantan Barat. Namun, mereka tidak mengetahui secara mendalam apa sesungguhnya maksud dan tujuan komunis yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari tulisan-tulisan yang ada di *Halilintar* yang berkisar pada penanaman kebencian terhadap imperialisme dan kapitalisme.

Buah pemikiran dan keberanian Haji Rais dianggap berbahaya bagi PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) yaitu lembaga yang didirikan oleh Belanda untuk mengawasi gerak-gerik pers, terutama media massa. Surat kabar *Halilintar* saat itu dianggap telah membangkitkan kesadaran rakyat untuk melawan pemerintah Belanda. Tindakan Haji Rais yang tidak mengindahkan peringatan PID ini membuat beliau dan pengurus *Halilintar* ditangkap dan dijebloskan ke penjara Sungai Jawi. Berdasarkan penuturan dari Raden Mahmud Susilo Suwignjo bahwa Haji Abdoerrachman meminta pembebasan kepada Sultan Syarif Muhammad. Permintaan itu dikabulkan asalkan permohonan maaf itu harus keluar dari mulut Haji Rais, dan bahkan Sultan akan mengangkat Haji Rais sebagai pegawai keraton dengan gaji f 250. Namun, penawaran Sultan ditolak oleh Haji Rais:

“Aku tidak merasa bersalah kepada Sultan. Sampai mati aku tidak mau minta ampun kepada Sultan. Aku hanya mohon ampun kepada Allah SWT sadja. Dan hal itu setiap waktu aku amalkan. Kepada Allah aku memang senantiasa bersalah tetapi kepada Sultan aku tidak perlu minta ampun dan aku pun tidak ingin menjadi Pegawai Keraton menjadi alat penindas rakyat. Kalau Sultan menganggap aku bersalah itu terserahlah. Sultan ada mempunyai kekuasaan” (Suwignjo, dkk., 1979: 275).

Dengan memahami ucapan Haji Rais tersebut maka ideologi atau pegangan hidup yang dijalankan dalam kehidupannya tetap memegang teguh pada ajaran agama. Hal itu tetap tidak berubah sampai akhir hayat Haji Rais. Walaupun ditawarkan kehidupan yang enak dan terjamin masa depannya, itu tidak menjadikan Haji Rais silap mata. Haji Rais tetap ingin berjuang untuk rakyat meski harus hidup tak enak di penjara.

Kiprah Haji Rais dalam dunia jurnalistik dan organisasi Sarekat Rakyat juga mengantarkan Haji Rais ke pembuangan di Boven Digul. Haji Rais dan semua tokoh Sarekat Rakyat, yaitu Gusti Hamzah dari Teluk Melano-Ketapang, Djeranding dari Malapi Kapuas Hulu, Gusti Sulung Lelanang, Gusti Situt Machmud, Gusti Djohan Idrus, Achmad Sood, Achmad Marzuki, Mohammad Hambal, dan

Mohammad Sohor dari Landak diputuskan dibuang seumur hidup ke Tanah Merah, Boven Digul, Irian Jaya (Papua) melalui pengadilan Batavia berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 April 1927 (Listiana, dkk., 2014: 69).

2) **Jurnalists: Cermin Pemikiran Intelektual**

Sudah sejak awal Haji Rais sangat tertarik untuk menggeluti dunia jurnalistik. Segala pemikiran dan idenya ingin disampaikan dalam tulisan dan diterbitkan di majalah ataupun surat kabar. Ketika berada di Jakarta, Haji Rais tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar kepada orang-orang yang dianggap mampu, seperti Haji Agus Salim yang mengelola surat kabar *Neratja*, Parada Harahap pemimpin redaksi *Bintang Hindia*, dan Djojopranoto pemimpin redaksi *Njala* (Suwignjo, dkk., 1979: 270). Ketiga surat kabar ini sangat berani dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda. Hal ini berpengaruh juga pada pemikiran Haji Rais ketika kembali ke Pontianak. Haji Rais ingin berjuang untuk melepaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan di daerahnya melalui pengalaman-pengalaman sewaktu berada di Jakarta.

Dalam kesaksian Raden Susilo Suwignjo, seorang aktivis asal Jawa Timur yang sama-sama mengalami nasib pembuangan di Boven Digul, setelah beberapa tahun di Jakarta, Haji Rais pergi ke Medan terlebih dahulu dan setahun kemudian pulang ke Pontianak dengan membawa dua orang kawan dari keluarga Agus Salim, yaitu Abdul Chalid Salim (ACS - pen) dan Masuwar Masdjid Salim (Jac Salim - pen) (Suwignjo, dkk., 1979: 271). Sekembalinya ke Pontianak, Haji Rais mendirikan surat kabar *Halilintar* bersama dengan kedua kawannya yaitu Abdul Chalid Salim dan Masuwar Salim. Pernyataan dari Raden Mahmud Susilo ini agak membingungkan sebab yang menjadi redaktur surat kabar *Halilintar* yang lahir tahun 1923 adalah S.M. Anwar (Sutan Maulana Anwar), sedangkan nama Haji Rais Abdoerrachman belum muncul di situ. Jika demikian, ada kemungkinan Haji Rais menggunakan nama samaran dalam kiprahnya mengembangkan *Halilintar*.

Ada empat kali terbitan *Halilintar* yang memunculkan nama Abdoerrachman dan M. Noerdin, menggantikan kedudukan dari Bouilly dan SBG Isa yang diberhentikan oleh S.M. Anwar. Akan tetapi, nama samaran ini bisa jadi Djeranding Abdoelrachman yang ketika

itu juga muncul dengan tulisan berjudul “Asal Akoe Dapat Oeang Masa Bodoh”, dan menggunakan nama samaran Abdoelrachman ketika menulis “Hindia di Waktu ini”. Dalam ucapan selamat tahun baru yang dimuat dalam surat kabar *Halilintar* pada 29 Desember 1923, ada tetulis jajaran personel *Halilintar* dan juga personel Drukkerij (percetakan) Hoa Kiaoe, di situ masih tertulis nama Abdoerrachman. Abdoerrachman yang tertulis dalam kepengurusan surat kabar *Halilintar* dibanding dengan nama samaran Djeranding yaitu Abdoelrachman atau Abdoelracman jelas berbeda. Berdasarkan pada kesaksian R. Mahmud Susilo Suwignjo, Djeranding kiprahnya mulai berkembang setelah Sarekat Rakyat ada. Dalam dunia jurnalistik, Djeranding dengan nama Abdoelracman (anak Dayak) aktif setelah *Halilintar* berganti nama menjadi *Halilintar Hindia* bersama dengan Jaya Pranata dan Sutan Sinaro yang merupakan corong dari Sarekat Rakyat (*Halilintar Hindia* No. 44, Tahun 1940). Walaupun sebagai penulis, nama Djeranding sudah ada dimuat dalam *Halilintar* dengan nama samaran Abdoelrachman atau Abdoelracman. Dengan demikian, berdasarkan dua sumber tersebut, Abdoerrachman yang dimaksud dalam *Halilintar* yang terbit tahun 1923 adalah Haji Rais bin Abdoerrachman atau sering juga disebut Abdoerrachman, dan setelah berganti nama *Halilintar Hindia* bisa dipastikan itu adalah Djeranding Abdoelrachman. Penulis semakin yakin bahwa Rais mengasuh sebuah rubrik “Asem Pedas” di surat kabar *Halilintar* dengan nama samaran Momok. Kesimpulan ini didapat dari berita redaksi yang menyatakan bahwa S.M. Anwar dalam keadaan sakit, maka sejak tanggal 22 Oktober segala urusan redaksi diserahkan kepada Abdoerrachman (*Halilintar* No. 15, Saptoe, 23 Oktober 1923: 4). Sementara itu, dalam berita yang dimuat di edisi 10 November, Momok menyatakan dalam rubrik itu bahwa ia diserahi tugas oleh S.M. Anwar karena sedang sakit (*Halilintar* No. 17, Saptoe, 10 November 1923: 1).

Rubrik “Asem Pedas” berisi tentang persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama tentang ketidakadilan yang sering dialami oleh rakyat karena kebijakan pegawai-pegawai pemerintah Belanda yang semena-mena. Rubrik ini diasuh oleh Haji Rais dengan nama samaran Momok. Momok berperan sebagai Dektektive Journalist (jabatan dijelaskan pada saat menulis surat terbuka kepada Resident Borneo Barat di Pontianak dalam *Halilintar* No. 21 Tahun II, Saptoe, 7 Juni 1924, halaman 2) yang menyoroti

tentang ketidakadilan, kemiskinan, dan penindasan yang diterima oleh rakyat akibat dari ulah pegawai Belanda. Kasus seperti si A yang harus menerima hukuman 12 hari dengan tuduhan yang belum jelas oleh seorang tuan yang sakit hati karena tidak lagi mengantarkan makanan (*Halilintar* No. 4, Saptoe, 4 Agustus 1923: 3). Begitu juga dengan kasus Jacob seorang pedagang keliling yang dilaporkan menggelapkan uang oleh saudagar kaya, tiba-tiba disekap di pos polisi selama 5 jam tanpa melihat apa tuduhan itu benar atau tidak (*Halilintar* No. 6, Saptoe, 18 Agustus 1923: 4). Para pedagang menjerit dan harus menerima nasib buruk karena sewa lapak atau tempat yang terlalu tinggi, seenaknya saja pegawai Belanda meminta barang gratis sementara pedagang harus banting tulang mencari uang sewa (*Halilintar* No. 7, Saptoe, 24 Agustus 1923: lampiran h. 3). Momok juga menyoroti tentang berani karena benar takut karena salah, tindakan benar yang dilakukan oleh S. Semaun dengan kapitalisnya, dan karena takut Belanda membuang Semaun dan kawan-kawan (*Halilintar* No. 8 dan No. 9, Saptoe, 8 dan 15 September 1923: lampiran h. 5). Momok mengajak pada kaum miskin, tertindas, hina rendah, kelaparan, buruh, kaum kromo, untuk memperkuat pergerakan. *Belasting* tidak untuk kemakmuran, seperti yang dijanjikan Belanda, tetapi justru menambah kesengsaraan.

Momok mengajukan protes tentang peraturan-peraturan dan masalah-masalah krusial yang terjadi di masyarakat, tetapi oleh pemerintah dibiarkan saja sehingga para pegawai pemerintah tidak ada pengawasan. Momok juga mengungkapkan bahwa dengan sakitnya S.M. Anwar maka ia menjadi pengganti untuk menerima laporan dari Kilat tentang berbagai macam masalah. Masalah tersebut dimuat agar menjadi perhatian pemerintah, seperti *pokrol bambo* (makelar penipu), rentenir, judi gelap, *kampungkart*, penjual minuman keras, rumah-rumah yang digunakan pengisap candu, rumah obat agar dibuka kembali, aturan lelang, pembakaran babi, tanah lapang kebun sayur dijadikan pasar untuk membantu pedagang mencari uang, tanah-tanah yang tidak digarap dipinjamkan kepada orang-orang miskin, orang tua dibebaskan dari *belasting* dan sebagainya, agar semuanya mendapat perhatian pemerintah Kolonial (*Halilintar* No. 17, Saptoe, 10 November 1923: 3).

Pada intinya, rubrik “Asem Pedas” di surat kabar *Halilintar* yang lahir 7 Juli 1923 dan terakhir terbit No. 42 tertanggal 1 November

1924, mewakili suara-suara yang berkembang di masyarakat yang ingin disampaikan kepada pemerintah Belanda dan mendapatkan jalan pemecahannya. Namun, dalam kenyataannya masalah-masalah itu dibiarkan oleh pemerintah dan pegawai pemerintah melakukan pemerasan dan juga korupsi sehingga rakyatlah yang terkena dampaknya.

Sesuai dengan namanya, *Halilintar* berani karena benar takut karena salah, tanpa pandang bulu, membela kepada kaum miskin, teraniaya, tertindas, dan musuh bagi orang yang kejam, penipu, dan penindas. *Halilintar* merupakan surat kabar mingguan kaum buruh di Hindia yang berkantor di moeka Miyako Hotel Blok R No. 48 (Jl. Parit Darat No. 48). Media ini menginginkan dunia aman sentosa serta setiap bangsa dan golongan harus mendudukkan kewajiban masing-masing menurut kemauan dunia, bukan kemauan sendiri-sendiri. *Halilintar* yang digawangi S.M. Anwar ini hanya bertahan sampai November saja. Dengan meninggalnya S.M. Anwar pada 8 Juli 1924, maka pengelolaannya diserahkan kepada T.K. Ng yang hanya sanggup memimpin selama empat bulan. T.K. Ng mengundurkan diri dari kepengurusan *Halilintar* dan pada akhirnya diambil alih oleh *Halilintar Hindia* (*Halilintar* No. 42, Saptoe, 1 November 1924: 3).

Dengan melihat isi *Halilintar*, musuh sebenarnya adalah para pegawai pemerintahan Belanda, yang secara langsung berbuat semena-mena kepada rakyat. Keberatan *belasting* tidak sesuai dengan keadilan yang diperoleh bumiputra. Rakyat menganggap pemerintah Belanda adalah pemerintah yang suci, adil, menjaga keselamatan, tetapi mempunyai pegawai yang serakah. Rakyat meminta agar pemerintah menyelidiki kelakuan-kelakuan pegawainya supaya ketahuan kejahatan yang disembunyikan di dalam badan pemerintah. Hal ini seperti yang ditulis Abdoerrachman bertajuk "Borneo Barat moedah-moedahan mendapat selamat". Tulisan tersebut mengkritik ketidakadilan yang terjadi di negeri Borneo Barat (BB), dalam hal ini rakyat tidak boleh buka suara untuk melaporkan kelakuan para pegawai pemerintah. Apabila melapor, rakyat akan dianggap sebagai musuh dan dengan segala tuduhan palsu hingga masuk penjara. Selain itu, Rais juga mengkritik ketidakadilan pemerintah kolonial di Betawi yang tidak memerhatikan kepentingan di BB dibanding dengan di Jawa, Sumatra, dan yang lainnya yang tidak ada peraturan tentang *kampungkart*. Sementara di BB, *kampungkart* menjadi momok

yang menghantui rakyat. Begitu juga tentang pemilihan pemimpin BB yang seharusnya didasarkan pada *opleiding school* atau setara, tetapi di BB hanya setingkat demang yang pendidikannya setingkat sehingga kapan BB akan maju? (*Halilintar* No. 5 Tahun II, Saptoe, 2 Februari 1924: 3-4).

Sejalan dengan itu, Rais sebagai Momok dalam “Asem Pedas” juga mengkritik pengangkatan Resident, Ass Resident di BB yang akhirnya melindungi para aparat pemerintah agar selamat dari segala perbuatan kotornya dan hanya mementingkan materi (*Halilintar* No. 15 Tahun II, Saptoe, 26 April 1924: 4). Kritik Momok memang bukan secara langsung menunjuk kepada orangnya, melainkan dengan sindiran. Keprihatinan Momok terhadap Borneo diungkapkan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Resident Borneo Barat. Pada intinya, isi surat tersebut adalah mempertanyakan tentang penyelesaian kasus-kasus yang ada di Pontianak: pemilihan pegawai dalam satu distrik ada ikatan famili, *ambtenaar* yang suka mabuk-mabukan, tentang warung-warung di pinggir jalan, perempuan-perempuan nakal, peraturan tentang *kampungkart*, ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman dan tidak segera diproses, dan lain sebagainya (*Halilintar* No. 21 Tahun II, Saptoe, 7 Juni 1924: 2-3). Momok akan selalu mendukung *Halilintar* dalam menyuarakan kepentingan rakyat walaupun S.M. Anwar akhirnya meninggal 8 Juli 1924 pukul 8 malam (*Halilintar* No. 26 Tahun II, Saptoe, 12 Juli 1924: 3).

Apa yang menjadi tujuan dan maksud dari rubrik “Asem Pedas” menggambarkan keinginan dan pemikiran dari Rais yang selalu membela kebenaran dan menghukum yang salah. Rais juga tidak senang dengan ketidakadilan dan kesengsaraan yang diterima rakyat pada masa itu. Melalui “Asem Pedas” Rais mengkritik tajam siapa saja yang menindas rakyat. Pemikiran Rais bahwa pers menjadi satu-satunya cara untuk menyuarakan kondisi rakyat agar pemerintah pusat di Betawi mengetahui keadaan yang sebenarnya di Borneo Barat, karena rakyat selalu diancam oleh penguasa Borneo Barat apabila melakukan pengaduan. Dengan demikian, pers menjadi corong bagi kondisi sosial politik dan ekonomi di Borneo Barat.

b. Pemikiran dalam Selubung Kooperatif

Masa pagi menjiar tjahaja

Dalam toer soepaja jaga

Poetra poetri mari bersatoe !

Borneo Baroe toedjoean kita !

Borneo Moelia toedjoean kita !

Poetra- poetri mari bersatoe !

(Goesti Soeloeng Lelanang)

“Pemuda itu itu harapan bangsa, pemuda itu tiangnya negara, pemuda bunga bangsa.”

Kata-kata bijak yang maknanya sangat mendalam, yang menggambarkan pengharapan bangsa dan negara terhadap peran para pemuda. Kata-kata itulah yang menjadi penyemangat bagi para pemuda di zaman pergerakan. Sudah saatnya para pemuda membangun dirinya ikut terjun dalam masyarakat dengan berorganisasi, seperti Parindra dengan Surya Wirawan, perkumpulan kecil-kecil dengan barisan pemuda, dan PAB (Persatoean Anak Borneo) dengan BKPAB (Badan Keboedajaan Persatoean Anak Borneo) (MD, “Pemoeda”, *Kesedaran* No. 2 Tahun II, Februari 1940: 9). Tumbuhnya organisasi-organisasi *underbow* mempersiapkan para pemuda untuk menjadi kader-kader pemimpin selanjutnya.

Kesadaran para pemuda untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, bukan hanya untuk menjadi buruh ataupun pegawai pemerintah karena lapangan pekerjaan lain yang juga menjanjikan perlu juga diolah secara modern, seperti hutan, pertanian, peternakan dan juga kerajinan tangan yang kita miliki (Arifin Anwar, “Kontak dengan masa”, *Kesedaran* No. 8 Tahun II, Augustus 1940). Pada masa ini, para pemuda diharapkan meningkatkan kemampuan di segala bidang melalui pendidikan. Selain itu, perubahan orientasi dalam tujuan pendidikan, tidak lagi hanya mengajar untuk menjadi pegawai pemerintah, tetapi membuka peluang-peluang di bidang lain.

Pemikiran-pemikiran para tokoh nasionalis pada masa ini terlihat dari tulisan tersebut, bagaimana mereka memosisikan sebagai agen perubahan dalam bidang sosial budaya dan ekonomi. Hal ini merupakan pencerminan dari kondisi pada masa itu yaitu ketatnya peraturan dan larangan-larangan dari pemerintahan Belanda yang takut kehilangan kekuasaannya di Hindia. Gerakan-gerakan politik dilarang dan hanya ada dua organisasi yang hidup pada saat itu, yaitu Parindra (Partai Indonesia Raya) dan PAB (Persatoean Anak Borneo).

1) Pil Pahit Perjuangan

Selama dalam pembuangan, Haji Rais belajar banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh komunis yang dikenal selama ini. Menurut kesaksian R. Mahmud Susilo Suwignjo, pada saat di Boven Digul atau Tanah Merah Haji Rais ditempatkan di Kampong B bersama dengan dirinya dan juga kawan-kawan lain dari Kalbar selain Mohammad Sohor. Selama dalam pembuangan terjadi pertentangan antara para pemimpin komunis yang sama-sama dibuang. Haji Rais merasa kecewa terhadap tokoh komunis yang saling melepas tanggung jawab dan cuci tangan dan saling bermusuhan. Nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi para tokoh pergerakan Kalbar ternyata tidak ada artinya bagi ajaran komunis. Masih menurut kesaksian R. Mahmud kalau memang Haji Rais seorang Marxis atau komunis maka selama dalam pembuangan bisa saja Haji Rais belajar ideologi politik di sini, tetapi malah memilih mengikuti kursus bahasa, yakni bahasa Arab, Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. Untuk bahasa Belanda dan Inggris Haji Rais menjadi gurunya, sebab sebelum dibuang dua bahasa ini telah dikuasai (Suwignjo, dkk. 1979: 211).

Dengan dicabutnya *besluit* pengasingan oleh Gubernur Jenderal B.C. de Jonge (1931-1936) maka Haji Rais kembali ke Pontianak pada tahun 1932. Selama enam tahun Haji Rais tidak aktif dalam pergerakan, Haji Rais berfokus pada rumah tangganya yang baru dibina sekembalinya dari pengasingan. Namun, dengan kembalinya Gusti Sulung Lelanang pada tahun 1938, Haji Rais kembali aktif untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi rakyat Kalimantan Barat. Haji Rais dan kawan-kawan memilih Parindra sebagai sarana perjuangan mereka, karena Parindra bisa mengantarkan pada cita-cita perjuangan mereka.

2) Pemikiran Nasionalis: Partai Indonesia Raya (Parindra)

Parindra merupakan organisasi yang didirikan oleh golongan pergerakan kebangsaan pada tahun 1935 di Jawa. Organisasi yang digawangi oleh Dr. Soetomo ini mendapat sambutan yang baik dari para tokoh di Kalimantan Barat, karena sudah lama organisasi politik mengalami mati suri. Selain keanggotaannya menampung semua masyarakat tanpa memandang suku atau agama, untuk mencapai persatuan Indonesia, Parindra dalam programnya mencantumkan: memperkokoh semangat persatuan kebangsaan Indonesia, menjalankan aksi politiknya hingga diperoleh hak-hak lengkap dalam politik dan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme, dan memajukan perikehidupan rakyat dalam hal ekonomi dan sosial (Suwignjo, dkk., 1979: 159). Pada tahun 1936 berdirilah organisasi nasionalis Parindra di Kalimantan Barat yang dinakhodai oleh Raden Koempoel dan kawan-kawan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama berdirilah cabang-cabang Parindra di daerah Kalimantan Barat. Dengan masuknya para tokoh pergerakan eks-Digulis, perkembangan Parindra tidak dapat lagi dibendung oleh pemerintah Belanda. Dukungan terhadap Parindra juga diberikan oleh para kerabat keraton yang tentu saja masih mempunyai karisma dalam menggerakkan massa di Pontianak. Syarif Husein bergelar Pangeran Adipati bersama-sama dengan para kerabat keraton sebanyak 30 orang, telah ikut menghadiri rapat yang diselenggarakan pertama kalinya oleh Parindra di gedung bioskop "Excelent" (bioskop Khatulistiwa) (Rahman, 2000: 146). Dalam waktu tiga tahun mampu menyelenggarakan konferensi daerah pertama di Singkawang. Dalam konferensi tersebut selain mendukung keputusan Kongres Parindra di Bandung (1938) juga berhasil mengangkat pimpinan baru yaitu R. Mahmud Susilo Suwignjo (eks-Digulis) menjadi ketua wilayah Kalbar (Suwignjo, dkk., 1979: 160).

Tindakan kooperatif diambil oleh Haji Rais dan kawan-kawan karena pengalaman pahit yang pernah dialami oleh para tokoh pergerakan pada sekitar tahun 1927 yaitu dibuang ke Boven Digul karena perlawanan kerasnya. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan kemerdekaan jalan yang harus ditempuh adalah dengan cara tidak harus menentang pemerintah (kooperatif). Jasa mereka adalah pemikiran-pemikiran untuk mengembangkan jaringan organisasi

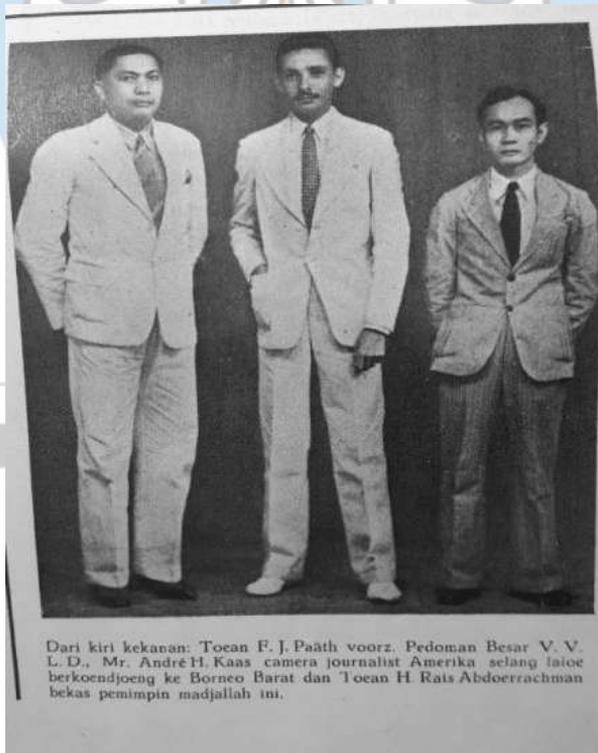
Parindra sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dengan terbentuknya organisasi kepemudaan Surya Wiryawan sebagai *underbow* Parindra mempunyai misi pengaderan dan usaha pendidikan, yaitu kursus kader politik, pendidikan dengan mendirikan lima sekolah rakyat, kesenian, dan olahraga (Hasanuddin, 2014: 195).

3) Membelokkan Haluan: Persatuan Anak Borneo

Berdasarkan pidato yang disampaikan oleh R.M. Nalaprana pada rapat pertama PAB 24/25 Desember 1939 yang bertempat di rumah perhimpunan PAB Voorstraat 67 Pontianak bahwa pada 28 Mei 1939 berdirilah organisasi Persatuan Anak Borneo (PAB) yang bersatu berusaha sendiri memperbaiki keadaan penduduk Kalimantan Barat, tanpa menyerahkan begitu saja kepada pemerintah (*Kesedaran* No. 2 Tahun II, Februari 1940: 12). Dengan begitu, PAB yang dibentuk atas dukungan pemerintah Belanda yang bertujuan untuk membendung perkembangan organisasi Parindra, memberikan kepercayaan kepada Nalaprana untuk membentuk PAB. Belanda tahu bahwa Parindra sebagai organisasi yang bersifat nasionalis akan berkembang menjadi suatu kekuatan yang besar yang akan mengancam kedudukan Belanda di Kalimantan Barat. Untuk itu, Belanda memilih Raden Muslimun Nalaprana, seorang demang di Pontianak lulusan OSVIA (*Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren*). Perkembangan PAB pun cukup besar karena didukung oleh kaum terpelajar dari elite tradisional dan pegawai Belanda. Dalam perkembangannya Raden Muslimun Nalaprana menyadari maksud dan tujuan pemerintah Belanda yang akan mengadu domba PAB dengan Parindra. Maka Raden Muslimun Nalaprana mengajak para tokoh pergerakan eks-Digulis untuk mendukung PAB yang pada hakikatnya untuk membangkitkan harga diri putra daerah, dan mendorong para pemuda untuk belajar agar tidak ketinggalan dari daerah lain (Soedarto, dkk., 1978/1979).

Ajakan ini disambut baik oleh Gusti Sulung Lelanang, Haji Rais, dan kawan-kawan sebab tokoh-tokoh Parindra sendiri mempunyai keinginan rahasia untuk memanfaatkan PAB sebagai alat perjuangan. Sedianya PAB didirikan oleh Belanda untuk memisahkan kaum intelektual elite tradisional atau bangsawan dari pergerakan nasional. Namun, dengan masuknya Gusti Sulung Lelanang, dan Ya'

Sabran dalam level kepengurusan, Haji Rais dalam urusan jurnalis, maka para elite tradisional dapat memengaruhi organisasi PAB untuk bergerak di bidang kemajuan pendidikan dan kebudayaan (Soedarto, dkk., 1978/1979: 209). Dalam perkembangannya, PAB banyak mendirikan sekolah yang bukan saja untuk golongan bangsawan, melainkan juga untuk masyarakat umum seperti INS (*Inheemsch Nederlandsche School*). Semangat nasionalisme menjiwai para pemimpin PAB, dengan mengecam kebijakan pemerintah Belanda yang diskriminatif terhadap Parindra. Ini merupakan keberhasilan dari para pemimpin eks-Digulis dalam penyusupan mereka di tubuh PAB, untuk membelokkan tujuan dari PAB. Hasil kolaborasi antara Parindra dan PAB adalah terpilihnya R.M. Nalaprana sebagai wakil Borneo Barat dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad).



Gambar 2.2 Haji Rais bin Abdoerrachman bersama rekan pers
(Sumber: *Kesedaran* No. 2, Februari 1940)

Posisi Haji Rais sangat strategis yaitu menjadi redaktur dalam majalah mingguan selama enam edisi yang diterbitkan oleh PAB. Jabatan ini memberikan keleluasaan bagi Haji Rais untuk mengarahkan majalah *Kesedaran* untuk mempropagandakan pentingnya jurnalis sebagai wadah untuk menyampaikan pemikiran ekonomi, sosial, politik, maupun budaya demi kemajuan rakyat dan bangsa. Bidang pendidikan yang mandiri menjadi sangat penting agar membuka cakrawala kesadaran agar tidak bergantung kepada orang lain. Dengan pendidikan, rakyat dapat memahami perkembangan dunia pers yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

c. Pemikiran tentang Kemandirian

1) Mandiri dalam Pers

Pada saat *openbare* (rapat umum) PAB, H. Rais dipercaya untuk berbicara mengenai pers. Dalam pidatonya, terlihat H. Rais sangat menguasai dunia pers, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pendapat Rais bahwa pers bermanfaat bagi kemajuan di segala bidang, baik ekonomi, sosial, *onderwijs* (pendidikan), maupun politik. Selanjutnya, pers merupakan organ penting dalam sebuah organisasi. Organisasi yang besar perlu mengeluarkan penyiaran agar dapat menarik perhatian masyarakat. H. Rais mencontohkan beberapa perhimpunan seperti Parindra dengan organ *official*-nya *Soeara Parindra*. Di samping itu, organisasi ini mengeluarkan juga surat-surat kabar yang bersifat komersial, tetapi tidak jauh dari asas dan tujuan perhimpunan, yaitu *Soeara Oemoem*, *Tempo* di Surabaya. Perhimpunan Muhammadiyah dengan organ *official*-nya *Soeara Moehammadijah* dan perhimpunan istri Muhammadiyah yaitu Aisyiah dengan organ *official*-nya *Soeara Aisjiah*. Di Borneo Barat, PAB dengan organ *official*-nya majalah bulanan *Kesedaran*. Selanjutnya, H. Rais juga menyampaikan pandangannya tentang dunia pers generasi muda antara umur 11 sampai dengan 18 yang dikenal dengan "Children Bussines". Anak-anak di Amerika telah maju dengan dunia pers, banyak surat kabar dan juga perhimpunan-perhimpunan yang dikelola oleh anak-anak remaja. Kenapa anak-anak sudah begitu tinggi kecerdasannya? Menurut H. Rais hal ini disebabkan anak-anak di sana lebih lekas membaca surat-surat kabar (*Kesedaran* No. 2 Tahun II, Februari 1940: 11).

H. Rais dalam pidatonya juga membandingkan keadaan pers di negara yang demokrasi dan fasis (otoriter). Dalam negara demokrasi, pers mengambil peran penting dalam masyarakat dan pemerintahan, bahkan pers bisa menjadi suara rakyat untuk membatalkan atau menyetujui sebuah rancangan pemerintah. Sebaliknya, di negara fasis, suara-suara yang dikeluarkan oleh surat kabar bukan suara rakyat, melainkan suara-suara tukang surat kabar yang telah ditutup mulutnya oleh pemerintah sehingga yang keluar adalah suara pemerintah. Sudah tidak ada lagi kemerdekaan pers di sini.

H. Rais juga sekilas menggambarkan perkembangan pers pada masa lalu, sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Kebanyakan surat kabar pada masa itu dipimpin dan dikemudikan oleh pemimpin-pemimpin perkumpulan politik, baik yang berhaluan kebangsaan maupun berdasarkan politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau surat kabar yang dikeluarkan bangsa kita memperdengarkan suara yang berapi-api. Ditambah lagi dengan *presbreidel* (pemberedelan pers) yang membuat surat kabar gulung tikar. Berbeda dengan masa ini, pers sudah banyak memberikan perubahan. Dari pidato tersebut maka dapat dipahami bahwa Haji Rais secara tidak langsung mengungkapkan kondisi pers yang ada di Kalimantan Barat. Dengan berani, H. Rais mengatakan bahwa pers saat itu tidak *gematigd* (agak longgar) dan tidak lagi dipimpin oleh *leader-leader* lagi.

Dengan memahami pemikiran Haji Rais tersebut maka yang perlu digarisbawahi adalah tentang kesadaran bahwa pers masa itu digunakan sebagai corong suara pemerintah, bukan lagi sebagai corong suara rakyat. Kesadaran ini membuat H. Rais mengambil suatu keputusan untuk mundur sebagai pimpinan majalah *Kesedaran* pada tahun 1939. Majalah yang sejak awal dipegang oleh Haji Rais, mulai edisi nomor 1 sampai dengan nomor 6. Sayang sekali, penulis belum berhasil menemukan majalah *Kesedaran* edisi tahun tersebut.

Haji Rais memilih untuk menjadi orang bebas atau independen yang bisa menulis apa saja, tanpa ada keterikatan dengan organisasi tertentu. Hal ini dikatakan oleh pemimpin PAB dalam ucapan terima kasih kepada Haji Rais atas nama *Redactie-Commissie* dan H.B. PAB, termuat dalam majalah *Kesedaran* No. 1 dan 2 Tahun II 1940

halaman 23. Meskipun sudah tidak menjadi pengemudi *Kesedaran*, Haji Rais berjanji untuk tetap mengirimkan buah penanya kepada majalah tersebut. Pada hakikatnya, keputusan mundur dari redaktur *Kesedaran* karena Haji Rais ingin lebih bebas memberikan pertolongan kepada rakyat siapa pun dan dalam hal apa pun, seperti terlihat dari iklan yang dipasang di majalah *Kesedaran*. Perjuangan Haji Rais sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, maka beliau lebih tertarik untuk membantu perjuangan bangsa melalui bidang jurnalistik.

2) Mandiri dalam Ekonomi

Surat kabar *Halilintar* edisi akhir tahun 1923 menyebutkan Rais sebagai salah satu pengurus yang mengucapkan selamat tahun baru. Hal itu membuktikan bahwa keterlibatan Rais dalam pengelolaan *Halilintar* masih terus berlanjut. Selama berkecimpung dalam surat kabar maupun majalah, Rais selalu mendukung pada pemikiran-pemikiran tentang kemandirian dalam bidang ekonomi, baik pada saat mengelola surat kabar *Halilintar* maupun majalah *Kesedaran*. Pemikiran Rais dalam sosok Momok menyuarakan kepada masyarakat di Pontianak bahwa tidak perlu mengandalkan untuk meminjam uang dari V.C. Bank. Hal ini karena selain akan dipersulit secara administrasi, juga harus memberi tip kepada pegawai bank dengan persenan: 10% dari peminjaman f 1.000, 20% dari f 2.000 (*Halilintar* No. 28 Tahun II, Saptoe, 26 Juli 1924: 3). Kemandirian ekonomi penting agar rakyat tidak bergantung kepada pemerintah atau rentenir atau *pokrol bamboe*. Pemikiran Rais sejalan dengan pemikiran yang berkembang pada saat itu. Rais berusaha untuk memberikan dorongan kepada kaum muda untuk tidak terlilit utang.

Wujud kemandirian ekonomi yang disuarakan Haji Rais tidak hanya dalam bentuk pemikiran saja, tetapi benar-benar dilakukan dalam kehidupan pribadinya. Haji Rais memilih menjadi pengacara atau konsultan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Berikut contoh iklan dari Haji Rais bin Abdoerrachman (*Kesedaran* No. 2 Tahun II Februari, hlm. 21).

Kabar baik dan bergoena

Sedia memberikan pertolongan

Djika toean mendapat hal, ada oeroesan, ada perkara
atau hendak bertanyakan tentang sesoeatoe hal dan
sebagainja, mintalah pertolongan pada:

HADJI RAIS ABDOERRACHMAN

H. Toolweg No. 30 Pontianak

Vertegenwoordiger

v/h Administratiekantoor "Bahagia"

Sultanweg no. 9 Pontianak

C. Simpulan

Pada awal abad 20 hingga kedatangan Belanda, masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Politik etis yang dilandasi oleh kemanusiaan sebagai balas jasa terhadap daerah jajahan, dalam praktiknya hanya berupa janji-janji belaka dan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa pun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, muaranya pada kepentingan ekonomi dan politik saja.

Perluasan pendidikan Barat yang dilakukan oleh Belanda, sejatinya juga untuk kepentingan ekonomi dan juga politik. Demi mendapatkan tenaga-tenaga terdidik dan murah untuk mengisi jabatan-jabatan rendah dalam birokrasi pemerintahannya, Belanda membuka kesempatan pendidikan kepada kaum pribumi. Kesempatan itu pun terbatas hanya kepada kalangan tertentu yang diharapkan tetap loyal kepada pemerintah Belanda. Dampak dari

pendidikan Barat yang tidak direncanakan oleh Belanda adalah pembelotan dari sebagian kaum terdidik terhadap kebijakan pemerintah Belanda. Tumbuhnya pemikiran dan kesadaran akan situasi yang terjadi di masyarakat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda yang sangat menyengsarakan kehidupan rakyat jajahannya menjadi titik tolak untuk melakukan perlawanan.

Kaum terdidik atau intelektual yang sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari masyarakat mampu menjadi agen perubahan dan sekaligus *leader* dalam aksi perlawanan. Kaum intelektual Kalimantan Barat yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan perubahan kehidupan bagi masyarakatnya adalah Haji Rais bin Abdoerrachman dan kawan-kawan yang tergabung dalam tokoh-tokoh perintis kemerdekaan.

Haji Rais bin Abdoerrachman terkenal sebagai seorang jurnalis andal yang mampu membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pers. Haji Rais beranggapan bahwa pers mempunyai peran penting dalam perjuangan untuk melakukan perubahan dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Bangkit dari kemiskinan dan kebodohan, serta perlawanan terhadap kekuatan yang menindas rakyat, merupakan hal yang harus disampaikan oleh kaum intelektual kepada masyarakat. Pemikiran tersebut terlihat jelas dalam rubrik “Asem Pedas” yang diasuhnya di surat kabar *Halilintar* dan tulisan-tulisannya di majalah *Kesedaran*. Walaupun pada kenyataannya *Halilintar* yang dinakhodai oleh S.M. Anwar semakin merosot dengan meninggalnya beliau. T.K. Ng sebagai penggantinya hanya bertahan selama empat bulan karena mengundurkan diri sebagai pengurus *Halilintar*. Setelah itu, kepengurusan menjadi mandek dan diambil alih oleh *Halilintar Hindia*.

Kemampuan jurnalistik yang dipelajari Haji Rais selama di Jakarta dimanfaatkan untuk mengelola beberapa media yang terbit di Kalimantan Barat. Rais menjadi pengasuh rubrik “Asem Pedas” di surat kabar *Halilintar* yang terbit selama kurang lebih dua tahun dari Juli 1923 sampai dengan November 1924. Rais juga ikut membidani kelahiran majalah *Kesedaran* yang merupakan media dari organisasi PAB, sebelum Rais mengundurkan diri sebagai pengurus.

Pemikiran-pemikiran Haji Rais tentang kemandirian dalam segala bidang disampaikan kepada masyarakat melalui pers. Hal ini untuk mendorong masyarakat agar tidak bergantung kepada orang lain atau pemerintah Belanda. Kemajuan pers di Kalimantan Barat tidak terlepas dari dukungan dan peran Haji Rais yang aktif di dunia jurnalistik.

Dukungan dan peran Haji Rais dalam perkembangan organisasi kebangsaan juga tak kalah penting. Keterlibatan dalam organisasi Sarekat Islam, Sarekat Rakyat, Parindra, dan PAB menjadi bukti perjuangan Haji Rais. Beliau pun rela mendekam di penjara dan dibuang ke Boven Digul karena aktivitas politiknya. Pidato-pidato Haji Rais dalam kunjungannya ke berbagai daerah, mendorong generasi muda untuk mencintai pers dengan membandingkan kemajuan pers di negara-negara maju. Keinginan Haji Rais untuk membela rakyat yang sedang dalam kesusahan menjadi bagian dalam kiprah beliau hingga sampai akhir hidupnya ditangkap Jepang dalam usia yang masih muda yaitu empat puluh tahun.

Akhirnya, penulis berharap kajian tentang tokoh Haji Rais bin Abdoerrachman ini dapat berbuah manfaat. Lebih jauh, perjuangan Haji Rais dan kawan-kawan melalui pemikiran-pemikirannya tersebut dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda.

Selanjutnya, penulis juga menyarankan agar pemerintah dan masyarakat lebih banyak mengkaji pemikiran-pemikiran tokoh pejuang Kalimantan Barat dalam bidang apa pun yang akan berperan sebagai suri teladan bagi generasi penerus.

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Benda, Harry J. 1983. "Kaum Intelegensia Timur sebagai Golongan Elite Politik" dalam Sartono Kartodirdjo (Penyunting). *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Hasanuddin. 2014. *Pontianak Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Listiana, Dana, dkk. 2014. *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Rahman, Ansar. 2000. *Syarif Abdurrahman Alqadrie: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Edisi 3. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Soedarto, dkk. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Suwignjo, R. Mahmud Susilo, dkk. 1979. *Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia dari Kalimantan Barat*. Bandung: Belum Diterbitkan.

Surat Kabar dan Majalah

Halilintar Nomor 4, 4 Agustus 1923.

Halilintar Nomor 6, 18 Agustus 1923.

Halilintar Nomor 7, 24 Agustus 1923.

Halilintar Nomor 8, 8 September 1923

Halilintar Nomor 9, 15 September 1923.

Halilintar Nomor 15, 23 Oktober 1923.

Halilintar Nomor 17, 10 November 1923.

Halilintar Nomor 5 Tahun II, 2 Februari 1924.

Halilintar Nomor 15 Tahun II, 26 April 1924.

Halilintar, Nomor 19 Tahun II, 24 Mei 1924.

Halilintar Nomor 21 Tahun II, 7 Juni 1924.

Halilintar Nomor 26 Tahun II, 12 Juli 1924.

Halilintar Nomor 42 Tahun II, 1 November 1924.

Halilintar Hindia Nomor 44, 13 November 1924.

Madjalah Boelanan Kesedaran Nomor 1 Tahun II, Januari 1940.
Madjalah Boelanan Kesedaran Nomor 2 Tahun II, Februari 1940.
Madjalah Boelanan Kesedaran Nomor 8 Tahun II, Agustus 1940.

Informan

1. Keluarga Haji Rais, Jl. Bukit Barisan 1 No. 46, 24 Juni 2019.
2. Nenek Latifah dan keluarga Haji Rais, 25 dan 27 Juni 2019.
3. Asnah, Jl. M. Ya' Sabran Kampung Parit Mayor, 29 Juni 2019.
4. Anak Asnah, Jl. M. Ya' Sabran Kampung Parit Mayor, 1 Juli 2019.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

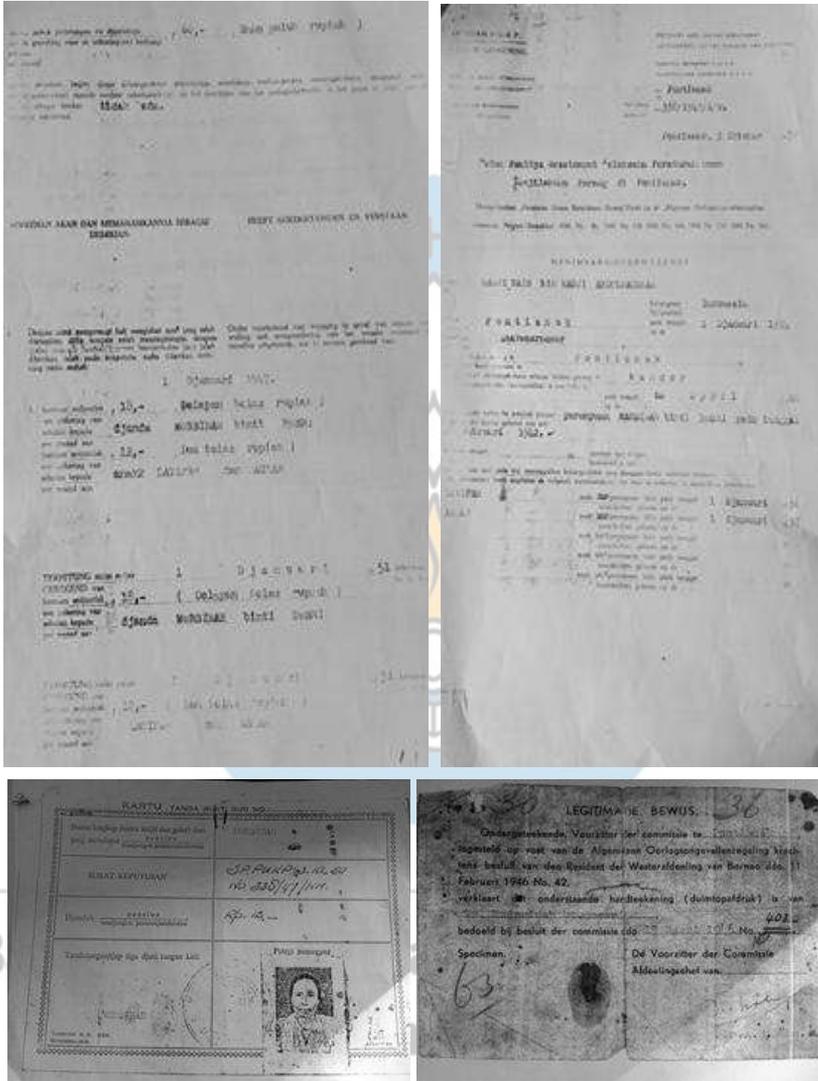
LAMPIRAN



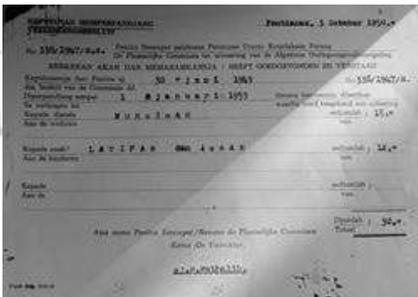
Gambar 2.3 Surat kabar *HaliLintar*, 24 Mei 1924



Gambar 2.4 Surat Keputusan sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan (Sumber: Dokumen Keluarga H. Rais Abdoerrachman)



Gambar 2.5 Dokumen waris keturunan Haji Rais bin Abdoerrachman
(Sumber: Dokumen Keluarga H. Rais Abdoerrachman)



Gambar 2.6 Dokumen waris keturunan Haji Rais bin Abdoerrachman (Sumber: Dokumen Keluarga H. Rais Abdoerrachman)



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB 3

Indonesia dalam Penciptaan Nasionalisme Borneo: Rasa Kebangsaan Persatoean Anak Borneo dalam Majalah *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda* di Kalimantan Barat Tahun 1940¹

Dana Listiana

Historiografi tentang nasionalisme Indonesia cenderung menampilkan gagasan nasionalisme Indonesia dan menonjolkan sifat non-kooperasi (Miert, 2003: xx-xxv). Padahal, sebagaimana disampaikan dalam bagian pendahuluan, kenyataan sejarah di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan keragaman bentuk gejala nasionalisme yang mengawali atau mengiringi terjadinya nasionalisme Indonesia. Belakangan, sejumlah sejarawan mengungkap gejala nasionalisme di luar narasi umum nasionalisme Indonesia.

Keragaman ide nasionalisme ditunjukkan oleh tiga tulisan dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11, No. 1, April 2014, yakni “Akar-Akar Kanan Daripada Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesejarahannya” karya Farabi Fakhri (2014: 37-49); “Gerakan Teosofi dan Pengaruhnya Terhadap Kaum Priyayi Nasionalis Jawa 1912-1926” karya Pradipto Niwandhono (2014: 25-36); dan “Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia

¹ Dipresentasikan pada Seminar Hasil Penelitian BPNB Kalimantan Barat “Merajut Pemikiran Bangsa, Menggali Warisan Budaya Kalimantan, 2-5 November 2019 di Bengkayang. Draf tulisan pertama kali dipaparkan pada Seminar Hasil Penelitian BPNB Se-Indonesia di Samsir, April 2019. Adapun hasil akhir tulisan dipresentasikan pada Seminar Hasil BPNB Kalimantan Barat di Bengkayang, November 2019. Terima kasih pada Kamaruzzaman Busthamam Ahmad, Jhonson Pardosi, dan Asvi Warman Adam atas berbagai masukan untuk tulisan ini.

Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo, dan Douwes Dekker 1912–1914” karya Wildan Sena Utama (2014: 51–69). Ketiga tulisan tersebut menyoroti ide para tokoh pergerakan di Jawa dan sama-sama berpendapat bahwa kemunculan gagasan nasionalisme merupakan hasil pertemuan pengetahuan Barat dan pengetahuan Jawa yang mewujudkan sebagai modernitas masyarakat. Perbedaannya, Farabi secara spesifik mengajukan tiga bentuk nasionalisme yang muncul dari kalangan bangsawan Jawa, yaitu 1) nasionalisme romantis yang bersifat konservatif akibat pertemuan sentimen keadiluhungan budaya Jawa dengan irasionalitas teosofi, 2) nasionalis yang revolusioner dan progresif akibat pertemuan cara pandang Jawa dengan Marxisme, 3) nasionalis Jawa penganut aristo-demokrasi akibat pertemuan feodalisme Jawa dengan sosialisme. Adapun Pradipto berpendapat bahwa gerakan teosofi para orientalis Barat yang memunculkan kultus peradaban Hindu-India telah membangkitkan kultus kebudayaan kuno-Hindu Jawa di kelompok bangsawan Jawa. Gagasan tersebut menghasilkan nasionalis aliran asimilasi seperti pada sebagian anggota organisasi Boedi Oetomo, Tri Koro Dharmo, dan Jong Java. Sementara itu, Wildan mengajukan kemunculan nasionalisme anti-imperialis yang bersifat politis. Nasionalisme yang ditunjukkan melalui konsep “Hindia” yang dikemukakan oleh tiga serangkai merupakan pionir konsep bangsa Indonesia.

Studi lain ditulis oleh Pradipto Niwandhono (2011) berjudul *Yang Ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia*. Studi ini mengajukan sebuah bentuk nasionalisme Indonesia yang dihasilkan oleh kelompok Indo-Eropa di Indonesia masa kolonial, yakni “nasionalisme Indis”. Pradipto tidak saja menjelaskan *term* “nasionalisme Indis”, tetapi juga menjelaskan subjek dan situasi sosial pengkreasi *term* tersebut. Untuk menjelaskan kedua hal terakhir, Pradipto juga menggunakan pendekatan sejarah sosial. Studinya mengajukan bahwa “nasionalisme Indis” merupakan kesadaran dan selanjutnya gerakan emansipasi kelompok Indo yang muncul akibat kebijakan rasialis pemerintah kolonial. Sumbangan yang utama dari “nasionalisme Indis” adalah pelibatan kelompok multi-ras, bukan hanya multi-etnik karena kelompok Indo juga mencakup percampuran ras lain, seperti Cina, Arab, dan tentu saja berbagai etnik di Indonesia.

Studi nasionalisme dalam bingkai organisasi pergerakan dikerjakan oleh Hans van Miert (2003) dalam bukunya: *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918–1930*. Van Miert membahas perkembangan ideologi dalam dinamika gerakan kepemudaan di Jawa dan Sumatra. Meski pergulatan ide yang diungkap lebih bersandar pada dokumen-dokumen resmi kolonial, studi van Miert telah mengisi kekosongan historiografi bertema nasionalisme di luar Jawa. Bentuk-bentuk nasion di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi dipotret, bagaimana ide nasion terbentuk, berpisah, mencair, ataupun melebur pun digambarkan. Nasion Indonesia mulai masuk ke dalam organ pergerakan berdasar daerah atau agama sejak 1925 atas pengaruh gagasan organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda.

Studi-studi tersebut menunjukkan diversitas corak nasionalisme sangat besar, bahkan dalam cakupan kecil teritorial. Sayangnya, studi nasionalisme masih terbatas menangkap gejala yang muncul di Jawa (dan sebagian kecil Sumatra), tempat yang selama ini dipahami sebagai pusat pengumpulan ide nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu, patut diduga bahwa nasionalisme yang muncul di Kalimantan Barat (daerah luar Jawa yang relatif minim diperhatikan khususnya terkait gerakan kebangsaan) memiliki corak tersendiri. Sebuah corak yang belum ter gali dalam buku historiografi Indonesia.

Gejala nasionalisme di Kalimantan Barat memang pernah ditulis dalam “Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat” pada 40 tahun yang lalu. Akan tetapi, seperti umumnya sejarah yang ditulis di era sentralistik tersebut, nasionalisme yang dikemukakan cenderung memperagakan partisipasi lokal dalam mendukung narasi nasional (Abdullah dalam Nordholt dkk., 2008: 1–6). Dengan demikian, sejarah tidak memberi pemahaman akan realitas masyarakat pada masa lalu sebagai latar dari segala hal yang terjadi pada masa kini.

Tiga puluh lima tahun berselang dari kajian sejarah lokal tersebut, studi Listiana dkk. (2014) berjudul “Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial”, meski tidak berfokus mengkaji gejala nasionalisme, menemukan dua arus utama gagasan nasionalisme, yakni anti-kolonialisme dan ragam ide kebangsaan dari 13 pers lokal yang berhasil ditelusuri. Corak pertama hadir ketika kontrol negara lemah sebelum peristiwa pengasingan tokoh-

tokoh pergerakan Kalimantan Barat (sebagian tokoh adalah jurnalis atau kontributor pers) ke Digul pada 1926. Corak kedua hadir setelah 1926 hingga tensi kolonialisme Belanda di Kalimantan Barat menurun karena serangan militer Jepang pada Desember 1941. Corak kedua juga mencakup masa ketika para tokoh pergerakan dipulangkan dari Digul. Listiana dkk., juga berpendapat bahwa pers lokal telah menjadi media penyampai gagasan nasionalisme sejak terbit surat kabar pertama untuk skop Kalimantan Barat pada 1919. Tidak secara gamblang membongkar gagasan demi gagasan, studi yang memetakan pers lokal dalam kurun 1919 hingga 1941 ini menunjukkan bahwa kontrol negara menentukan perkembangan corak pers.

Bertolak dari temuan studi tersebut, penelitian ini berfokus menggali ide kebangsaan dari pers lokal. Dengan harapan menemukan ide kebangsaan yang unik, maka dipilih dua majalah lokal dari sebuah organisasi pergerakan kebangsaan yang juga bercorak lokal, yakni Persatoean Anak Borneo (PAB) pada periode akhir kolonial. Penggalan ide yang mengemuka dilakukan pada dua majalah organisasi, yakni *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda* yang terbit pada tahun 1940.

Melalui dua majalah tersebut, tulisan ini mengajukan rumusan masalah berikut.

1. Ide-ide kebangsaan apa yang mengemuka dalam dua majalah organisasi PAB, yakni *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda*?
2. Mengapa ide-ide kebangsaan tersebut mengada (muncul)?

Studi tentang ide kebangsaan sudah banyak dikerjakan oleh sejarawan. Untuk itu, penelitian ini menelaah berbagai pustaka terkait ide nasionalisme, baik sebagai pemikiran tokoh, landasan pergerakan organisasi, dan tentu saja konten media.

Jika ketiga artikel sebelumnya cenderung melihat gejala yang lebih besar dengan mengambil kasus pada tokoh tertentu maka artikel “Soewardi di Pengasingan: Nasionalisme versus Sosialisme” karya Joss Wibisono (2014: 1-24) berfokus pada pembentukan ide nasionalisme pada pribadi tokoh Soewardi. Joss berpendapat bahwa kebulatan ide nasionalisme Soewardi terbentuk setelah ia sempat dekat dengan partai berideologi sosialisme (*Sociaal Democratische Arbeiders*) dalam upaya pembebasan dirinya dari pengasingan. Menurut Wibisono,

upaya tersebut telah memberi pemahaman bagi Soewardi bahwa sosialisme yang berbasis perjuangan kelas malah akan memunculkan perpecahan, bukan persatuan di dalam masyarakat Hindia. Soewardi mengajukan nasionalisme beraliran asosiasi dengan tujuan mempersamakan hak antara orang Belanda dan bumiputra. Aliran asosiasi ala Soewardi menekankan pendidikan bagi segala kalangan masyarakat dan menolak pemikiran nasionalisme aliran asimilasi yang berbasis pengembangan pendidikan Barat untuk kalangan elite bumiputra.

Pemikiran nasionalis lain menjadi inti kajian prosopografi karya Savitri Prastiti Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, ingin menunjukkan terbangunnya tiga tokoh priyayi Jawa menjadi tiga tokoh nasionalis Jawa. Scherer menjelaskan tiga tokoh secara pribadi (bukan pemikiran kelompok atau golongan) berdasarkan gagasan yang tertuang dalam tulisan-tulisan mereka dengan mempertimbangkan nilai-nilai umum yang berlaku pada lingkungan sosial dan kebudayaan tempat para tokoh tersebut tumbuh. Tesis Scherer menunjukkan bahwa pemikiran dari para tokoh bangsa selama ini digeneralisasi dan atau dipersamakan dengan organisasi pergerakannya. Padahal, berdasarkan studinya, Soewardi Soerjaningrat, Soetomo, dan Tjipto Mangoenkoesoemo yang selama ini berada dalam satu kategori sebagai priyayi Jawa ternyata memunculkan konsep nasionalisme yang berbeda.

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, studi pemikiran intelektual dalam pers dikerjakan Recharodus Deaz Prabowo (2018). Recharodus menelaah wacana modernitas dalam tesis *Sejarah Pemikiran Modern Surat Kabar Boedi Oetomo dan Soera Moehammadijah di Yogyakarta Tahun 1920–1928*. Recharodus menempatkan wacana dalam berbagai tulisan di kedua surat kabar sebagai respons situasi modernitas. Pembahasan wacana disampaikan Recharodus dengan memperhatikan konteks kelembagaan pers dan konteks lingkungan budaya dan lingkungan intelektual Yogyakarta sebagai tempat lahirnya kedua surat kabar.

Secara teknis, berbagai pendekatan yang digunakan oleh para penulis sejarah tersebut memberi inspirasi dalam penentuan fokus dan penggunaan alat pada penelitian ini. Berfokus pada wacana

nasionalisme yang mengemuka dalam pers, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bentuk, corak, dan proses pembentukan nasionalisme di Kalimantan Barat, sekaligus melengkapi fragmen narasi tentang nasionalisme Indonesia.

Sebagai penjas dalam memahami evidensi yang ditemukan dalam *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda*, tulisan ini akan menggunakan konsep regionalisme (nasionalisme regional) dari David Henley, terutama dengan membandingkan gejala regionalisme Minahasa. Menurut Henley (1993: 91-92), nasionalisme regional mempertahankan identitas lokal tertentu yang khas sebagai ekspresi loyalitas primordial. Henley menambahkan, nasionalisme regional menghasilkan bangsa atau “komunitas yang merasa” (*perceived community*) dirinya adalah bagian dari wadah teritorial tertentu (*home territory*) dan memiliki cita-cita sosial dan politik tertentu yang kuat. Cita-cita bangsa dapat berupa agama, walau umumnya memiliki cara pandang sekuler terkait ikatan sosial; kemajuan material dan intelektual; dan memiliki lingkungan kultural dan politik yang otonom.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Tahap pertama adalah heuristik, mencakup penelusuran sumber pustaka dan lisan. Penelusuran sumber pustaka primer berupa majalah *Kesedaran*, *Doenia Pemoeda*, dan surat kabar sezaman yang memberitakan aktivitas organisasi atau tokoh PAB dilakukan di Perpustakaan Nasional RI. Penelusuran sumber lisan dilakukan di Ngabang dan Pontianak, dua daerah pusat perkembangan organisasi pergerakan kebangsaan. Wawancara dilakukan antara lain terhadap aktivis organisasi pergerakan nasional, salah satunya anggota Surya Wirawan (kependuan Parindra) Ya' Seman Anom; keturunan aktivis Parindra daerah Tengoe, Landak, Ya' Kusairi; dan keluarga para tokoh PAB ataupun dewan redaksi *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda* di Landak, Pontianak, dan Jakarta.

Sumber-sumber yang terkumpul dalam tahap heuristik kemudian diperiksa data-datanya melalui tahap kritik. Tahap kritik yang terbilang berat adalah membandingkan berbagai data yang memuat informasi sama, beririsan, dan satu sama lain sering kali melengkapi namun sekaligus mengandung perbedaan. Data-data yang telah dikritisi selanjutnya dianalisis dalam tahap interpretasi.

Dalam penelitian ini, analisis wacana nasionalisme dalam majalah *official* PAB dilakukan menggunakan pendekatan wacana-historis (DHA-*discourse historical approach*). DHA adalah pendekatan dalam wacana kritis (CDA-*critical discourse analysis*) yang berorientasi secara linguistik pada sejarah konteks dan mengkritisi teori sosial yang telah mapan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharap dapat mengintegrasikan sejumlah besar pengetahuan mengenai sumber-sumber historis dan latar belakang sosial dan politik pada mana kegiatan diskursif tertanam (Wodak dalam Candraningrum, 2018: 55–81).

Terakhir adalah tahap historiografi. Pada tahap ini, hasil interpretasi dirangkai menjadi kesatuan peristiwa sejarah secara kronologis sehingga harmonis dan masuk akal.

A. Pergerakan Kebangsaan dan Pers

Kalimantan Barat telah terpapar organisasi kebangsaan setidaknya sejak 1919. Kehadiran organisasi kebangsaan dapat terdeteksi dari organ penyiarannya. *Borneo Barat Bergerak* (BBB) adalah media massa pertama dari organisasi kebangsaan yang terbit di Kalimantan Barat. BBB adalah organ penyiaran Nationaal Indische Partij (NIP) yang bernama lain Insulinde² pasca-dibubarkan pemerintah kolonial pada 1913 (BBB, 1 April 1920: 14).

Keberadaan NIP di Kalimantan Barat tidak berlangsung lama yaitu hingga tahun 1923. Setahun kemudian berdiri Sarekat Rakyat (SR) yang diakui Chalid Salim (1977: 40–41) berkembang menjadi organisasi terselubung dari gerakan komunis yang didirikan bersama Koesno Goesnoko, anggota PKI dari Jawa. SR di Kalimantan Barat memiliki pengurus inti yang sama dengan pengurus NIP, yaitu Djeranding Abdurrahman, H. Rais Abdoerrachman, Gusti Muhammad Hamzah, Moestava, Abdul Samad, dan Abdul Halim (Balunus, 1990: 1–3 cf. Listiana dkk. 2014: 71). Pendirian SR didukung juga oleh tokoh-tokoh yang sama ketika NIP Kalimantan Barat

2 Insulinde adalah kelanjutan dari Indische Partij (IP) setelah bubar pada 1913, ketika para pemimpin organisasi (Soewardi Soerjaningrat, E.F.E. Douwes Dekker, dan Tjipto Mangoenkoesoemo) diasingkan ke Belanda oleh Pemerintah Hindia Belanda. IP berubah nama menjadi Nationaal Indische Partij (NIP) setelah Tjipto Mangunkoesoemo kembali dari pengasingan (Miert, 1996: 593). Kedua nama tersebut (Insulinde dan NIP) kemudian digunakan bersamaan ataupun menjadi nama ganti satu sama lain (*Borneo Barat Bergerak*, 1 April 1920: 14).

didirikan (Balunus, 1990: 3). Tokoh pendukung tersebut antara lain dr. Agusdjam, Syarif Muhammad Al Hinduan, Muhammad Mekah, Jacob Salim (Abdurrahman, 1975: 1), Sutan Maulana Anwar, M. Dahlan Sutan Lembaq Toeah, dan M. Sarman Sariban.³ Chalid Salim, bersama pengurus inti SR dan terutama tiga tokoh yang terakhir disebut kemudian membangun media penyiaran organisasi bernama *Soeara Borneo*, *Warta Borneo*, *Halilintar*, dan *Halilintar Hindia*. Mereka semua sama-sama berperan, baik sebagai wartawan maupun redaktur surat kabar yang secara lugas menyebut diri sebagai koran “merah” dan tegas menyampaikan gagasan anti-kolonialisme dan anti-kapitalisme (*Halilintar* No. 18, November 1923; *Halilintar Hindia* No. 44–45, 1924; *Berani* No. 1, Juli 1925; Salim, 1977: 41–42). Penerbitan yang memuat kritik keras pada Pemerintah Hindia Belanda tersebut, berujung pada pengasingan para aktivis pergerakan yang sebagian besar adalah redaktur koran-koran merah, yaitu H. Rais Abdoerrachman, Djeranding Abdurrahman, dan Gusti Sulung Lelanang. Pada masa pengasingan para tokoh yang disebut oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai penganut komunis fanatik dan teosofi tersebut (ANRI, 1927), masih juga muncul surat kabar yang mengkritik pemerintah kolonial bertajuk *Matahari Borneo*. Surat kabar yang mengelak dikategorikan “merah” ini didukung oleh para tokoh yang nantinya diketahui aktif dalam Persatoean Anak Borneo, seperti Ambo Pasir bin H. Abd. Hamid dan Abdoelrani bin H. Oemar (*Matahari Borneo* No. 5 Th. 1, 1928: 1; 4).

Pasca-pengasingan aktivis anti-pemerintah kolonial,⁴ muncullah sejumlah organisasi yang mengaku kooperatif dengan pemerintah kolonial. Hingga 1942, akhir masa negara kolonial Hindia Belanda,

3 Abdul Chalid Salim, Sutan Maulana Anwar, M. Dahlan Sutan Lembaq Toeah, dan M. Sarman Sariban diketahui sebagai simpatisan dan aktivis PKI yang kerap menulis pidato atau pemikiran para tokoh komunis Indonesia masa kolonial seperti Semaun (*Halilintar*, 17 November 1923: 1). Selain di Pontianak, mereka juga terlibat dalam organ penyiaran PKI di daerah lain. Keempat tokoh yang berasal dari Sumatera Barat tersebut turut menjadi pencarian *Politieke Inlichtingen Dienst* (Dinas Intelijen Politik) untuk diasingkan ke Boven Digul bersama para tokoh pergerakan asal Kalimantan Barat. Di antara keempat aktivis Minang tersebut, nama A.C. Salim paling dikenal salah satunya karena ia adalah adik kandung dari Haji Agus Salim yang anti-komunis. Ia akhirnya tertangkap di Medan dan dibuang ke Boven Digul pada 1927 karena penyamarannya terungkap melalui sebuah artikel protes atas tindakan penangkapan para aktivis pergerakan dalam *Pewartu Deli* Medan (Shiraishi, 2001: 19).

4 Sebagian aktivis anti-pemerintah yang disebut dalam surat dari Kepala Reserse Politik Pontianak kepada Kepala Komisaris Kepolisian di Batavia pada 27 Mei 1927 tentang pengiriman bantuan keuangan untuk tahanan Digul dari Pontianak adalah praktisi pers (ANRI, 1927) yang akan kembali aktif di Persatoean Anak Borneo dan terlibat sebagai redaktur atau kontributor majalah *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda*.

tiga organisasi massa terdeteksi hadir, yaitu Partai Indonesia Raya (Parindra), Persatoean Anak Borneo (PAB), dan Muhammadiyah.

Di antara organisasi tersebut, dua di antaranya adalah organisasi yang lahir di Jawa. Satu-satunya organisasi yang bercorak lokal adalah PAB. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian pengantar, tulisan ini bertujuan untuk mengungkap corak dan proses pembentukan ide kebangsaan yang unik dan khas, yang biasanya ditunjukkan oleh organisasi berlabel daerah, dalam hal ini PAB.

B. Persatoean Anak Borneo



Gambar 3.1 Sekretariat PAB di Voorstraat (kini Jl. Tanjungpura)
(Sumber: *Kesedaran*, 1940)

Untuk memahami pembentukan ide kebangsaan yang muncul, kita harus mengetahui lembaga pencetusnya terlebih dahulu. PAB adalah organisasi pergerakan yang didirikan pada 28 Mei 1939 (Anonim, Januari 1940: 5), ketika organisasi kebangsaan telah banyak berdiri. PAB dipahami oleh para sejarawan⁵ sebagai organisasi bentukan Pemerintah Kolonial yang bertujuan membendung arus pemikiran

5 Lihat kajian Soedarto *et al.* (1978/1979) dalam *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*; Raden Mahmud Suwignjo dan Ahmad Mansur Suryanegara (1979) dalam *Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia dari Kalimantan Barat*; dan Jamie Seth Davidson (2002) dalam *Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia*.

nasionalis, terutama terhadap keluarga kerajaan. Pemikiran nasionalis dimaksud kala itu berasal dari organisasi Partai Indonesia Raya (Parindra) yang dibentuk di Pontianak pada 1936 (Soedarto *et al.*, 1978/1979: 55–56; Suwignjo dan Ahmad Mansur, 1979: 209). Parindra menjadi organisasi yang berkembang bersama PAB, walau sebelum Parindra hadir pun keluarga kerajaan dan masyarakat Kalimantan Barat sebenarnya sudah dipengaruhi oleh ideologi organisasi nasionalis dan religius, seperti Sarekat Islam, Nationaal Indische Partij, dan Sarekat Rakyat (Davidson, 2002: 73–75; *Borneo Barat Bergerak* No. 13, 1 April 1920: 14). Davidson (2002: 75) bahkan menganalisis bahwa pendirian PAB dirancang untuk mengadu organisasi nasionalis Parindra, yang dibentuk bukan oleh putra Kalimantan, dengan putra-putri Kalimantan, khususnya kelompok Melayu. Analisis terakhir ini, PAB jelas dikaitkan dengan isu teritorial dan etnis.

Pendapat yang menyatakan PAB sebagai pembendung pemikiran nasionalis terhadap keluarga kerajaan cukup beralasan jika melihat kehadiran para raja setempat dalam rapat-rapat pendirian PAB di daerah dan daftar nama pemimpin PAB pada struktur kepengurusan pusat maupun cabang. Sebagai gambaran, dari tujuh orang pengurus pusat, lima orang di antaranya bergelar nama bangsawan, sedangkan dua lainnya dikenal sebagai saudagar⁶. Pada tahun pertama PAB, struktur pengurus pusat terdiri atas lima orang kerabat kerajaan, yakni Raden Moeslimoen Nalaprana, Goesti M. Poetra, Raden S. Kobat, Sjarief Salim Alidroes, dan Ja' Sabran (Anonim, April-Mei-Juni 1940: 10; 25). Begitu pula tiga dari empat ketua badan khusus, yakni Ja' Sabran, Goesti Soeloeng Lelanang, dan Ja' Ismail Abdoellah adalah kelompok bangsawan Landak (Abdoellah, Agustus 1940: 15). Komposisi yang tidak berbeda juga ditemukan pada kepengurusan cabang Sanggau, Ngabang, Mempawah, Putussibau, Sekadau, dan Sintang (Anonim, Februari 1940:14; 19; 20; Osman, Februari 1940: 38; Basri, Februari 1940: 39; Anonim, April-Mei-Juni 1940: 10–14).

Pendapat yang menyatakan bahwa PAB adalah organisasi sokongan pemerintah kolonial ditunjukkan oleh status sebagian besar pengurus utama PAB⁷ sebagai pegawai Pemerintahan Kolonial

6 Dua lainnya dikenal sebagai saudagar, yakni Ambo' Pasir dan Hadji Abdoerrazak (Anonim, April-Mei-Juni 1940: 25).

7 Keberadaan pegawai Pemerintah Hindia Belanda dalam kepengurusan PAB paling mencolok terlihat pada cabang Putus Sibau. Komposisi kepengurusan terdiri atas seorang mantri polisi

dan keberadaan donatur (*donatrice*) dari Pontianak dalam hampir setiap kunjungan ke daerah yang selalu diberitakan pada majalah ofisial PAB, *Kesedaran* (Anonim [Red.], Februari 1940: 13) dan hadirnya para pejabat kolonial dalam rapat pengurus PAB seperti yang sesekali diberitakan dalam *Kesedaran* (Anonim, April-Mei-Juni 1940: 10). Pendapat ini juga diperkuat oleh ingatan veteran asal Ngabang, Ya' Seman Anom dan Ya' Kusairi tentang kepanjangan julukan dari akronim PAB yaitu "Persatuan Anak Belanda" atau "Persatuan Anjing Belanda" yang biasa disebut untuk mengolok-olok anggota PAB. Julukan tersebut umum diketahui oleh anggota Surya Wirawan, organisasi kepemudaan Parindra, sebagai wujud rasa benci yang tertanam karena PAB yang mereka pahami adalah pendukung Pemerintah Kolonial (Wawancara Ya' Seman Anom dan Ya' Kusairi, Ngabang, 1 dan 4 April 2019).

Olokan terhadap PAB menurut Ya' Seman Anom disertai kebencian terhadap Belanda yang sejak kecil telah ditanamkan oleh keluarganya. Kebencian itu salah satunya ditanamkan lewat indoktrinasi yang masih diingatnya seperti bagi yang belajar menulis huruf Latin, hurufnya orang Belanda, akan mendapat siksa berupa sayatan luka pada jarinya di hari akhir. Bentuk indoktrinasi ini diakui Ya' Seman dipengaruhi oleh ideologi nasionalis yang dianut keluarganya sebagai anggota Parindra walau sepertinya ajaran nasionalis-religius juga turut memengaruhi (Wawancara Ya' Seman Anom, Ngabang, 1 April 2019).

Indoktrinasi serupa juga pernah dibahas dalam majalah *Kesedaran*. Pembahasan yang muncul dalam laporan redaksi saat PAB cabang Sanggau didirikan ini disampaikan oleh Ya' Sabran sebagai koordinator bidang pendidikan PAB. Ia membahas pemahaman yang berkembang dalam masyarakat tersebut dengan menjabarkan fungsi menulis huruf Latin dan berbahasa Belanda untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Pembahasan ditutup oleh anjuran menuntut ilmu, khususnya di sekolah-sekolah pemerintah.

"... maka adalah sepatoetnja poela anak negeri memenoehi sekolah2
jang soedah didirikan oleh Pemerintah... tentoelah anak negerinja mesti

sebagai ketua, demang sebagai wakil ketua, pemborong pemerintah sebagai ketua muda, dan pegawai pemerintah sebagai sekretaris dan bendahara. Bahkan, anggota komisi cabang Putus Sibau ini pun diisi oleh para demang, kepala desa, sipir, polisi, mantri, dan pegawai Pemerintah Hindia Belanda lainnya (*Kesedaran* No. 4-5-6 Th. II, April-Mei-Juni 1940: 39). Kondisi ini juga berlaku pada PAB cabang Mempawah (4-5-6: 22) dan Sintang (4-5-6: 13).

mendoendjoekkan samboetan mereka dengan bergiat menjekolahkan anak2nja ke-Volksschool sudah ada...

Adalah mendjadi salah pengertian dikalangan pendoedoek tentang menoentoet ilmoe pengetahoean. Kata orang toea2 dahoeloe, bahwa djika beladjar menoeelis hoeroef Latijn dihari Achirat nanti dikerat oleh Malaikat djarinja dan bila beladjar bahasa Belanda lidahnja poela akan terpotong. Alangkah gandjil dan keliroenja!

Hoeroef Latijn pada dewasa ini mempengaruhi seloeroeh doenia kita ini. Maka hoeroef Latijn itoe sewad[lj]ibnja dipeladjar oleh segenap lapisan bangsa kita, djika mereka soenggoeh hendak berbahagia hidoepnja.

Lihat diperniagaan, lihat diperboeroehan, lihat dipertanian dan pandang disekeliling kita! Hoeroef Latijn dan sekali lagi hoeroef Latijn "doenia kemadjoean" berputar..." (Anonim, Februari 1940: 15; 19).

Semangat untuk memadukan pengetahuan Barat dan ilmu agama Islam sedang berkembang di Kalimantan Barat. Pemahaman yang dikembangkan oleh Maharaja Imam Basiuni Imran di Sambas,⁸ daerah asal Ketua PAB ini, tecermin dalam majalah *Kesedaran*. Dukungan dan anjuran untuk sekolah di sekolah-sekolah partikelir bercorak Islam bermuatan pengajaran bahasa Belanda dan Arab, serta kalimat-kalimat propaganda melawan paham jumud disampaikan oleh para redaktur akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Selain dalam bungkus agama, rivalitas ideologi organisasi PAB dengan organisasi lain muncul dalam tudingan "provinsialis" terhadap PAB. Tudingan ini tidak dibahas serius dalam kerangka dan bahasa formal, melainkan muncul dan ditanggapi oleh redaktur dalam bentuk humor satire berikut.

"Loe dikate-in propinsialis, toe!

Nggak aape bang Doel, bab orang jang taaoe nggak ambil moe-met, si...

Dah abis propinsialis, Agame poele digaroe'-garoe'in...

Barang boelet soese tjari tengenje. Salah-salah tjari dong, kebentoer „bakoel”.
Djadi manoesie soeke salah raaabe, toe!

8 Basiuni Imran adalah murid Muhammad Rasyid Ridha, tokoh pembaharu Islam penerus pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al Afgani. Pemikiran terbuka yang bersandar pada rasionalitas dari para tokoh tersebut dikembangkan oleh Basiuni Imran di Sambas. Salah satu wujud pemikirannya adalah pendirian madrasah Al-Sultaniyah dan pengembangan kurikulum sekolah dengan memuat pola pembelajaran seperti sekolah umum Belanda, namun tetap mempertahankan ciri pendidikan Islam. Basiuni Imran, sebagaimana guru-gurunya, mendambakan umat Islam yang terbuka dan menerima perubahan zaman (Jabbar, 2015: 108; Haris dan Rahim, 2017a: 53; Herlina, 2019: 95–97).

Propinsialis kire sampe dimaane. Asal terbang adje, ape boeroeng! Kalo' bernang, ikan? Belum taoe, dong. Biase-biasenje di Kapoeas timboel boeaje...

Kang Boentoeng: Abdi' mah enteu serie' ..

Ali... „Patja' aaben engka". kate orang Bangka. Saje tada' maloe. Ka' aati diëlah..." (Anonim [Red.], Februari 1940: 2).

Percakapan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tuduhan tersebut keliru atau orang yang menilai provinsialis tersebut salah paham, sebagaimana pernyataan "... *manoesie soeke salah raaabe ...*" Redaktur juga secara satire menyatakan bahwa pelabelan tidak bisa sekonyong-konyong diberikan hanya berdasarkan sedikit ciri yang tampak. Sebagaimana pernyataan bahwa tidak semua yang berenang itu adalah ikan karena bisa jadi yang dimaksud adalah buaya yang juga bisa berenang.

Secara implisit, penggunaan bahasa Betawi, Sunda, Bangka, dan Melayu dalam tanggapan redaktur dapat dimaknai bahwa PAB menolak disebut provinsialis. Penggunaan berbagai bahasa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa mereka memiliki, membuka diri, dan tidak membatasi pergaulan dengan masyarakat di daerahnya saja.

Munculnya label "provinsialis" atau yang dapat disederhanakan "kedaerahan" bukanlah hal yang mengherankan jika menilik *tujuan organisasi* dan persyaratan anggota dalam Anggaran Dasar PAB, dan *slogan* yang dipahami oleh kelompok organisasi di luar PAB. Tujuan PAB⁹ adalah 1) memajukan dan menggembirakan putra-putri Borneo dalam pendidikan, pertanian, perniagaan, dan pertukangan; 2) berusaha dalam segala hal untuk putra-putri Borneo selama tidak melanggar peraturan pemerintah. Anggota PAB hanya putra-putri Borneo dewasa dan orang yang diakui sebagai putra-putri Borneo. Sementara itu, yang bukan putra-putri Borneo hanya bisa diterima sebagai anggota penyokong (Anonim [Red.], Januari 1940: 19). Slogan PAB yang dipahami oleh kelompok organisasi lain, seperti penyampaian Suwignjo (1979: 296), seorang aktivis Parindra dan eks-Digulis, adalah "Borneo untuk Anak Borneo." Slogan tersebut

9 Tujuan PAB diekspresikan dalam potongan puisi bertajuk "Borneo Barat Bangun" berikut. Masa pagi menjilat tjahaja // Dalam tidoer soepaja djaga // Poetra-poetri mari bersatoe! // Borneo Baroe toedjoean kita! // Borneo Moelia menanti kita. Poetra-poeteri mari bersatoe (Anonim, Februari 1940: 8). Potongan puisi tersebut menunjukkan misi persatuan Borneo dengan visi Borneo Baru.

dimaknai Suwignjo sebagai bentuk penanaman pemahaman bahwa anak Borneo harus menentang orang-orang dari luar Borneo yang aktif dalam organisasi pergerakan nasional. Pengetahuan dan pemaknaan Suwignjo tentang slogan adalah resepsinya sebagai seorang Jawa dan aktivis Parindra.

Pandangan serupa Suwignjo disampaikan oleh salah seorang anggota Parindra pada Rapat Terbuka PAB dengan kalangan di luar anggota. Dalam perdebatan yang diberitakan oleh surat kabar *Borneo Barat* diungkap penilaian bahwa PAB tidak paham politik (*Borneo Barat*, November 1939: 1).

Corak provinsialis juga ditempelkan Soedarto *et al.* (1978/1979: 56) terhadap PAB atas dasar sistem keanggotaan. Sistem PAB dinilai tertutup dan berbeda dengan Parindra yang disebut nasionalis karena membuka keanggotaan untuk semua etnik yang tinggal di Kalimantan.

Lebih sempit lagi, Davidson menganalisis corak PAB tidak dari sistem, tetapi dari keberadaan anggotanya. Ia menilai bahwa PAB dieksploitasi pemerintah kolonial Belanda melalui isu “Melayu” karena sebagian besar anggotanya beretnik Melayu (Davidson, 2002: 104). Meski alasan Davidson sekilas terlihat dari nama-nama pengurus PAB, keberadaan G.P. Djaoeng seorang Dayak yang menjadi kepala PAB cabang Sintang (Tanasaldy, 2012: 74) dan berbagai pernyataan resmi PAB berikut menunjukkan bahwa PAB tidak membatasi keanggotaan pada kelompok Melayu saja.

Usaha pemerintah kolonial untuk memunculkan sentimen kedaerahan dalam PAB tampaknya gagal jika dinilai dari konten kedua majalah. Artikel Ja’ Sabran bertajuk “Keterangan Asas P.A.B. (Persatoean Anak Borneo)” yang bermaksud menjelaskan berbagai latar ide pembentukan PAB seperti agama dan pendidikan namun menyisipkan klarifikasi atas tuntutan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia (GAPI) menunjukkan bahwa tuntutan GAPI dimuat pada edisi tahun sebelumnya. Klarifikasi Sabran dikemas dengan baik dalam bentuk imbauan kepada masyarakat untuk tidak takut bergabung dengan perkumpulan (PAB). Dalam pernyataan bahwa tuntutan tersebut “sama sekali boekan soeatoe aksi/alat goena hendak melawan atau meroeboehkan Pemerintah ... sama sekali boekan melanggar oendang2 negeri atau keradjaan”,

Sabran justru menyebarluaskan tuntutan GAPI dan pembaca dapat mengetahui preferensi politiknya (Sabran, Januari 1940: 7).

Untuk keanggotaan, secara kelembagaan Rapat Umum PAB merumuskan pengertian “anak Borneo” tanpa batasan etnik. “Anak Borneo” adalah *“ketoeroenan Borneo... anak dari keloearga jang toeroen temoeroen tinggal berdiam di Borneo... Adapoen orang asing tetaplah asingnja.”* Yang dimaksud bangsa asing adalah bangsa di luar tanah air kita (tanpa menyebut Indonesia) di mana Pulau Borneo menjadi bagiannya (Anonim [Red.], Juli 1940: 3–4). Bangsa asing dari keluarga yang turun-temurun berabad-abad atau berpuluhan tahun tinggal berdiam di Borneo dapat menjadi “anak Borneo” jika telah “diakui” oleh *Gouvernement* (Pemerintah Hindia Belanda) atau Pemerintahan Kesultanan. Sebaliknya, “anak Borneo” dapat dinyatakan asing oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan (Anonim, Agustus 1940: 3–4).

Yang menarik dari diskusi definisi “anak Borneo” ini adalah tidak adanya pembatasan etnik bahkan ras karena selama ini organisasi pergerakan yang dikenal memperjuangkan keterbukaan ras hanyalah Indische Partij. PAB yang mula-mula mengeluarkan ketentuan bahwa “anak Borneo” adalah keturunan dari ayah orang Borneo kemudian mengeluarkan aturan lanjutan untuk pengakuan status sebagai “anak Borneo” bagi orang asing. Aturan ini besar kemungkinan (untuk tidak menyatakan pasti karena belum ditemukan pernyataan jelas) untuk mengakomodasi keluarga Kesultanan Pontianak yang merupakan keturunan Arab.

Adapun etnik lain yang disebut sebagai “saudara sebangsa dari pulau lain” dapat “diterima” menjadi anggota biasa setelah “diakui” sebagai “anak Borneo” oleh organisasi. Dengan demikian, PAB membuka peluang sekaligus membatasi keanggotaan organisasi. Pembatasan yang bersifat selektif ini dijelaskan *“tidak sekali-sekali oleh karena demikian loepa atau menolak bangsa sendiri”*, tetapi upaya *“mempersatoekan lebih dahoeloe diri sama sendiri jang sama sepoe lau... karena poetera2 Borneo oemoenja sangat terkebelakang dalam berilmoe pengetahoean... maka sepatoetnja... bersatoe dahoeloe, tentoe kemoedian persatoeannja akan lebih loeas dan djaoeh....”* (Anonim [Red.], Juli 1940: 3–4). Status bagi “saudara sebangsa dari pulau lain” ini pada bulan kemudian diperbaiki lagi yakni dapat menjadi anak Borneo jika

telah berpendirian untuk menetap secara turun-temurun di Borneo (Anonim, Agustus 1940: 4).

Berdasarkan nukilan pengertian “anak Borneo” tersebut terlihat bahwa pengurus PAB mengalami “kebingungan” dalam menentukan identitas keanggotaan yang berarti identitas organisasi termasuk lingkup dan tujuan organisasi. Kebimbangan tersebut menunjukkan konsep bangsa yang diistilahkan dengan “anak Borneo” belum jelas. Hal ini mirip dengan Jong Sumatranen Bond yang kemudian pecah karena tiap-tiap bangsa di Sumatra tidak memiliki perasaan sebangsa, terutama Batak yang kemudian membentuk perhimpunan tersendiri. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan Jong Java yang berbagi sebuah bahasa, budaya, dan sejarah sehingga menganggap dirinya sebagai sebuah bangsa (Miert, 1996: 592–593).

Identitas keanggotaan yang mengemuka tidak hanya asal-usul kedaerahan, PAB tegas menyatakan bahwa organisasinya tidak berlandaskan agama. Oleh karena itu, PAB membukaluar keanggotaan untuk agama lain. Bahkan, pada tahun pertama telah disebut bahwa PAB beranggotakan penganut agama yang tidak berkitab. Sebagai penguat atas pendirian ini, pengurus PAB mengutip ayat Al-Qur’an “*Lakoem dienokoem wa lia dien*” beserta artinya “*Agamamoe oentoek kamoe dan Agamakoe oentoek saja*.” Perekrutan anggota dari beragam kalangan ini dilakukan pengurus untuk mencapai “**Borneo-Baroe**” (Anonim [Red.], April-Mei-Juni 1940: 25).

Slogan resmi PAB, yakni “*Dioesahamoe Letak Nasibmoe*” lebih mencirikan aliran asosiasi¹⁰ yang mengajarkan “berdikari”¹¹. Slogan lain dari dua bidang dalam struktur organisasi PAB juga mencirikan aliran asosiasi, seperti slogan bidang koperasi PAB adalah “*Bersatoe*

10 Asosiasi mengusahakan *persamaan dan kesamaan* antara orang Belanda dan warga Hindia di satu pihak dan antara orang Eropa dengan orang Indonesia di pihak lain. Asosiasi bertujuan untuk mempersamakan hak orang Belanda dengan kalangan pribumi dan meniadakan perbedaan ras antara orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Aliran *asosiasi* menolak membelandakan sistem pendidikan di Hindia, melainkan menganjurkan penggunaan bahasa sendiri terutama *bahasa Melayu* sebagai *lingua franca*. Meskipun demikian, aliran asosiasi tetap mengawinkan pengetahuan Barat dengan Timur dengan menempatkan bahasa Belanda sebagai bahasa asing pertama. Aliran asosiasi berpendapat bahwa Indonesia dan Belanda tidak dapat menjadi satu bangsa sebagaimana cita-cita penganut *asimilasi* menjadikan *Indonesia ke dalam Belanda Raya*. Aliran asosiasi bercita-cita membangkitkan Timur Baru (seperti cita-cita PAB membangun Borneo Baru) dari bagian (kebudayaan) yang sudah ada dan unsur-unsur lain yang diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhannya (Wibisono, 2011: 9–10).

11 Lebih lanjut, baca van Miert (2003: 461–463) mengenai jargon-jargon yang dikemukakan oleh *Jong Sumatranen Bond* mengenai ide “berdikari”.

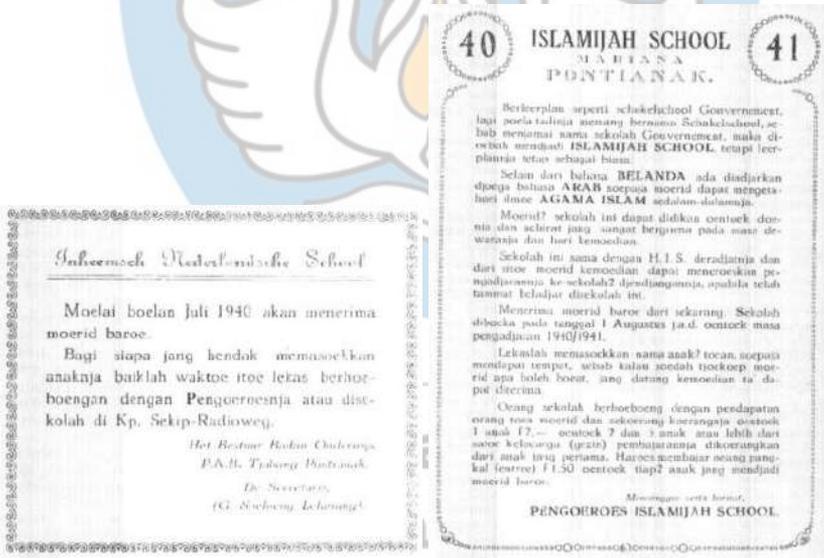
Kita Tegoeh, Bertjerai Kita Roentoeh” (*Kesedaran* No. 2 Th. II, Februari 1940) dan bidang kebudayaan PAB yaitu “*Oesaha Membawa Kemadjoean*” (*Doenia Pemoeda* No. 1 Th. I, Agustus 1940).

Slogan *Dioesahamoe Letak Nasibmoe* dijelaskan sebagai “*tenaga hidoep moelia dan soetji bagi Doenia dan Achirat.*” Gusti Sulung Lelanang menolak syiar ulama yang disebutnya sebagai kiai kolot tentang dunia adalah penjara bagi kaum Muslim. Dalil ini dinyatakan Lelanang “*tidak tjotjok lagi dengan djaman madjoe... telah laloe dan dihanjoetkan oleh soengai Kapoeas.*” Lelanang memperkuat argumennya dengan menukil Al-Qur’an “*bahwa Allah tida akan merobah keadaän sesoatoe kaoem, sehingga (melainkan) kaoem itoe sendiri jang merobahnja.*” Ia pun mengutip Jan Romein, filsuf Eropa, bahwa “*de menschelijke vaardigheid... manoesia itoe haroes memegang nasibnja sendiri, di dalam tangannja terletak pimpinan fikiran*” (Lelanang, April-Mei-Juni 1940: 3–4). Tanggapan Lelanang menunjukkan penggunaan pendekatan populer seperti *merepet* (ngomel) dalam komunikasi lisan Melayu, agamis, dan menunjukkan orientasi terhadap Barat. Penggabungan berbagai pendekatan tersebut memberi kesan sikap ambivalen dalam sikap asosiatif. Penilaian ini mengacu pada studi Locher-Scholten (1981) sebagaimana kutipan Wibisono, tentang sikap asosiatif yang berbentuk sikap kerja sama berdasarkan persamaan dan kesamaan antara orang Belanda dan bumiputra. Aliran asosiatif bertujuan untuk menghapus perbedaan ras antara orang Eropa, Timur asing, dan bumiputra. Salah satu ciri kentara kelompok asosiatif adalah anjuran penggunaan bahasa sendiri, bukan bahasa Belanda (Wibisono, 2014: 9–10).

Sikap Lelanang tersebut sebenarnya berlawanan dengan haluan yang dideklarasikan PAB secara resmi pada tahun pertama pendiriannya sebagai penganut dan penganjur aliran asimilasi. Bagaimana sikap asimilasi dituangkan dalam pemikiran yang dimuat dalam tiga isu yang kerap dibahas *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda*. Isu pendidikan, kebudayaan, dan bahasa akan ditelaah dari konten dan penggunaan diksi para redaktur kedua majalah. Telaah tersebut pada akhirnya digunakan untuk menjelaskan imaji kebangsaan yang mengada di Kalimantan Barat di periode akhir kolonial.

Selain pernyataan dalam majalah, pandangan asosiatif dari pengurus PAB juga ditunjukkan oleh program pendidikan untuk masyarakat umum. PAB, khususnya bagian pendidikan yang

dipimpin Ja' Sabran menginisiasi pembentukan sekolah-sekolah untuk kaum bumiputra di berbagai daerah, di daerah tempat cabangnya berdiri. Misalnya, sekolah bumiputra (*inheemscheschool*); sekolah lanjutan (*overgangsschool*) di Mempawah; mempromosikan sekolah partikelir seperti Sekolah Islamiah; sekolah transisi untuk melanjutkan studi (*overgangsschool*) Ngabang; Sekolah Kampoeng di Wadjok. Sekolah yang didirikan dan didukung oleh PAB sebagian besar berupa *volkschool* untuk rakyat yang tidak mampu karena tidak akan ditarik bayaran ataupun *schakelschool* yang biaya sekolahnya ringan dan dinyatakan tidak memberatkan orang tua. Akan tetapi dari segi kurikulum, PAB diketahui juga mendukung pendirian *Inheemsche Nederlandsch School* yang digagas akan memberi pelajaran bahasa Belanda meski bukan sebagai bahasa pengantar (*Kesedaran*, April-Mei-Juni 1940: 6-16).



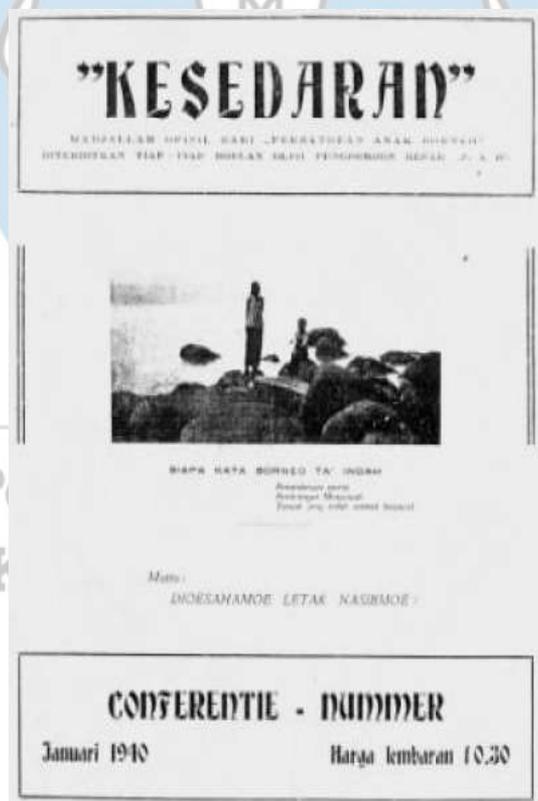
Gambar 3.2 Iklan sekolah partikelir. Sekolah Bumiputra yang digagas pengurus PAB (kiri) dan Sekolah Islamiah yang didukung pengurus PAB (kanan). (Sumber: *Kesedaran*, 1940)

Program pendidikan PAB mendekati penganut aliran asosiasi yang bergerak melalui pendidikan massal karena mereka percaya bahwa pendidikan mampu mewujudkan Indonesia yang mandiri, walau tetap dalam ruang Kerajaan Belanda. Sekolah-sekolah massal biasanya menggunakan bahasa pengantar “bahasa sendiri”. PAB juga mendukung sekolah partikelir lain yang dikembangkan oleh

kelompok Islam Pembaharu yang dikenal memadukan ilmu agama Islam dengan pengetahuan Barat sebagaimana yang terlihat dalam gambar iklan.

Sekolah-sekolah rakyat akan berdampak berbeda dengan sekolah-sekolah khusus yang dibangun pemerintah Kolonial. Sekolah rakyat tidak bersifat elitis, dalam hal ini tidak menggunakan kurikulum pendidikan Belanda dan sekolah tidak terbatas untuk kalangan bangsawan saja. Dengan demikian, pendidikan tidak memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat (Wibisono, 2011: 9-10).

C. Penciptaan Nasionalisme Borneo dalam *Kesedaran*



Gambar 3.3 Sampul *Kesedaran* edisi No. 1 Tahun II

Kesedaran adalah majalah resmi PAB yang terbit pertama kali pada Juli 1939 di bawah pengelolaan H. Rais Abdoerrachman sebagai

pemimpin redaksi. Pada Januari 1940, *Kesedaran* berada dalam tanggung jawab dewan redaksi yang terdiri atas seluruh pengurus pusat dan Ketua PAB Cabang Pontianak. Dari tujuh orang pengurus pusat, terdapat tiga sosok, yakni R.M. Nalaprana, G.M. Poetra, dan Ja' Sabran, yang pemikirannya kerap dimuat, baik dalam bentuk ringkasan pidato, laporan rapat, maupun artikel. Pemikiran Ketua Cabang Pontianak, Ismail Oesman sesekali muncul dalam ringkasan pidato. Dengan demikian, imaji kebangsaan PAB dapat disintesis dari pemikiran mereka. Terlebih, tiga orang di antara mereka, yaitu Goesti Mohammad Poetra, Ismail Osman, dan R.M. Nalaprana (sebelumnya dikenal dengan O.M. Nalaprana) disebut sebagai penggagas pendirian PAB dalam artikel peringatan setahun PAB (Anonim, April-Mei-Juni 1940: 23).



Sesuai catatan di Dedakban (Cakrawala Dewan Rakyat) Batavia. Centrem, masih diarah kearah sana sebelum terdengar kabar yang menandakan atas peralangan ke-antaraan. Negeri Belanda. Ditiga adalah hawan zanyah. Wakil hwa, nama R. M. Nalaprana, yang memakai jubah (kesuiah), sedang iseret tertawa ropanja.



Gambar 3.4 R.M. Nalaprana, Ketua PAB, bersama anggota Dewan Rakyat (Sumber: *Kesedaran*, 1940; *Soeara Pakat*, 1940)

Raden¹² Muslimun Nalaprana, ketua PAB pusat, adalah bangsawan Kesultanan Sambas lulusan *Holland Inlandsche School* (HIS) Sambas (BBB, 15 Maret 1920: 7–8) dan sekolah pamong praja OSVIA. Kala mendirikan PAB, ia sedang menjabat sebagai Demang Pontianak (Soedarto *et al.*, 1978/1979: 56) dan setelah mendirikan PAB diangkat menjadi anggota Volksraad oleh pemerintah Hindia Belanda. G.M. Poetra adalah Sekretaris Pusat PAB yang menggantikan kedudukan Ismail Oesman ketika cabang Pontianak didirikan pada Desember 1939 (Anonim, Januari 1940: 1; 4; 5; 11). Ja' Sabran, komisaris pengurus pusat, adalah bangsawan Kerajaan Landak yang lulus dari Sekolah Guru di Meester Cornelis (Jatinegara). Selama di Jakarta, ia aktif dalam organisasi Partai Nasional Indonesia dan Perguruan Rakyat bersama Mr. Mohammad Yamin, Mr. Amir Sjarifuddin, dan Adam Malik. Ia juga mendirikan organisasi Benih Kalimantan sekaligus asrama Benih Kalimantan bagi para pelajar Kalimantan di Jakarta (Suwignjo, 1979: 293; 302; *Kesedaran* No. 4-5-6, April-Mei-Juni 1940: 27). Ismail Oesman, praktisi pers¹³ yang kala itu dikenal sebagai pengusaha percetakan (Listiana *et al.*, 2014; Purba, 1993).

Di antara dewan redaksi tersebut, tulisan di luar informasi kepertaian hanya diperoleh dari Ja' Sabran dan G.M. Poetra. Sabran tentang pendidikan dan Poetra tentang adat. Selebihnya, *Kesedaran* memuat porsi besar untuk merilis informasi perhimpunan. Artikel bertema ekonomi dan pertanian diberi ruang besar dalam setiap edisi. Kedua tema kerap diisi oleh ulasan teknis seperti pengembangan lahan usaha untuk perkebunan kelapa atau pemasaran kopra. Ruang kebudayaan juga diberi porsi besar yang diisi oleh berbagai jenis tulisan, mulai opini, sejarah dan kebudayaan setempat, hingga cerita pendek.

Tema bahasa, pendidikan, dan kebudayaan akan dibahas lebih lanjut karena sarat memuat nilai-nilai kultural dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk nasionalitas regional. Selain itu ketersediaan data pembanding berupa artikel di *Doenia Pemoeda* tidak memuat tema ekonomi, pertanian, dan informasi perhimpunan.

12 Gelar raden dalam Kesultanan Sambas diberikan sebagai penghormatan atas jasa atau prestasi. Sementara itu, oerai adalah gelar umum yang diperoleh berdasarkan kelahiran (keturunan).

13 Ismail Oesman [Osman] setidaknya terdeteksi menjadi pemimpin redaksi pada Koran *Oetoesan Borneo* terbit pada 1927–1928, *Tjaja Timoer* terbit pada 1928–1941, *Borneo-Barat: Niews en Advertentieblad* terbit pada 1936–1941 (Listiana *et al.*, 2014: 76; 78; 88).

Artikel tentang bahasa berjudul “Kontak dengan Masa” menempatkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat, termasuk bahasanya sebagai acuan kemajuan dan keluhuran bangsa. Orientasi terhadap Barat diiringi akan anjuran untuk tetap berpegang pada jati diri sendiri.

“Peradaban Barat mendjadi pembawaan gilang goemilang. Techniek Barat mendjadi kemadjoean oentoek banjak matjam jang bersemarak djoega sampai kenegeri kita ini... Inilah sebagai boekti kegiatan orang Barat itoe mewedjoedkan oesaha dengan barang materieel jang didatangkan dari Barat itoe kita tidak dapat bertjerai, malahan meloeloe mendjadi kepentingan kita dalam pergaolan hidoep. Begitoepoen dengan ilmoe kepandaian dan ilmoe bahasa, teroetama sebagai bahasa Belanda di Indonesia, dan bahasa Inggris sebagai bahasa doenia telah mendjadi kontak perhoebongan antara bangsa dengan bangsa...

Dalam pada itoe hampir sadja terkoeboer peradaban dan kesopanan bangsa kita, lantaran desakan dan tioepan angin Barat itoe...

Sekalipoen segala2 jang datang dari Barat itoe memang mendjadi tjontoh toeladan bagi kita, akan tetapi kesopanan dan Keboedajaan Timoer tidak dapat kita hindarkan teroes. Kesemoeanja memberi kesadaran bahwa kita dikepoeloean ini haroes mengetahoei keloehoeran bangsa, bahasa, dan agama...” (Anwar, Agustus 1940: 13).

Bagian akhir artikel memuat anjuran untuk mengubah cara berusaha, seperti bertenun, bertani, atau beternak menggunakan teknik Barat yang disebut modern dan menuntut ilmu di sekolah “Barat”. Mencolek anak Borneo, artikel ini diakhiri oleh peringatan keras menggunakan huruf kapital akan semboyan PAB yang memuat terminologi modern *right to self-determination* (hak untuk mengatur diri sendiri) ala gerakan nasionalis India.¹⁴

“Poetra-poetri Borneo, djanganlah moendoer walaoepoen selangkah dalam menoentoet ilmoe kepandaian... apalah salahnja kalau sekarang ada: kaoem tani, berternak ajam, menganjam tikar dan bakoel serta bertenoen kain dan menanam sajoeran setjara modern. Begitoelah Kalau doeloe d’ama’nja dikatakan orang itoe lading Pa’ anoe... apalah salahnja Kalau sekarang atau zaman jang akan datang, ini keboen si Pemoeda H.I.S., itoe sawah si Pemoeda Mulo, dan disana itoe tokoh Kleermaker si Pemoeda Schakel School dll. Sekolah... pada masa ini sangat perloe... terlebih dari persangkaan tadinja.

¹⁴ *Right to self-determination* adalah ide yang dimunculkan oleh nasionalis India yang berasal dari konsep “*swaraj*” bermakna lepas dari tindakan dan lepas dari tali samsara yang menyakitkan (Budiawan, 2017: 47–50). Konsep dari tradisi Hindu ini dikembangkan dalam terminologi baru yang menginspirasi kaum nasionalis di Jawa. Sumber inspirasi yang berbeda bagi para nasionalis Minahasa yang lebih mengacu pada gerakan nasionalis Amerika yang berkembang di Filipina (Henley, 1993: 107).

Kita mengingat sembojan PAB kita: "DI OESAHAMOE LETAK NASIBMOE" dan "DI KEGIATANMOE LETAK KEBEROENTOENGANMOE" ... Maka selama kita mendjadi atau mengakoe anak Borneo, tidak dapat lepas dari sembojan itoe." (Anwar, Agustus 1940: 13).

Ide nasionalis lain diidentifikasi dari artikel bertema pendidikan berjudul "Pendidikan" dan "PKIIP dan Sekolah". Substansi materi pertama adalah kerja sama antara guru dan orang tua dalam mendidik anak dan upaya menggugah wawasan pembaca mengenai citra pekerjaan. Yang menarik dari artikel pertama adalah penggunaan diksi pengganti Indonesia atau mungkin Kalimantan (Borneo) menjadi "kita" atau "bersama", misalnya saat menyatakan "cita-cita kita bersama" atau "bangsa kita". Substansi materi kedua adalah pendirian sekolah-sekolah baru dari tingkat dini hingga lanjutan serta imbauan untuk menyekolahkan anak. Adapun yang menarik dari kedua artikel adalah pengutipan dalil ataupun penggunaan kalimat suci agama berikut.

"... 'Sipendidik (si-goeroe) menanam, siorang toea menjiram. Kalau terdjadi selaloe hal jang sematjam ini, *Insya Allah* moedahlah tjita2 kita bersama terkaboel..." (Anonim, Oktober 1940: 6).

"... Maka sebenarnjalah moelia Nabi Moehammad s.a.w. dengan system (tjara)nja jang 'tidak soeka bitjara sadja, tetapi jang oetama dipentingkan dan direboet serta dibéla ialah *kerdja* berkenaan dengan firman Toehan dalam Al-Qur'anoel Karim: 'Kaboeran maqtan 'indAllah an taqoeloe ma laa taf' aloen' jang ertinja: 'Besar dosanja disisi (pada) Allah, kamoe berkata tetapi tidak bekerdja'" (Anonim, April-Mei-Juni 1940: 3).

Artikel tersebut menunjukkan usaha untuk menggabungkan ide nasional dengan ujaran agama. Penyatuan ide tersebut mungkin diutarakan dengan pertimbangan pragmatis latar belakang audiens atau pembaca *Kesedaran*. Penyatuan gagasan identitas nasional dan identitas ke-Islam-an yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya merupakan pengaruh ajaran imam besar Kerajaan Sambas Basiuni Imran, mirip dengan gagasan dalam tulisannya berjudul *Mustafa Dib al-Bugha*. Tulisan yang memuat persoalan adat dan muamalat (hubungan antar-manusia) menunjukkan pandangan Basiuni Imran bahwa usaha dalam memajukan urusan dunia tidak dilarang dalam syariat Islam dengan alasan berikut.

"Adalah suatu kemustahilan bila Rasul dan Khalifahnya menghalangi dan menghambat kemajuan orang-orang dalam kehidupan yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, sedangkan mereka memiliki kemampuan, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa dengan alasan tidak diizinkan Allah. Bagaimana mungkin akan masuk ke surga Allah kelak di akhirat, kalau memasuki surga kemuliaan di dunia saja tidak dapat" (Basiuni Imran dalam Haris dan Rahim, 2017b: 174).

Selain penyatuan dua ide tersebut, *Kesedaran* juga memuat narasi kejayaan masa lalu dalam balutan ide asimilasi dengan kebudayaan dan pengetahuan Barat, seperti yang disampaikan oleh Gusti Sulung Lelanang berikut.

"... Pada zaman poerbakala, kepoelauan Indonesia kita ini, setiap noesanja sama2 menerima peradapan Hindoe; Boedhisme; tetapi keboedajaannya jang toemboeh pada soeatoe daerah, ada berlainan bentoek dan warnanja disebabkan tempat dan tjara kehidoepannya jang tidak sama dalam hal menerima aliran2 jang datang itoe

... Sesoenggoehnja djika ditilik dari sedjarah Borneo, banjak radja2 disini jang berasal dan datang dari Djawa dan dari tanah Melajoe jang tidak sadja mereka itoe memrintah di Borneo Barat tapi djoega membawa boeah2 ketjerdasan keboedajaannya masing2 tetapi hal itoe djoega tidak soerepa mendalam dalam djiwa kita orang Borneo.

Dalam kehidoepan soekoe2 bangsa kita dari sedjak purbakala, toeroen temoeroen dari nenek mojang, dalam pergaoealannya dan kehidoepannya dapat melahirkan bentoek keboedajaan dan seni sendiri meskipoen masih primitief dari peradaban Barat" (Lelanang, Januari 1940: 12–13).

Pada bagian awal Lelanang menyampaikan bahwa kebudayaan yang tumbuh di Borneo itu berbeda dari daerah lain meski sama-sama mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha. Lelanang juga menyampaikan bahwa kebudayaan di daerahnya mendapat pengaruh dari Jawa dan Sumatra, bahkan kemudian Barat yang diposisikan sebagai budaya superior.

"... Kita sekarang tengah menerima alir2an peradaban Barat jang isinja: Rationalisme, Zakelijkheid, Techniek, Wetenschap d.I.I. ... tetapi djangan hendaknja sampai melalaikan.

- (1) Iboe negeri Tanah Landak jang pertama jaitoe dizaman Djawa-Hindoe
- (2) Ratoe Soekadana jaitoe seorang radja perempoean jang menjatoekan Landak dan Matan dalam pemerintahannya pada abad ± ke 16.

Melalaikan ataoe loepa dengan keboedajaan sendiri sebab sekalian alir2an jang datang dari loear itoe beloem tentoe semoeanja ada memberikan bahagia bagi kita sendiri dan dapat bersenjawa dengan kehidoepan soekoe2 bangsa di Borneo oemoemnja..." (Lelanang, Januari 1940: 13).

Semula kalimat Lelanang merendahkan diri terhadap kebudayaan Eropa. Akan tetapi, jika dicermati pesan-pesan yang diletakkan di bagian akhir jelas terlihat bahwa ia ingin menyadarkan bahwa kebudayaan Borneo juga kaya dan memiliki ragam sebagaimana kebudayaan Jawa yang dipandang lebih tinggi atau lebih kaya. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kebudayaan Barat belum tentu juga bisa menghasilkan kebudayaan hebat setelah atau dalam praktik kebudayaan di Borneo.

Penanaman untuk bangga akan diri, memelihara kebudayaan sendiri, dan berlanjut pada peraguan kebaikan budaya Barat menunjukkan bahwa Lelanang beraliran asosiasi, sebuah sikap yang kontradiktif dari pernyataan resminya dalam rapat umum PAB.

"...Dalam adat istiadat dan hoekoem kita orang Borneo... djika diselidiki toemboeh dari djiwa bangsa sendiri dan djoega datang dari loear... soekoe bangsa Dajak jang sangat kokoh-koeat dalam meniti adat-istiadatnja toeroen temoeroen... dalam kehidoepan bangsa kita mempoenjai tjara sendiri...

... Tari 'Belian' jang lahir dari roch animisme setiap soekoe bangsa Dajak oemoemnja dapat melahirkan kepandaian 'Mengoekir dan Menga[n]jam'. Sekalian keboedajaan seni kita terseboet beloem begitoe dikenal oleh doenia loear, karena kewadjiban memelihara dan menjempoernakan bagi kita beloem insjaf. Apalagi oentoek mempertahankan segala lapangan jang mengenai keboedajaan-kita orang Borneo jang telah beroerat berakar dalam djiwa-bangsa sendiri beloem ada kesanggoepan jang soenggoeh-soenggoeh..." (Lelanang, Januari 1940: 13).

Artikel Lelanang diakhiri dengan pernyataan tentang Indonesia dan Borneo sebagai kesatuan identitas yang baru berikut. Pada bagian ini ideologi nasionalisme Indonesia cukup terang disampaikan.

"... Bagi hari jang datang dimasa keinsjafan telah tiba, tentoe djadi kewadjiban dan hak kita, oentoek menjelam dan berketjimboeng dalam keboedajaan-sendiri karena dengan demikianlah poetra-poetri Noesa-Borneo dapat menoeumboehkan tjinta-sedjati jang abadi.

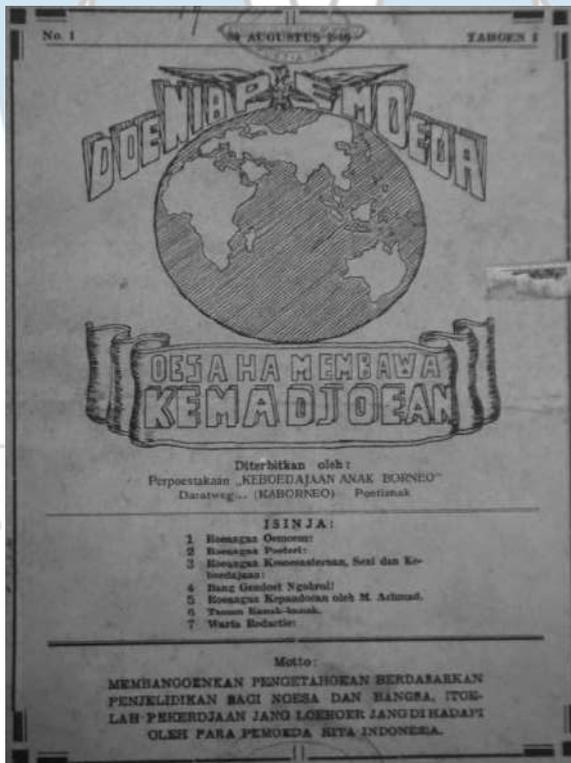
Selain dari pada itoe ada lagi kewadjiban lain jang meminta bagi kita, jalah memperhatikan apa jang terdjadi dan diperboeat oleh saudara2nja diseleroeh Indonesia ini, jang melahirkan ideologie Indonesia Raja, ideologie Indonesia-Baroe teroetama jang mengalir sampai kemari.

Ideologi mana, adalah soeatoe tjita2 jang berdasar kepada sedjarah ketoeroenan bangsa dan bahasa, nasib jang sama dengan arah sehaloean. Dapatkan rassen-psychologie Borneo bersenjawa dan beroleh bahagia dengan ideologie2 itoe?

Oentoek mendjawab pertanjaan diatas hanjalah sedjarah jang akan datang menentoekan itoe..." (Lelanang, Januari 1940: 13).

Lelanang lugas menyatakan orang Borneo, jelas mana konteks Borneo dan Indonesia. Pembaca dapat memosisikan Borneo di dalam konteks Indonesia. Pernyataan yang berbeda dengan artikel lain di *Kesedaran* yang tidak lugas menyatakan Indonesia. Terkadang menggunakan istilah tanah air kita, kepulauan ini, dll. Selain itu, *Kesedaran* lebih sering menggunakan istilah Borneo, sedangkan *Doenia Pemoeda* lebih sering menggunakan Kalimantan. Pernyataan-pernyataan lugas tentang ide nasionalisme Indonesia ditemukan pada majalah *Badan Kebudayaan Borneo*, organ kepemudaan PAB, besutan Gusti Sulung Lelanang.

D. Nasion Indonesia dalam *Doenia Pemoeda*



Gambar 3.5 Sampul *Doenia Pemoeda* Nomor 1 Tahun 1

Doenia Pemoeda adalah majalah resmi dari Badan Kebudayaan (BK) PAB yang dibentuk pada 14 Januari 1940, tujuh bulan setelah PAB berdiri. BK PAB diberi keleluasaan untuk mengorganisasi rumah

tangga dan keuangannya sendiri. Dalam rapat pertamanya, BK menetapkan asimilasi sebagai aliran pergerakan. Aliran ini berprinsip untuk “berdiri diatas keboedajaan sendiri, dan ta’ keberatan mengambil keboedajaan asing, asal serasi tidak meroesak keboedajaan (Borneo) sendiri” (Badan Keboedajaan PAB, Januari 1940: 15). BK memiliki organ kepengurusan sendiri sejak 4 Februari 1940 atas usulan Gusti Sulung Lelanang. Pembentukan organ kepengurusan dalam banyak seksi tidak ditemukan pada badan organisasi PAB yang lain (Anonim [Red.], April-Mei-Juni 1940: 17; 22)¹⁵.

Doenia Pemoeda terbit pertama kali pada 30 Agustus 1940. Pada edisi perdananya, redaktur menyatakan bahwa penerbitan ini adalah “oesaha dari tjita-tjita pemoeda Kalimantan jang loehoer akan nimboelkan nama Kalimantan moeda, Kalimantan moelia raja” (Red., Agustus 1940: 1). Sementara itu, Ketua BK PAB, Gusti Sulung Lelanang menyatakan bahwa *Doenia Pemoeda* adalah penjalin komunikasi pemuda-pemudi terutama di seluruh Borneo. Yang menarik, Lelanang menggunakan bahasa Batak untuk menamakan *Doenia Pemoeda* yakni “samboengan Horas” (Lelanang, Agustus 1940: 2).



Gambar 3.6 G.S. Lelanang
(Sumber: *Kesedaran*, 1940)

Gusti Sulung Lelanang adalah bangsawan Kerajaan Landak yang lulus dari *Normal School* di Meester Cornelis (Jatinegara). Pada tahun 1920 ia diangkat sebagai guru sekolah dasar di Jakarta (Suwignjo,

¹⁵ BK PAB membentuk beberapa bidang, yakni seni pertunjukan *toneel*, musik, pidato, adat istiadat, garda organisasi (bagian keamanan), olahraga, kepanduan, perpustakaan, dan koperasi (*Kesedaran* No. 4-5-6 Th. II, April-Mei-Juni 1940: 22).

1979: 197). Selama menjadi guru, Lelanang juga aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Aktivitas politiknya di Jakarta membuat ia dipulangkan ke Kalimantan Barat pada 1922 oleh pemerintah Hindia Belanda. Selama di Kalimantan Barat, ia banyak merekrut kelompok muda, termasuk guru sekolah untuk mendirikan Sarekat Rakyat (SR) yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia. Keterlibatannya di SR dimulai pada awal 1925 ketika ia bersama Gusti Situt Mahmud dan Muhammad Hambal bergabung dengan Djeranding dkk. dan membentuk SR. Aktivitasnya di SR inilah yang kemudian membawa ia dan kawan-kawan pergerakannya menjalani masa pengasingan ke Digul pada 1926. Sepulang dari Digul pada tahun 1938, Gusti Sulung Lelanang dkk. ikut aktif dalam Parindra dan kemudian PAB (Davidson, 2002: 73; 75; Balunus, 1990: 3; ANRI, 1926).

Berbeda dengan *Kesedaran*, *Doenia Pemoeda* tidak melansir informasi keorganisasian, seperti hasil rapat, hasil kunjungan, AD/ART, kepengurusan terkini, memuat ulang pidato tokoh-tokoh Dewan Rakyat (Volksraad), ataupun berbagai pengumuman perihal Pemerintah Hindia Belanda ataupun Kerajaan Belanda. *Doenia Pemoeda* hanya memuat artikel-artikel pendek bertema kebangsaan. Tema kebangsaan di *Doenia Pemoeda* hanya dikandung dalam pembahasan kepemudaan, keputrian, pendidikan, dan bahasa, bukan dalam persoalan ekonomi apalagi pertanian.

Dalam pembahasan tentang bahasa bertajuk “Bahasa Menoendjoekkan Bangsa” dapat ditemukan sejumlah gagasan yang menunjukkan karakter ideologi nasionalisme pengelola berikut.

“... Dia [bahasa] didjoendjoeng tinggi menilik bagaimana kaadaan bangsa itoe sendiri... soeatoe kaoem jang ta’ mempoenjai kemadjoean, pastilah bahasanja ta’ ada poela mendjadi ingatan pada pergaelian oemoem... peroempamaan, ... dimana2 orang berhadjat mempeladjar, sehingga dimasa Alexander de Groote bahasa Joenani dan peradapannya bertebaran sedjak dari Joenani sendiri, sampai ke doenia Timoer.

Pada abad pertengahan, dikala nabi Moehammad s.a.w. dan kaoemnja mempoenjai kemadjoean ja[n]g tinggi, ... bahasa Arab toeroet poela mendapat kedoeoekan jang terkemoeka. Moelai dari tanah Arab mendjalar ke Rome d.l.l. jg. Mana achirnja mendjadi bahasa doenia.

Kita lihat poela pada masa kini, ... bangsa2 Barat jg. telah bersenang dan bergembira dalam sing[g]jasana... Lihat bangsa Inggris, Djerman dll.... terkemoeka dalam doenia...” (Nyaz., Agustus 1940: 6–7).

Potongan tulisan tersebut memuat orientasi kemajuan merujuk kepada bangsa-bangsa Barat dan Arab. Secara praksis, rujukan tersebut menunjukkan referensi penulis sekaligus mengarah pada audiens (pembaca) yang berkiblat kepada bangsa Arab yang merepresentasikan dunia Islam atau bangsa-bangsa Eropa yang merepresentasikan dunia Barat. Secara ideologis, perujukan pada dua kiblat tersebut menunjukkan ambiguitas dari penulisnya.

Terlepas dari orientasi penulis, pada bagian akhir, penulis menyampaikan “penyadaran” akan keragaman bangsa Indonesia, termasuk bahasanya dan “gagasan” agar bangsa yang beragam ini memiliki satu bahasa bersama.

“Kita pemoeda2 jg. berdiri dari golongan jang bermatjam2; tetapi berlainan golongan soedah disatoekan oleh perasaan keinsjafan dan kesadaran. Persatoean jang kokoh dan kesadaran itoe, dapat menaikkan kita ketingkat kemadjoean jang tinggi. Dengan adanja pengakoean hati kita soedah semestinja poela kita bersatoe hati oentoek me[n]jinggikan bahasa kita Indonesia... Moestahil rasanja kita akan mendapat kemadjoean apabila baha[saj] kita masih bertjerai-berai atau kerendahan” (Nyaz., Agustus 1940: 7).

Paragraf tersebut menunjukkan bahwa usaha untuk menumbuhkan kesadaran nasional melalui kesamaan bahasa. Satu hal yang menarik, potongan artikel tersebut menganggap bahwa pembacanya sudah memiliki keinsafan, citra yang berbeda dari narasi umum dalam artikel-artikel yang diajukan *Kesedaran* yang menganggap pembacanya yakni orang Borneo itu belum lagi insaf, alias masih banyak yang belum paham atau berilmu pengetahuan.

Wacana kesatuan bahasa sangat penting sebagai modal penciptaan sebuah komunitas bersama yang menggunakan sebuah alat komunikasi bersama. Anderson menyatakan bahwa bahasa adalah embrio komunitas yang dibayangkan.

Selain bahasa, kesadaran nasional dalam bentuk wacana *self-rule* (berdiri di kaki sendiri) diperoleh dari artikel bertema pendidikan berjudul “Apakah Maksoednja Kita Disekolahkan?!” Artikel yang diawali dengan mengangkat fenomena sosial kala itu, kemudian mengajukan moto *Doenia Pemoeda*, dan mengakhiri dengan imbauan yang secara tidak langsung memuat tuntutan hak sebagai bangsa untuk mengatur diri sendiri.

Fenomena sosial berupa pemikiran orang tua pada masa itu (dan sebenarnya masih relevan dengan kondisi orang tua pada masa kini di Indonesia) yang berharap agar anak-anak yang disekolahkan dapat menjadi pegawai yang dalam pandangan penulis artikel tidak berbeda dari seorang buruh.

"Apakah maksoednja kita disekolahkan oleh iboe bapa kita???... Inilah soeatoe pertanjaan jang soekar didjawab oleh pemoeda kita di Indonesia kita ini... Boeroeh, sekali lagi boeroeh. Inilah jang diidam-idamkan oleh bapa2 kita di Indonesia ini. Tjoba hilangkan pikiran oentoek memboeroeh itoe... Ta' melihatkah kamoe akan gedoeng2 jg. indah2 fabriek2 jg. besar2 dan peroesahaan[an] peroesahaan jang lainnja, jang kepoenjaan dari bangsa asing?? ... beroesahalah dari sekarang, ... OESAHA MEMBAWA KEMADJOEAN. Dljjadi dioesahamoelah letaknja nasib bangsa kita Indonesia..." (Emdjias, Agustus 1940: 5–6).

Artikel terkait kebudayaan bertajuk "Poeisi Baroe" memuat bentuk kesadaran nasional "*new nation*". Bentuk kesadaran atas lahirnya produk baru ini, menurut Hugh Seton-Watson (dalam Budiawan, 2017: 25–28) efektif mengonstruksi pengalaman yang sama sebagai sebuah komunitas. Kesadaran "*new nation*" adalah usaha yang baik untuk menggalang dukungan massa seperti berikut.

"Poeisi baroe (sa'ir) jang ditoedjoe oleh generatie generatie baroe sekarang... memantjarkan warna baroe indah, menarik, bergelora, hidoep, hidoep... sengadja redactie tjantoemkan... ialah oentoek perbandingan, karena dimana telah ada kebenaran, bila tiada kesalahan, jang memberikan kekajaan dalam kesalahan, jang memberikan kekajaan dalam pengalaman hidoep manoesia" (Asnawi, Agustus 1940: 12–13).

Artikel lain bertajuk "Keboedajaan" menyampaikan dua konten utama, yakni kebudayaan (hasil cipta, karsa, dan karya) bangsa itu beragam dan kebudayaan manusia itu dinamis, seperti pada uraian berikut.

"Tiap2 bangsa selaloe melahirkan dalam pengalaman penghidoepan bangsa itoe dari zaman ke zaman, toeroen temoeroen dari nenek mojangnja jang membentoeke keboedajaan kebangsaannja masing2. Manoesia bangsa jang soedah memboeat perhoeboengan satoe sama lain... pergaoelan dalam negeri dan daerahnja, selaloe menoeboehkan Cultuur (Keboedajaan)" (Badoewi, Agustus 1940: 13–14).

Perbedaan dan perubahan kebudayaan itu adalah untuk "kesempoernaan hidoep bahagian jang membawanja ketingkat ketjerdasan akal dan boedi". Yang menarik, penulis memberi

ilustrasi perbedaan kebudayaan dengan menghadirkan beragam etnik berikut. “... Bentoek roemah orang Batak alam Minangkabau ada berlainan dengan bentoek roemah jang dibangoenkan orang Borneo. Dengan demikian djoega bentoek roemah orang Djawa...” (Badoewi, Agustus 1940: 13-14). Paparan ini mendukung kesadaran “*new nation*” pada artikel sebelumnya melalui tampilan beragam etnik, sebuah narasi yang berbanding terbalik dengan *Kesedaran* yang membawa pembaca pada glorifikasi masa lalu.

Secara redaksional, *Doenia Pemoeda* jauh lebih sering menggunakan istilah Kalimantan--yang berasal dari penduduk Kalimantan sendiri--daripada Borneo, penamaan yang diberikan oleh para penjelajah Eropa. Penggunaan istilah ini menunjukkan kesadaran akan penggunaan bahasa yang dilahirkan oleh bangsa sendiri. Kesadaran nasional melalui bahasa yang diaplikasikan dalam penyebutan pulau. Selain itu, kelugasan dalam menunjukkan cita-cita nasion Indonesia jelas disampaikan pada sebagian besar artikelnya.

E. Simpulan

Menilik dari namanya, Persatoean Anak Borneo (PAB) memberi kesan ideologi yang disebut van Miert sebagai nasionalisme pulau atau nasionalisme teritorial ataupun nasionalisme regional yang disebut Henley. Nyatanya, PAB dalam kedua majalah resminya menyuguhkan porsi lebih besar pada ide kebangsaan Indonesia dan minim akan ekspresi primordial. Rasa kebangsaan regional Borneo (sebagaimana penamaannya) tampak jelas tidak pernah hidup yang tampak jelas dari kebingungan PAB dalam mendefinisikan “anak Borneo”. Selebihnya, jika pun organ publikasi resmi PAB dibentuk untuk menciptakan nasionalisme Borneo maka tugas tersebut dikerjakan setengah hati karena lebih dimanfaatkan untuk menyebarluaskan ideologi para pengurusnya (redaktur).

Wacana umum yang mengemuka dalam kedua majalah adalah *right to self-determinism* (hak untuk mengatur diri sendiri). Pernyataan ini menggugah kesadaran politik yang dalam skop organisasi pergerakan nasional di Jawa (GAPI, organisasi afiliasi tokoh utama PAB) diwujudkan melalui tuntutan Indonesia berparlemen (*self-rule*), ide yang mengarah pada tujuan kemerdekaan.

Right to self-determinism dapat dilihat dari semboyan dan pesan-pesan yang disampaikan dalam berbagai artikel. Bedanya, cakupan wacana tersebut lebih memunculkan *sense of community* Borneo dalam majalah *Kesedaran* dan *sense of community* Indonesia dalam *Doenia Pemoeda*. Resepsi tersebut muncul dari intensitas dan kelugasan dalam penggunaan nama Indonesia dan pembahasan berbagai hal dalam batas-batas komunitas yang mengacu pada teritorial.

Lebih jauh, perbedaan kemasam umum ide kebangsaan yang dikemukakan dalam *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda* menunjukkan aliran yang sesungguhnya dianut oleh para redaktornya. Aliran asimilasi terlihat dalam anjuran pendidikan dalam cara Barat dan penggunaan bahasa Belanda pada majalah *Kesedaran*. Namun, di sisi lain PAB juga kerap mempromosikan sekolah-sekolah rakyat tak berbayar khas aliran asosiatif. Sikap ambigu dalam *Kesedaran* tidak muncul dalam *Doenia Pemoeda* yang menonjolkan aliran asosiasi melalui anjuran penggunaan bahasa Indonesia, penjunjungan kebudayaan setempat, dan peraguan kebudayaan Eropa bagi bumiputra.

Kedua aliran dan perbedaan ide-ide kebangsaan yang mengemuka dalam *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda* sangat dipengaruhi oleh pengelola terbitan. *Kesedaran* dikelola oleh dewan redaksi yakni pengurus organisasi yang mencakup pengurus berstatus pegawai Pemerintah Hindia Belanda, pengusaha bumiputra, dan bangsawan, baik pro-kolonial maupun anti-kolonial dengan latar belakang beragam, termasuk pengikut nasionalisme Islam. Oleh karena itu, meskipun penciptaan nasionalisme Borneo tetap diusahakan, penyebarluasan nasionalisme Indonesia yang dianut oleh sebagian redaksi melalui banyak tulisannya (terutama Ja' Sabran dan G.S. Lelanang) mengemuka lebih kuat. Sementara itu, *Doenia Pemoeda* yang dipimpin secara mandiri oleh G.S. Lelanang lebih leluasa menyampaikan ideologi nasionalisme Indonesia yang secara tegas tersampaikan dalam artikel-artikelnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip, Buku, Jurnal, dan Tugas Akhir

- Abdurrahman, Djeranding. 1975. *Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan*. Pontianak: Naskah Sumber Tidak Diterbitkan.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Inventaris Arsip Tanah Merah*, 1927.
- Balunus, H.M. Baroamas Jabang. 1990. *Penjelasan-Penjelasan tentang Perjuangan NIP dan Serikat Rakyat*. Pontianak: Naskah Sumber Tidak Diterbitkan.
- Budiawan. 2017. *Nasion & Nasionalisme: Jelajah Ringkas Teoretis*. Yogyakarta: Ombak.
- Cahyaningrum, Dewi. 2018. "Analisis Wacana-Historis Model Ruth Wodak" dalam *Hamparan Wacana: Dari Praktik Ideologi, Media, Hingga Kritik Poskolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Davidson, Jamie Seth. 2002. "Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia". Disertasi. Washington: Universitas Washington.
- Fakih, Farabi. 2014. "Akar-Akar Kanan daripada Nasionalisme Indonesia: Nasionalisme Jawa dalam Konteks Kesenjariannya" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11, No. 1, hlm. 37-50.
- Herlina MR, Khayinatun. 2019. "Penafsiran Muhammad 'Abduh tentang Al-Qawamah dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Perempuan dalam Ranah Domestik". Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Haris, Didik M. Nur dan Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2017a. "Akar Tradisi Politik Sufi Ulama Kalimantan Barat Abad Ke-19 dan 20" dalam *Iftimayya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 (1), hlm. 39-62.
- _____. 2017b. "Pemikiran Keagamaan Muhammad Basuni Imran" dalam *Al-Banjari* Vol. 16, No. 2, hlm. 161-185.
- Henley, David E.F. 1993. "Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa" dalam *Indonesia*, No. 55, hlm. 91-112.
- Jabbar, Luqman Abdul. 2015. "Tafsir Al-Quran Pertama di Kalimantan Barat (Studi Naskah Kuno Tafsir Surat Tujuh Karya Maharaja Imam Kerajaan Sambas 1883-1976)" dalam

Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies Volume 5 Nomor 1, hlm. 100–111.

- Listiana, Dana, Karel Juniardi, dan Raistiwar Pratama. 2014. *Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak-Kepel Press.
- Miert, Hans van. 1996. "The 'Land of the Future': The Jong Sumatranen Bond (1917–1930) and Its Image of the Nation" dalam *Modern Asian Studies*, Vol. 30, No. 3, hlm. 591–616.
- . 2003. *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918–1930*. Jakarta: Pustaka Utan Kayu.
- Niwandhono, Pradipto. 2011. *Yang Ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Djaman Baroe.
- . 2014. "Gerakan Teosofi dan Pengaruhnya Terhadap Kaum Priyayi Nasionalis Jawa 1912–1926" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11 No. 1, hlm. 25–36.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (ed.). 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Buku Obor-KITLV Jakarta.
- Prabowo, Rechardus Deaz. 2017. "Sejarah Pemikiran Modern Surat Kabar Boedi Oetomo dan Soera Moehammadijah di Yogyakarta Tahun 1920–1928". Tesis. Yogyakarta: FIB UGM.
- Purba, Juniar. 1993. *Rahadi Osman*. Pontianak: BKSNT Pontianak.
- Salim, I.F.M. Chalid. 1977. *Lima Belas Tahun Digul: Kamp Konsentrasi di Nieuw Guinea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*. Terj. Hazil Tanzil dan J. Taufik Salim. Jakarta: Bulan Bintang.
- Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-Pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Shiraishi, Takashi. 2001. *Hantoe Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial*. Yogyakarta: LKiS.
- Soedarto, Widodo Adhisidharto, dan Sugeng. 1978/1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Suwignjo, R. Mahmud dan Ahmad Mansur. 1979. *Sebelas Perintis Kemerdekaan Indonesia dari Kalimantan Barat*. Pontianak: Naskah Belum Diterbitkan.
- Tanasaldy, Taufiq. 2012. *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politic of West Kalimantan*. Leiden: KITLV.
- Utama, Wildan Sena. 2014. "Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkoesoemo, dan Douwes Dekker 1912-1914" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11, No. 1, hlm. 51-70.
- Wibisono, Joss. 2014. "Soewardi di Pengasingan: Nasionalisme Versus Sosialisme" dalam *Lembaran Sejarah* Vol. 11, No. 1, hlm. 1-24.

Surat Kabar dan Majalah

- Abdoellah, Ja' Ismail. Agustus 1940. "Berita dari P.A.B. Tjabang Pontianak" dalam *Kesedaran* No. 8 Th. II, hlm. 15.
- Anonim. Januari 1940. "Rapat Anggota PAB Tjabang Pontianak" dalam *Kesedaran* No.1 Th. II, hlm. 5.
- _____. Januari 1940. "Statuten Persatoean Anak Borneo (PAB)" dalam *Kesedaran* No.1 Th. II, hlm. 19.
- _____. Januari 1940. "Berita Redactie dan Administratie" dalam *Kesedaran* No. 1 Th. II, hlm. 1; 4-5; 11.
- _____. Januari 1940. "Conferentie Pertama" dalam *Kesedaran* No. 1 Th. II, hlm. 4.
- _____. Januari 1940. "Rapat Anggota PAB Tjabang Pontianak" dalam *Kesedaran* No. 1 Th. II, hlm. 5.
- _____. Januari 1940. "Makloemat PAB" dalam *Kesedaran* No. 1 Th. II, hlm. 11.
- _____. Februari 1940. "Berita Redactie dan Administratie: Apa Loe Maloe???" dalam *Kesedaran* No. 2 Th. II, hlm. 2.
- _____. Februari 1940. "Perdjalanan Wakil2 Pengoeroes Besar PAB ke Sanggau Via Ngabang" dalam *Kesedaran* No. 2 Th II, hlm. 13.
- _____. Februari 1940. "Mendirikan Tjabang di Sanggau" dalam *Kesedaran* No. 2 Th. II, hlm. 14-15; 19.
- _____. April-Mei-Juni 1940. "Perdjalanan Wakil2 Pengoeroes Besar P.A.B. Pontianak-Poetoessibau pergi-poelang" dalam *Kesedaran* No. 4-5-6 Th. II, hlm. 32-33.

- April-Mei-Juni 1940. “FKIIP dan Sekolah” dalam *Kesedaran* No. 4-5-6 Th. II, hlm. 32-33.
- April-Mei-Juni 1940. “Persatoean Anak Borneo. Genap Satoe Tahoen Oesianja 28 Mei 1939-28 Mei 1940” dalam *Kesedaran* No. 4-5-6 Th. II, hlm. 17-25.
- Juli 1940. “Pengertian Tentang Anak Borneo” dalam *Kesedaran* No. 7 Th. II, hlm. 3-4.
- Agustus 1940. “Pengertian Tentang Anak Boneo II” dalam *Kesedaran* No. 8 Th. II, hlm. 3-4.
- Oktober 1940. “Pendidikan” dalam *Kesedaran* No. 9 Th. II, hlm. 6.
- Anwar, Arifin. Agustus 1940. “Kontak dengan Masa” dalam *Kesedaran* No. 1 Th. II, hlm. 13.
- Asnawi, Anwar. Agustus 1940. “Poeisi Baroe” dalam *Doenia Pemoeda* No. 1 Th. I, hlm.12-13.
- Badan Keboedajaan PAB. Januari 1940. “Badan Keboedajaan PAB” dalam *Kesedaran* No. 1 Th. II, hlm. 15.
- Badoewi, Achmad ‘al. Agustus 1940. “Keboedajaan” dalam *Doenia Pemoeda* No. 1 Th. I, hlm. 13-14.
- Basrie, Hasan. Februari 1940. “Verslag Openbaar-vergadering dan pemilihan Bestuur² P.A.B. Tjabang Poetoes-Sibau tanggal 5 Mei 1940” dalam *Kesedaran* No. 2 Th. II, hlm. 39.

Berani No. 1, Juli 1925.

Borneo Barat, 25 November 1939, hlm. 1.

Borneo Barat Bergerak No. 13, April 1920, hlm. 14.

Emdjias. Agustus 1940. “Apakah Maksoednja Kita Disekolahkan?!” dalam *Doenia Pemoeda* No. 1 Th. I, hlm. 5-6.

Halilintar No. 18, November 1923.

Halilintar Hindia No. 44, 1924.

Lelanang, G. Soeloeng. Januari 1940. “Keboedajaan Borneo” dalam *Kesedaran* No. 1 Th. I, hlm. 12-13.

..... April-Mei-Juni 1940. “Dioesahamoe Letak Nasibmoe” dalam *Kesedaran* No. 4-5-6, hlm. 3-4.

..... Agustus 1940. “Kata Pengantar dari Ketoea Badan Keboedajaan PAB” dalam *Doenia Pemoeda* No. 1 Th. I, hlm. 2-3.

- Matahari Borneo* No. 5 Th. I, November 1928, hlm. 1; 4.
- Nyaz. Al., Agustus 1940. “Bahasa Menoendjoekkan Bangsa” dalam *Doenia Pemoeda* No.1 Th. I, hlm. 6-7.
- Oesman. Februari 1940. “Verslag dari Rapat-tertoetoep P.A.B. Tjabang Mempawah” dalam *Kesedaran* No. 2 Th. II, hlm. 38.
- Red., Agustus 1940. “Oetjapan Redactie” dalam *Doenia Pemoeda* No. 1 Th. I, hlm. 1.
- Sabran, Januari 1940. “Keterangan Asas P.A.B. (Persatoean Anak Borneo)” dalam *Kesedaran* No. 1 Th. II, hlm. 7.
- Soeara Pakat*, No. 8 Th. II, Agustus 1940.

Informan

1. Ya' Seman Anom (92 tahun, aktivis Surya Wirawan, organ kepemudaan Parindra), wawancara di Kampung Raja, Ngabang pada 1 April 2019.
2. Ya' Kusairi (92 tahun, aktivis Surya Wirawan, organ kepemudaan Parindra), wawancara di Kampung Tungguk, Ngabang pada 4 April 2019.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Epilog

Nasionalisme: Dari Kalimantan Barat untuk Indonesia

Zulkifli

Dalam kurun waktu sekitar lima tahun terakhir negeri ini menghadapi sebuah masalah cukup mendasar, yaitu hadirnya paham dari luar yang berupaya mempertanyakan ulang eksistensi NKRI dengan maraknya pro-kontra sistem khilafah serta isu bangkitnya kembali PKI. Bangsa ini seolah terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mendukung sistem khilafah yang diikuti dengan pernyataan bahwa PKI bangkit lagi di negeri ini. Sementara itu, kelompok lain menolak sistem khilafah menyatakan NKRI sudah “harga mati!”. Di balik pro-kontra sistem khilafah, saat ini berbagai elemen bangsa dengan inisiatif sendiri dan/atau dengan dukungan pemerintah berupaya untuk kembali memperkuat nasionalisme¹ Indonesia untuk menopang tetap tegaknya NKRI. Upaya memompa semangat nasionalisme semakin marak dilakukan oleh berbagai kalangan dan merambah hingga ke berbagai pelosok negeri.

Perjalanan bangsa Indonesia setelah 74 tahun merdeka memang tidak akan lepas dari gangguan dan ujian terhadap nasionalismenya. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, nasionalisme Indonesia pernah mendapatkan gangguan dari kolonialisme, komunisme, “Islamisme”, federalisme, dan bahkan separatisme. Namun, sebagian besar gangguan dan ujian ideologi tersebut berhasil dilalui oleh

¹ Dari perspektif kebahasaan, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (<https://kbbi.web.id/nasionalisme>, diakses 26 November 2019 pukul 16.25), nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.

bangsa Indonesia.² Demikian juga dengan munculnya isu dan keinginan menerapkan sistem khilafah, penulis berkeyakinan akan berhasil dilalui oleh bangsa ini dengan semakin menguatnya semangat nasionalisme Indonesia. Keberhasilan mempertahankan semangat dan rasa nasionalisme disebabkan nasionalisme Indonesia berurat berakar dari perjalanan panjang sejarah bangsa ini jauh sebelum kemerdekaan NKRI. Seorang sejarawan dan akademisi politik dari Cornell University Amerika Serikat George McTurnan Kahin menyatakan bahwa "... nasionalisme Indonesia kontemporer terutama berakar dalam keadaan negeri ini pada abad kedua puluh, namun beberapa dari akar-akarnya berasal dari lapisan sejarah yang jauh lebih tua" (Kahin, 1995: 1).

Tiga tulisan hasil penelitian, yang ada dalam buku ini, sangat penting artinya untuk menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia telah tumbuh dan berkembang subur pada dua dekade sebelum kemerdekaan, khususnya di Kalimantan Barat. Buku ini semakin menarik untuk dibaca karena ia menghadirkan sebuah perspektif baru, bahwa nasionalisme Indonesia bukan hanya tumbuh subur di Pulau Jawa, melainkan juga di tempat lain, khususnya di Kalimantan Barat. Kahin (1995: 1) menyebutkan bahwa "Untuk mengerti sifat nasionalisme Indonesia dan gerakan revolusioner sebagai kelanjutannya, perlu dimiliki suatu pengetahuan tentang ciri-ciri terpenting dari lingkungan sosial yang menimbulkannya." Studi yang dilakukan oleh ketiga penulis buku ini sangat tepat untuk memahami bagaimana nasionalisme Indonesia yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial di daerah-daerah. Tulisan dalam buku ini seolah ingin membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia memang bersumber dari seluruh wilayah Indonesia, dan oleh karenanya akarnya sangat kuat menghunjam di bumi pertiwi ini. Sekuat apa pun terpaan ujian terhadap nasionalisme Indonesia akan dapat dilalui dengan selamat dan NKRI tetap utuh.

Nasionalisme Indonesia, melalui buku ini, terbukti bersumber dari daerah-daerah, dan tidak sekadar di Jawa. Rahmayani yang mengkaji ide nasionalisme ekonomi dalam tiga surat kabar lama menunjukkan bahwa meskipun berbeda ideologi, *Warta Borneo*, *Sinar Borneo*, dan *Oetoesan Borneo* sama-sama mengusung

2 Pemisahan diri Timor Leste menjadi negara sendiri adalah salah satu bentuk keberhasilan separatisme di Indonesia.

gagasan pentingnya kemandirian ekonomi seraya tetap kritis terhadap pemerintah Hindia Belanda. Lisyawati dalam tulisannya menyebutkan bahwa peran Haji Rais bin Abdoerrachman sebagai tokoh pergerakan yang menyampaikan ide-ide nasionalisme melalui pers dan perjuangannya melalui berbagai organisasi tidak kalah penting andilnya dalam perjuangan menuju Indonesia yang mandiri dan merdeka. Listiana juga mengungkapkan bahwa meskipun Persatoean Anak Borneo (PAB) terkesan sebagai organisasi kedaerahan, namun terbukti menyuarakan semangat nasionalisme Indonesia: “PAB dalam kedua majalah resminya menyuguhkan porsi lebih besar pada ide kebangsaan Indonesia dan minim akan ekspresi primordial”. Sekalipun PAB berbasis putra Borneo (Kalimantan), organisasi ini memiliki nasionalisme ke-Indonesia-an, *dari Borneo untuk Indonesia*. Penyebarluasan wacana *right to self-determinism* oleh PAB melalui dua majalahnya jelas mengarah pada Indonesia merdeka.

Pada awal abad ke-20, berbagai ideologi dari luar Indonesia seperti komunisme dan “Islamisme” hadir sebagai jawaban atas kondisi atau jiwa zamannya. Meskipun isu kedua ideologi tersebut kembali mengemuka pada era sekarang, hal ini tidak bisa disamakan dengan eksistensinya pada era pra-kemerdekaan. Dalam perspektif ilmu sejarah dikenal terminologi *zeitgeist* atau jiwa zaman, yang bermakna pemikiran dominan pada suatu masa yang menggambarkan dan memengaruhi sebuah budaya dalam masa itu sendiri. Tokoh-tokoh pergerakan Kalimantan Barat, seperti H. Rais Abdoerrachman, Djeranding Abdurrahman, dan Gusti Sulung Lelanang oleh Pemerintah Hindia Belanda disebut sebagai penganut komunis yang fanatik. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Listiana, paham komunisme yang dianut adalah sebagai alat untuk melawan kolonialisme, bukan untuk melemahkan atau melawan semangat ke-Indonesia-an. Ideologi yang sama dapat memiliki pemaknaan yang berbeda karena makna mengikuti jiwa zamannya.

Apresiasi atas adanya kajian tentang eksistensi Kalimantan Barat dalam pembentukan nasionalisme Indonesia yang selama ini masih dianggap perifer. Nasionalisme seolah hanya milik masyarakat di Pulau Jawa. Melalui tulisan yang mengkaji jejak sejarah nasionalisme di Kalimantan Barat ini dapat memberi warna baru bagi peran daerah-daerah dalam membangun nasionalisme. Harus diakui bahwa

kajian sejarah Kalimantan Barat secara ilmiah dirasa masih sangat kurang, jika dibanding dengan daerah-daerah lain, khususnya Jawa. Hadirnya buku ini setidaknya mampu memberikan sumbangsih yang sangat berarti untuk menjelaskan masa lalu Kalimantan Barat serta andilnya dalam membangun NKRI. Terlebih lagi terkait dengan masa awal abad ke-20, masih sangat kurang tulisan-tulisan yang representatif.

Penggunaan sumber-sumber surat kabar semakin memberikan bobot tersendiri atas buku ini. Salah satu sumber sejarah yang cukup baik memotret kehidupan sosial masyarakat pada masa lalu adalah berita-berita yang dimuat oleh media cetak. Demikian juga halnya dengan kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat pada masa lalu. Berdasarkan informasi dari *Katalog Surat Kabar Perpustakaan Nasional 1810–1981* (Edisi Revisi), ada sejumlah terbitan berkala yang terbit di Pontianak Kalimantan Barat, yaitu (1) *Borneo Barat Bergerak* (1920); (2) *Soera Borneo* (1923); (3) *Warta Borneo* (1924); (4) *Berani* (1925); (5) *Halilintar*; (6) *Sinar Borneo* (1926); (7) *Kapoeas Bode* (1927); (8) *Oetoesan Borneo* (1928); (9) *Borneo Barat* (1940); (10) *Pembangunan*; (11) *Matahari Borneo*; dan (12) *Pemberita Pontianak*.³ Meskipun konten surat kabar lama yang menjadi sumber-sumber ketiga tulisan dalam buku ini agak berbeda dengan berbagai media cetak saat ini, ada kesan bahwa tulisan-tulisan yang ada dalam surat kabar lama lebih menggambarkan dan mewakili pemikiran dan pendapat para penulis. Sementara itu, tulisan-tulisan dalam media cetak saat sekarang cenderung menggambarkan dan mewakili pandangan resmi dewan redaksi (yang terkadang mewakili dan menjadi media penyalur aspirasi kelompok tertentu, bukan perorangan).

Buku ini juga sangat menarik dibaca, ibarat melihat mozaik. Mozaik nasionalisme yang bertumbuh-kembang di Kalimantan Barat: wacana nasionalisme ekonomi, ide nasionalisme seorang tokoh bernama H. Rais bin Abdoerrachman dan nasionalisme organisasi pergerakan Persatoean Anak Borneo (PAB). Ketiganya berbasis dan mengandalkan sumber tertulis berupa surat kabar yang hadir di Kalimantan Barat (*Borneo Barat*) pada tahun 1920-an hingga 1940-an. Dari aspek konten ketiga tulisan dalam buku ini dapat dikategorikan

³ Berdasarkan hasil penelitian Listiana dalam buku ini, ternyata masih ada surat kabar lama yang belum masuk dalam katalog ini, yaitu *Kesedaran* dan *Doenia Pemoeda* yang terbit pada tahun 1940.

sejarah mentalitas atau sejarah pemikiran⁴ yang disuguhkan melalui tiga perspektif berbeda dalam membincang ide nasionalisme di Kalimantan Barat. Kartodirdjo (1992: 172–173) menyebutkan bahwa untuk memahami pergerakan nasional kiranya sejarah mentalitas tidak dapat ditinggalkan, lebih-lebih apabila masalah kesadaran yang dipandang sebagai awal dari segala perkembangan kemudian. Sejarah mentalitas meliputi ide, ideologi, orientasi nilai, mitos, segala macam struktur kesadaran.

Kuntowijoyo (2003: 190–191) menjelaskan bahwa pelaku sejarah pemikiran bisa perseorangan, isme (seperti nasionalisme, sosialisme, pragmatisme), gerakan intelektual, periode, dan pemikiran kolektif. Tugas sejarah pemikiran ada tiga: (1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah; (2) melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh, dan berkembang, serta (3) pengaruh pemikiran pada masyarakat bawah. Berdasarkan penjelasan Kuntowijoyo ini, tugas yang ketiga dari sejarah pemikiran belum dibahas dalam ketiga tulisan di buku ini. Oleh karena itu, perlu ada penelitian lanjutan yang mengkaji nasionalisme yang berkembang di Kalimantan Barat—yang tertuang dalam buku ini—dan pengaruhnya pada masyarakat bawah. Para peneliti sejarah, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber dokumen tercetak perlu menggunakan metode yang lebih mutakhir, seperti penggunaan *software* Nvivo, terlebih untuk mengurai benang merah isi sebuah tulisan.

Ide besar akan menjadi sesuatu yang kecil, bahkan dianggap tiada jika tanpa didokumentasikan dan dipublikasikan. Sebaliknya, ide kecil akan menjadi besar jika didokumentasikan dan dipublikasikan secara luas. Nasionalisme yang berkembang di Kalimantan Barat dari tiga perspektif dalam buku ini adalah ide besar. Ia akan menjadi kecil bahkan hilang jika tidak dipublikasikan secara luas. Ide-ide nasionalisme yang sudah terdokumentasi dalam surat kabar-surat kabar lama akan hilang ditelan zaman jika tidak ada yang memublikasikannya secara luas. Dalam konteks ini, buku ini menjadi media yang sangat baik untuk memublikasikan ide besar nasionalisme dari Kalimantan Barat untuk Indonesia.

4 Sejarah pemikiran adalah terjemahan dari *history of thought*, *history of ideas*, atau *intellectual history*. Sejarah pemikiran didefinisikan oleh Roland N. Tromberg (dalam: Kuntowijoyo, 2003: 189) sebagai *the study of the role of ideas in historical events and process*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kahin, George McTurnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan & Sebelas Maret University Press.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Tentang Penulis

Any Rahmayani (anyrahma98@gmail.com) adalah Peneliti Ahli Muda di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalimantan Barat. Ia menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004. Bidang perhatiannya mencakup kajian sejarah kota, sosial, dan ekonomi Kalimantan, terutama Kalimantan Barat. Publikasi berupa tulisan dalam buku, jurnal, dan bunga rampai, antara lain “Permukiman Tionghoa di Singkawang Masa Kolonial” (2014), “Aktivitas Ekonomi Komunitas Bugis di Kesultanan Pontianak Pada Awal Abad Ke-20 Hingga Berakhirnya Masa Kolonial” (bagian dari buku *Aktivitas Ekonomi Orang-Orang Bugis di Kesultanan Pontianak pada Abad Ke-19 hingga Akhir Masa Kolonial*, 2018), “Aktivitas Niaga Antara Pontianak dan Singapura Tahun 1819–1942” (2017), “Niaga dan Kuasa di Kapuas Awal Abad ke-20” (bagian dari buku *Dari Hulu ke Hilir: Integrasi ekonomi di Sungai Kapuas pada 1900–1942*, terbit 2018).

Dana Listiana (dana.listiana@gmail.com) adalah Peneliti Ahli Muda di BPNB Kalimantan Barat. Ia lulus dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran tahun 2006 dengan skripsi “Perkembangan Pasar Pontianak sebagai Pusat Perekonomian *Afdeelingshoofdplaats* Pontianak 1918–1942”. Lulus dari Program Studi S-2 Sejarah Universitas Gadjah Mada pada 2017 dengan tesis “Sistem *Pacht* dan Perluasan Negara Kolonial di Pontianak 1819–1909”. Awal bergabung di BPNB, ia berfokus pada studi sejarah kota, antara lain “Kota Pontianak 1779–1942: Lahir dan Berkembangnya Sebuah Kota Kolonial” (2009); “Dua Wajah Kota Martapura: Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi” (2010); “Banjarmasin Akhir Abad XIX hingga Medio Abad XX: Perekonomian di Kota Dagang Kolonial” (2011); “Tanah Sintang Masa Kolonial: Telaah Sederhana tentang Perubahan Status Pemerintahan dan Wilayah Kekuasaan” (2012); “Pasir Abad XVIII–XX: Kota Bandar Menjadi Lanskap Gubernemen” (2013); dan “Kampung Cina Banjar di Banjarmasin”. Selanjutnya, ia mengalihkan fokus pada sejarah pemikiran dengan kajian antara lain berjudul “Pers dan Pemikiran Intelektual di Borneo Barat Masa Kolonial” (2014); “Rubrik *Sinar Iboe* di Majalah *Tjaja Timoer*: Gagasan

Penguatan Perempuan dalam Pers Lokal di Kalimantan Barat Tahun 1928” (2017); dan “Satu Dayak dan Menjadi Indonesia-Dayak: Impian Persatuan Bangsa dalam *Soera Pakat* Terbitan Banjarmasin Tahun 1940an” (2019).

Lisyawati Nurcahyani (lisyawati.nurcahyani@gmail.com) adalah Peneliti Ahli Muda di BPNB Kalimantan Barat. Ia lahir di Surakarta pada 9 Februari 1965. Lulus dari jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang tahun 1990. Ia melanjutkan pendidikan dan lulus Pasca-Sarjana Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura tahun 2003 dengan tesis “Strategi Adaptasi Korban Kerusakan Sambas di Relokasi Tebang Kacang”. Pada tahun 1991, ia ditetapkan sebagai peneliti di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak. Pernah menjabat sebagai Kasubbag TU pada tahun 1999 dan diangkat sebagai Kepala Balai pada tahun 2000. Penelitian yang telah dilakukan, antara lain berjudul “Sejarah Sosial Melawi”; “Balikpapan: Dari Rawa Menjadi Sumber Harta 1907-1942” (tim); “Dari Pemukiman Menuju Pelabuhan: Samodra Tarakan 1878-1942” (tim); “Dinamika Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan di Pantai Timur Kalimantan Abad XVII-XIX” (tim); “Politik dan Ekonomi Perdagangan Bulungan Abad XIX-XX” (tim).

Zulkifli (zulkifli.abdillah@ymail.com) lahir di Sungai Udang (Kabupaten Kubu Raya), 28 Juli 1971. Sejak tahun 1998 berprofesi sebagai Dosen Tetap Sejarah Peradaban Islam di IAIN Pontianak. Pernah menjadi dosen di Universitas Tanjungpura dan STAI Mempawah. Pendidikan Sarjana (S.Ag.) ditempuh di Fakultas Tarbiyah IAIN Pontianak (Prodi Pendidikan Agama Islam, lulus 1996), Magister (M.A.) di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam, lulus 2007) dan Doktor (Dr.) di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjadjaran Bandung (Peminatan Sejarah, lulus 2017). Di masyarakat saat ini aktif pada beberapa organisasi seperti Lembaga Studi Islam dan Masyarakat (LSIM), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kalbar, Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI) Kalbar, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalbar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar.

Wacana Nasionalisme

dalam Pers Kalimantan Barat
pada Masa Pergerakan Kebangsaan

Kata nasionalisme mengandung spirit persatuan Indonesia. Nyatanya, hari ini kita melihat spirit itu memudar oleh menguatnya rasa perbedaan. Memandang kembali era di saat gagasan kebangsaan tumbuh merupakan refleksi historis yang menjadi tanggung jawab bersama. Bunga rampai ini mengajak pembaca memahami bahwa dalam proses mengimajinasikan negara, gagasan kebangsaan disebarkan, diperdebatkan, dan akhirnya disepakati di atas berbagai perbedaan ideologi dan kondisi sosio-kultural yang beragam di berbagai daerah di Indonesia.

Gejala nasionalisme di Kalimantan Barat terdeteksi melalui belasan pers cetak yang terbit pada tahun 1920-an hingga 1940-an. Perkembangan media massa cetak kala itu telah menjadi kunci dari pemuatan gagasan-gagasan yang membangun kesadaran nasional.

Bagaimana bentuk-bentuk nasionalisme yang mengemuka pada pers Kalimantan Barat pada masa pergerakan nasional? Mengapa bentuk-bentuk nasionalisme tersebut muncul di Kalimantan Barat? Bunga rampai *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan* ini secara runtut akan menjawabnya. Buku ini mengetengahkan mozaik nasionalisme yang bertumbuh-kembang di Kalimantan Barat: wacana nasionalisme ekonomi, ide nasionalisme seorang tokoh bernama H. Rais bin Abdoerrachman, dan nasionalisme organisasi pergerakan Persatoean Anak Borneo (PAB). Ketiga tulisan dalam buku ini dapat dikategorikan sejarah mentalitas atau sejarah pemikiran yang disuguhkan melalui tiga perspektif berbeda dalam membincang ide nasionalisme di Kalimantan Barat.

m | a
Media Jaya Abadi

Padalarang-Bandung
Telp. +62 812 22205182

Email: penerbit.mja.bandung@gmail.com



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN 978-623-7526-11-7



KBA -